

**PENGALAMAN** toleransi ada dalam simbol, praktik, dan tokoh. Namun, lanskapnya ada pada wilayah geografi. Wilayah geografi ini memberikan kita informasi dan realitas Nusantara—dari sebelum Republik, sampai dengan lebih 70 tahun usia Republik. Realitas Nusantara ini tidak pernah berhenti. Realitas Nusantara ini sekaligus menjadi deposit atau sedimen dari budaya toleransi yang ditumbuhkembangkan.

Dengan “menunjuk” titik-titik pengalaman toleransi dalam lanskap geografi, ada suatu pengalaman lain yang hendak ditumbuhkan, yaitu kesadaran bahwa pengalaman toleransi ini adalah titik-titik pertumbuhan peradaban Nusantara. Titik-titik pengalaman ini terbentang dari barat sampai timur, seperti untaian zamrud. Untaian ini menjadi saksi betapa kuat dan tahan lamanya pengalaman ini.

PSIK-Indonesia  
Grha STR Lt. 4  
Jl. Ampera Raya No. 11, Cilandak  
Jakarta Selatan 12550  
Telp./Fax. (021) 7813911  
www.psikindonesia.org  
psikindonesiaorg@gmail.com



**FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG**



**INDONESIA** zamrud toleransi



# INDONESIA

## zamrud toleransi



# **INDONESIA**

## **zamrud toleransi**

Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia  
(PSIK-Indonesia)  
2017

ISBN: 978-602-72656-1-5

Penulis: Henry Thomas Simarmata, Sunaryo,  
Arif Susanto, Fachrurozi, dan Chandra Saputra  
Purnama

Desain: Andi Faisal

Foto: KHOMAINI

Gambar Sampul: Shutterstock

Penerbit:

**PSIK-Indonesia**

Grha STR Lt. 4

Jl. Ampera Raya No. 11,

Cilandak, Jakarta Selatan 12550

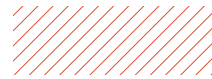
Telp./Fax. (021) 7813911

[www.psikindonesia.org](http://www.psikindonesia.org)

[psikindonesiaorg@gmail.com](mailto:psikindonesiaorg@gmail.com)

Cetakan I, Januari 2017

x + 126 halaman; 17 x 25 cm



# DAFTAR ISI

## **Toleransi dalam Masyarakat Nusantara VI**

Mengapa Toleransi? .... VI

Mengapa Zamrud?..... IX

## **Keragaman Indonesia 2**

Konflik dalam Keragaman .... 13

Makna Toleransi .... 10

Kearifan Lokal .... 16

Tentang Buku Ini .... 19

## **Akar Toleransi Indonesia 22**

A. Pembentukan Peradaban .... 23

Stimulus Peradaban Hindu .... 24

Stimulus Peradaban Buddha .... 27

Stimulus Peradaban Islam .... 28

Stimulus Peradaban Barat .... 30

- B. Budaya Gotong Royong ..... 31
    - Pengertian Gotong Royong ..... 32
    - Implementasi Budaya Gotong Royong ..... 33
    - Gotong Royong dalam Praktik ..... 35
  - C. Intelegensia Indonesia ..... 38
  - D. Pancasila dan Keindonesiaan ..... 41
    - Ketuhanan Yang Maha Esa ..... 42
    - Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ..... 44
    - Persatuan Indonesia ..... 45
    - Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan ..... 48
    - Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ..... 50
  - E. Karakter Nusantara ..... 52
    - Siklus Dunia atau Siklus Sejarah ..... 54
    - Long-term Perspective* ..... 55
    - Interaksi ..... 55
    - Perdagangan dan Lapangan Nusantara ..... 55
    - Perdagangan Pembentukan Ideal “Commonwealth” ..... 57
- Pengalaman Hidup Bersama 60**
- A. Inspirasi Perdamaian dari Maluku ..... 61
    - Budaya Masyarakat Maluku ..... 64
    - Aktor Perdamaian di Maluku ..... 65
  - B. Merajut Jalan Damai di Poso ..... 70
    - Kedatangan Islam dan Kristen di Poso ..... 70
    - Para Perajut Damai di Poso ..... 70
  - C. Mengelola Keragaman di Kalimantan ..... 74
    - Orang Madura di Sambas ..... 76
    - Kerusuhan Sambas dan Pemicunya ..... 77

Merajut Damai di Kalimantan .....	78
Harmoni Dayak-Madura di Desa Retok .....	80
D. Harmoni di Sumatra Utara .....	81
Kekerasan pada Etnis Tionghoa .....	83
Etnis Tionghoa di Sumatra Utara .....	85
Interaksi Antar-Etnis di Sumatra Utara .....	87
Masjid Lama Gang Bengkok .....	88
Sekolah Pembauran .....	90
E. Toleransi Antar-Agama di Bali .....	91
Bali sebagai Surga Dunia Terakhir .....	93
Masyarakat Multikultur .....	94
Nilai Toleransi dalam Ajaran Hindu Bali .....	95
Integrasi pada Ranah Sosial-Budaya .....	96
Bom Bali, Tantangan bagi Kedamaian .....	100
Respons atas Bom Bali .....	101
Desa Muslim Pegayaman .....	103
Ibu Gedong Bagoes Oka .....	104
F. Toleransi Umat Beragama di Yogyakarta .....	107
Pengalaman Toleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	109
G. Mengelola Keragaman di Tanah Papua .....	111
Filsafat “Satu Tungku Tiga Batu” .....	114
H. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) .....	115

**Catatan Penutup 118**

**Daftar Pustaka 122**



# TOLERANSI DALAM MASYARAKAT NUSANTARA

## MENGAPA TOLERANSI?

Ada ujaran “membunuh satu orang sama saja dengan membunuh seluruh kemanusiaan.” Ujaran ini dikenal dalam semua religi besar di dunia, seperti Islam, Kristiani, Yahudi, Buddha, Konfusian, maupun Hindu. Kekuatan ujaran ini ada dalam kemampuannya merangkum seluruh pengalaman manusia untuk menghormati kehidupan (yang kini dan yang kelak) serta membangun hormat itu bersama manusia lain. Pengalaman kebersamaan dengan manusia lain inilah yang menghubungkan kita dengan “toleransi”, yaitu praktik menghormati

orang lain sambil terus mencari titik temu.

Ada baiknya kita juga melihat “toleransi” itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada 2005, Lembaga Nobel Norwegia memberikan penghargaan Nobel Ekonomi pada Robert John Aumann dan Thomas Schelling untuk perannya dalam meningkatkan pemahaman mengenai konflik dan kerja sama melalui analisis permainan dan teori (*game theory*). Dalam model ekonomi, kerja sama dan konflik dijelaskan. Ada upaya untuk membangun kerja sama dengan membangun pemahaman dan praktik

## Toleransi dalam Masyarakat Nusantara

mencari titik temu. Begitu juga dengan studi-studi sosial, misalnya yang banyak dialami oleh Dr. Tamrin Amal Tomagola, mengenai akar-akar konflik dan damai dalam masyarakat Indonesia. “Toleransi” memasuki ranah ilmu pengetahuan dan upaya-upaya dunia untuk membangun kerja sama.

Sedemikian penting “toleransi” ini hingga perlu adanya upaya pembibitan, penanaman, dan penyuburan tanah. Berhadapan dengan tragedi kemanusiaan, perang, konflik berkepanjangan, perebutan wilayah hidup, dan pamarjinalan pihak-pihak, “toleransi” ini menjadi suatu sikap

mental, budaya, dan juga upaya pewarisan.

Nusantara adalah simbol sekaligus pengalaman yang amat panjang dalam budi daya toleransi. Nusantara mempunyai contoh dan rujukan yang amat banyak dan penting. Sejak sebelum Republik, sampai dengan usia lebih dari 70 tahun Republik, budi daya toleransi ini amat dikagumi oleh dunia. Hal ini dapat dilihat dalam kemampuan peradaban-peradaban dunia tumbuh subur di Indonesia, tanpa yang satu meniadakan yang lain. Sekaligus, ada interaksi antarperadaban tersebut.



Masjid Raya al-Mashun atau Masjid Raya Medan menjadi bukti akulturasi budaya di tanah Sumatra Utara. Pembangunan masjid diprakarsai oleh Sultan Maimum Al Rasyid Perkasa Alamsyah pada 1906 (selesai pada 1909). Masjid ini bergaya Moorish dengan perpaduan arsitektur Eropa, India, dan Timur Tengah.

Sumber: KHOMAINI.



Ornamen-ornamen sentuhan India Mughal nampak pada pilar-pilar dan atap Masjid Raya al-Mashun.

Sumber: KHOMAINI.

Nusantara memiliki pengalaman toleransi dalam simbol. Sebagai contoh, “bubur merah putih” yang menyimbolkan syukur dan bakti pada manusia. Hal ini berhubungan dengan simbol dari kelapa (daging buah kelapa dan gula kelapa) yang menyimbolkan kehidupan, serta beras yang juga simbol kehidupan. Juga mengambil makna dari tradisi Islam Shia, serta makna dari masyarakat Jawa mengenai “nama” yang menyimbolkan kehidupan. Simbol ini diwujudkan dalam upacara kecil di rumah-rumah, terutama masyarakat Jawa, sebagai wujud kebersamaan. Apa pun agamanya, apa pun latar tradisinya, upacara “tingkat keluarga” ini menjadi simbol “kembali ke keluarga, kembali ke kehidupan.” Dalam masyarakat Maluku ada “Pela Gandong” yang menjadi simbol sekaligus praktik untuk saling merangkul orang lain dengan semangat persaudaraan. Ada banyak contoh serupa lainnya.

Nusantara memiliki pengalaman toleransi dalam praktik. Masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia mempunyai kesempatan untuk berkontribusi dalam suatu peristiwa kebersamaan. Ada istilah *ewuh* atau *sambatan* untuk masyarakat Jawa,



*ngayah* untuk masyarakat Bali. Begitu juga berbagai ragam model *jimpitan* atau *urunan* yang selalu menjadi wujud toleransi dalam keseharian. Praktik toleransi yang satu ini kemudian diserap dalam bentuk modern dalam “negara kesejahteraan”. Dalam hal ini, Indonesia juga mengambil olah unsur-unsur dasar dari Nusantara sehingga Indonesia menjadi masyarakat yang tidak membudidayakan kasta atau stratifikasi total yang bersifat menindas.

Nusantara memiliki pengalaman toleransi dalam diri tokoh. Indonesia dikaruniai tokoh-tokoh besar yang mengusung penghormatan terhadap orang lain. Kebesaran mereka melampaui ruang Indonesia, dan akan selalu dikagumi ratusan tahun mendatang. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai pendekar pembela kebinekaan Indonesia. Sukarno menjadi penyambung tokoh-tokoh berbeda ideologi pada masa kelahiran republik. Hatta menegaskan bahwa upaya “mencintai Indonesia yang besar” membutuhkan “cinta yang juga besar”. Kita mempunyai ratusan tokoh lain yang mempunyai kaliber serupa, yang membuat Indonesia dikenal sebagai tanah yang subur bagi peradaban dunia untuk berkembang.

### **MENGAPA ZAMRUD?**

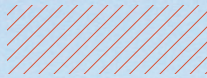
Pengalaman toleransi ada dalam simbol, praktik, dan tokoh. Namun, lanskapnya ada pada wilayah geografi. Wilayah geografi ini memberikan kita informasi dan realitas Nusantara—dari

sebelum Republik, sampai dengan lebih 70 tahun usia Republik. Realitas Nusantara ini tidak pernah berhenti. Realitas Nusantara ini sekaligus menjadi deposit atau sedimen dari budaya toleransi yang ditumbuhkembangkan.

Dengan “menunjuk” titik-titik pengalaman toleransi dalam lanskap geografi, ada suatu pengalaman lain yang hendak ditumbuhkan, yaitu kesadaran bahwa pengalaman toleransi ini adalah titik-titik pertumbuhan peradaban Nusantara. Titik-titik pengalaman ini terbentang dari barat sampai timur, seperti untaian zamrud. Untaian ini menjadi saksi betapa kuat dan tahan lamanya pengalaman ini.

Hormat kami,

Tim Penulis

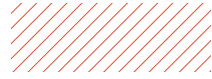


Masjid Muhammad Cheng Hoo, di Surabaya, salah satu rumah ibadah unik yang memadukan arsitektur khas Jawa, Tiongkok dan Arab. Bagunan arsitektur Masjid Cheng Hoo ini terinspirasi dari Masjid Niu Jie di Beijing.

Sumber: KHOMAINI.







# KERAGAMAN INDONESIA

**T**ahukah Anda bahwa panjang wilayah Indonesia yang membentang dari Papua hingga Aceh kurang lebih setara dengan jarak Istanbul di Turki hingga London di Inggris, atau dari Afganistan hingga Mesir? Luar biasa panjang untuk sebuah negara! Jika di tempat lain wilayah sepanjang itu terdiri atas beberapa negara, di Indonesia masih dalam satu negara! Saat ini, dengan penerbangan antarpulau yang lebih sering dan mudah, kita dapat membayangkan luasnya Indonesia. Ambil contoh, penerbangan Jakarta-Bangkok mengambil waktu sekitar 3 jam 20 menit, sedang penerbangan Jakarta-Banda Aceh juga menempuh waktu yang kurang lebih sama. Kita juga bisa membayangkan penerbangan Jakarta-Jayapura yang mengambil waktu sekitar

5 jam lebih, dengan melintasi 3 zona waktu. Atau, mari kita lihat bagian timur Indonesia, di mana Kepulauan Tanimbar hanya berwaktu tempuh beberapa jam saja berkapal menuju Darwin (Australia), tetapi mengambil waktu tempuh 2 malam menuju Ambon

Dari jumlah itu, hanya 109 suku yang ada di wilayah Barat Indonesia yang meliputi Sumatra dan Jawa, dan ada sekitar 547 suku di wilayah timur yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Papua adalah yang terbanyak memiliki keragaman suku. Ada 300-an suku

yang mendiami Papua.

Dari jumlah itu kita bisa melihat bahwa keragaman suku di Indonesia bagian timur jauh lebih banyak daripada Indonesia bagian barat. Suku atau etnis yang mendiami Indonesia bagian barat adalah suku-suku besar seperti Jawa dan Sunda. Sementara yang mendiami Indonesia bagian timur kecil-kecil. Dalam satu kecamatan saja bisa ada puluhan suku.

yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku.

Dalam rentang yang luas itu, kita juga menjumpai keragaman yang luar biasa, baik suku, bahasa dan agama. Menurut catatan etnografi, secara keseluruhan ada sekitar 656 suku di seluruh Nusantara. Jumlah bahasa di Indonesia, menurut penelitian Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada lebih dari 500 bahasa. Begitu juga agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari yang dikenal dan diakui saat

ini. Bagi masyarakat luar tentu saja sulit membayangkan ada satu kawasan yang begitu luas dan terdiri dari banyak suku, agama, dan bahasa, tetapi ada dalam satu negara. Karenanya tidak heran jika kita menyebut Indonesia sebagai salah satu keajaiban dunia. Inilah Zamrud Keragaman Indonesia.

Di beberapa tempat dan kawasan lain, misalnya di Eropa, kadang ada beberapa masyarakat yang memiliki kesamaan bahasa dan agama, tetapi mereka terpisah dalam negara yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi di kawasan Timur Tengah. Mereka memiliki bahasa yang sama, bahasa Arab, dan memiliki agama yang kurang lebih sama, Islam, tetapi terpecah dalam banyak negara, bahkan beberapa negara itu sangat kecil. Beberapa dekade lalu, Uni Soviet dan Yugoslavia yang memiliki keragaman bangsa



Mohammad Natsir (1908-1993) saat memberikan sambutan pada acara 70 Tahun Perjuangan Mohammad Natsir di Masjid Al-Azhar Kebayoran, Jakarta Selatan.

Sumber: Kompas.

dan bahasa akhirnya juga hancur menjadi beberapa negara merdeka. Penjelasannya adalah karena alasan untuk bersatu telah hilang sehingga mereka terpaksa berpisah.



I.J. Kasimo (1900-1986), pendiri Partai Katolik yang memberi sumbangan besar pada pemikiran politik di Indonesia. Pemerintah menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional pada 2011.

Sumber: [www.sesawi.net](http://www.sesawi.net).

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah keragaman yang dimilikinya tidak tanpa masalah dan gejolak? Sebagai bangsa yang sangat beragam, bangsa ini tentu saja pernah dan



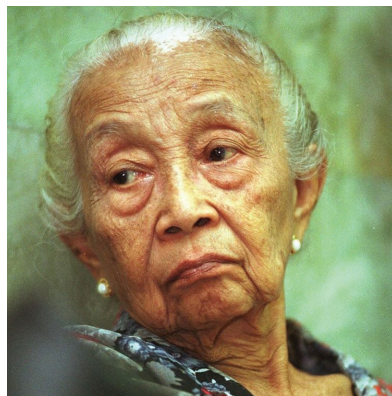
Soedjatmoko (1922-1989), salah seorang cendekiawan Indonesia terkemuka kala berbicara di Georgetown University usai menerima gelar akademik kehormatan dari universitas tersebut.

Sumber: <http://repository.library.georgetown.edu>.



Moh. Roem (1908-1983), diplomat Indonesia dan salah seorang pemimpin delegasi di Perjanjian Roem-Roijen (1949), yang membahas batas Indonesia.

Sumber: Istimewa.



SK Trimurti (1912-2008), tokoh pers Indonesia yang kerap membuat pamflet anti-penjajahan.

Sumber: Istimewa.

bahkan sering mengalami pergolakan baik dalam skala kecil maupun luas. Namun, kecintaan pada keragaman ini selalu membawa upaya-upaya dari pada tokoh-tokoh besar Indonesia untuk bertemu kembali dengan sejarah dan membangun jalan-jalan baru untuk kehidupan bineka yang kaya. Keragaman inilah yang memberikan warna pada kehidupan Indonesia, kehidupan yang kaya raya. Keragaman ini membuahkan Zamrud Toleransi.

Zamrud Toleransi adalah kisah Indonesia sejati, di mana ada rentang sejarah yang panjang yang menyajikan

pertalian masyarakat-masyarakat dari berbagai penjuru pulau untuk menjadi Indonesia. Ketika para pendiri bangsa berkumpul pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, dan menyatakan ke-Indonesiaan, mereka tidak sedang bermimpi.

Mereka hendak mengakui pertalian ini. Ragam etnis dan bahasa sudah berada di kepulauan Nusantara sejak berabad-abad lalu, dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu, yang kemudian menjadi Melayu Tinggi, sebutan mula untuk Bahasa Indonesia. Etnis Tionghoa, Arab, bersilang



Kondisi Gedung Sumpah Pemuda yang berlokasi di Jl. Kramat Raya 106, Jakarta Pusat.

Sumber: Istimewa.





Patung replika Wage Rudolf Soepratman (1903-1938) tengah memainkan biola membawakan lagu Indonesia Raya pada Kongres Pemuda II.

Sumber: Istimewa.

kehidupan dengan Banten, Pasai (Aceh), Cirebon, Jayakarta, Ternate, Banda, Goa (Makassar), Tuban, Lasem dalam rentang sejarah yang amat panjang. Riwayat pertalian yang indah inilah yang mendasari kesadaran bahwa

Indonesia menemukan cita-citanya dari sejarah dan budayanya, dan baru kemudian menjadi perjuangan anti-kolonialisme.

Kita sangat menyadari bahwa bukan hal mudah untuk mempertahankan



Indonesia yang beragam ini tetap ada dalam satu kesatuan. Sebagai bangsa, negeri ini tentu tidak tanpa konflik, gejolak dan pemberontakan. Kita mengalami itu dan tidak dapat disebut sedikit negeri ini pernah diterpa badai

konflik dan disintegrasi. Namun, meski masalah kesatuan bangsa ini tidak selalu tuntas diselesaikan, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih untuk tetap setia pada cita-cita yang lebih besar, menjadi Indonesia dibanding berpisah sebagai negara-negara merdeka. Kita semua tentu tidak tahu sampai kapan kesatuan bangsa ini akan bertahan. Yang terjadi hingga saat ini, masyarakat dan bangsa Indonesia justru semakin menyadari bahwa lebih baik bersatu dibanding terpisah-pisah.

### DEWI DJA DAN RASA CINTANYA PADA INDONESIA

Dewi Dja atau Miss Dja adalah seorang penari ulung Indonesia yang tinggal dan berkarya di Amerika Serikat. Sebelumnya, ia adalah primadona di grup sandiwara Dardanella. Ia kemudian menetap dan berkarier di Amerika Serikat setelah Dardanella melakukan tur keliling dunia.

Meski menetap dan memiliki karier yang mapan di negeri Paman Sam, cintanya pada tanah air Indonesia tidak luntur sedikit pun. Ia menemui Sutan Sjahrir yang memimpin delegasi Indonesia ke PBB untuk mendapatkan pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pada kesempatan itu, Sjahrir menyebutnya sebagai duta kebudayaan Indonesia karena kiprahnya mengenalkan kesenian Indonesia di dunia internasional.

Dewi Dja bernama panggung Miss Dja. Lahir pada 1 Agustus 1914

di Sentul, Yogyakarta, dengan nama Misria. Karena sering sakit-sakitan, namanya diganti menjadi Soetidjah. Nama Dewi didapatnya dari Susuhunan Keraton Surakarta, saat ia tampil di Keraton Surakarta.

Dunia kesenian sudah dikenal Dewi Dja sejak kecil. Ia ikut mengamen bersama kakeknya, seorang pemain gendang keliling yang bernama Sutiran. Atas bantuan seorang Arab, Sutiran kemudian membentuk kelompok stambul yang bernama Stambul Pak Adi. Dalam stambul inilah bakat Dewi Dja terasah hingga ia dapat menguasai berbagai macam tarian dan tembang yang mengiringinya.

Pada suatu kali, Stambul Pak Adi mengadakan pertunjukan di daerah yang sama dengan grup terkenal Opera Dardanella, di Rogojampi, Banyuwangi. Momen inilah yang mempertemukan Dewi Dja dengan Opera Dardanella, sebuah kelompok pertunjukan sandiwara keliling dibawah pimpinan Willy Klimanoff alias A. Piedro, seorang Rusia kelahiran Penang.

Saat Klimanov menyaksikan pertunjukan Stambul Pak Adi, ia tertarik dengan bakat dan kepribadian yang dimiliki Soetidjah yang saat itu baru berumur 14 tahun. Lewat bantuan Camat Rogojampi, Klimanov melamar Soetidjah. Meskipun keluarganya keberatan atas pinangan itu, Soetidjah menerimanya. Mereka menikah secara Katolik. Meski demikian, sepanjang hidupnya, ia tetap mengaku sebagai muslim. Soetidjah kemudian menjadi bagian dari Opera Dardanella. Ia mendapat nama panggung Miss Dja.

Di Dardanella, Miss Dja menjadi primadona. Ia mendapat julukan Bintang dari Timur (*Star from the East*). Tak hanya cantik dan pandai berakting, kostum yang dikenakannya pun

menarik perhatian dan menjadi tren berpakaian baru oleh wanita-wanita di zamannya. Bersama Dewi Dja dan beberapa bintang lainnya, Dardanella mencapai puncak keemasannya.

Dardanella kemudian memulai pertunjukan keliling dunia, bermula di Singapura pada 1931. Mereka menjadi kelompok kesenian Indonesia pertama yang melakukan pertunjukan di luar negeri. Saat itu, Dewi Dja baru berusia 17 tahun.

Untuk mengatasi kendala bahasa, saat tampil di luar negeri, Dardanella mengandalkan tarian dan bahasa tubuh sehingga bisa dipahami oleh penonton asing. Nama Dardanella pun berganti menjadi The Royal Bali Java Dance.

Dari Singapura, grup ini beranjak ke Hong Kong, Tiongkok, dan India. Di India, Dardanella tampil di beberapa kota, seperti New Delhi, Bombay, Madras, dan Kalkuta. Saat tampil di New Delhi, Dewi Dja memperlihatkan kemampuannya di hadapan dua tokoh besar India, Mahatma Gandhi dan Rabindranath Tagore. Di Rangoon, pada waktu yang lain (11 Mei 1937), ia mendapatkan pujian dari Jawaharlal Nehru.

Grup ini kemudian mengadakan pertunjukan ke berbagai kota lainnya di dunia, baik di benua Asia, Eropa, maupun Amerika. Di Prancis, Dewi Dja mendapat pujian dari Maurice Chevalier, aktor dan penyanyi Prancis yang populer saat itu.

Saat di Amerika, terjadi perselisihan yang membuat Dewi Dja meninggalkan Dardanella dan memilih untuk menetap di sana. Peristiwa ini justru memberi kesempatan luas untuknya untuk aktif di dunia film Amerika (Hollywood) dan nantinya turut andil dalam perjuangan bangsa pasca Indonesia merdeka.

Di Amerika, Dewi Dja melakoni berbagai pekerjaan seni. Ia mengajar

tari di American Ballet School, lalu Paramount Picture. Banyak sekolah tari yang menginginkannya untuk menjadi pengajar karena kecantikannya dan nama besarnya. Ia juga menjadi koreografer di beberapa film.

Kiprahnya juga merambah dunia televisi ketika ia secara berkala mengisi acara tarian asal Indonesia di salah satu stasiun televisi lokal. Ia sempat pula bermain film sebagai pemeran pembantu dalam *The Moon Sixpence* yang disutradarai sahabatnya, Albert Lewin.

Dewi Dja banyak bersahabat dengan para pesohor Hollywood era 1950-an, seperti Greta Garbo, Carry Cooper, Bob Hope, Dorothy Lamour, dan Bing Crosby. Teman-temannya inilah yang banyak membantu karier Dewi Dja.

Tinggal lama di luar Indonesia dan menjadi orang terkenal tidak membuat Dewi Dja melupakan tanah airnya. Meski telah berkewarganegaraan Amerika, rasa keindonesiaan yang dimilikinya tetap kental. Secara aktif, ia mengenalkan budaya dan makanan khas Indonesia pada masyarakat Amerika.

Dewi Dja pernah menemui Sutan Sjahrir yang memimpin delegasi Indonesia ke PBB untuk memperoleh pengakuan internasional atas Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya. Dia juga duduk sejajar dengan Sjahrir dan H. Agus Salim saat mereka berdialog dengan kaum terpelajar Amerika. Perasaan telah memiliki negara yang merdeka dan ikut ambil bagian dalam perjuangan mendapatkan pengakuan atas kedaulatan Indonesia membuatnya terharu. Di dalam hati, ia merasa bangga karena tokoh-tokoh Indonesia kala itu mengenal dan mengakui dirinya.



Haji Agus Salim (1884-19534).

Sumber: *Menjadi Indonesia Buku I: Akar-akar Kebangsaan Indonesia*

Kecintaan Dewi Dja pada Indonesia sangat besar. Bersama The Indonesian Association di San Francisco, ia pernah mengadakan pertunjukan kesenian Indonesia. Pendapatan dari pertunjukan itu ia sumbangkan untuk Indonesia.

Dewi Dja meninggal di meninggal di Los Angeles pada 19 Januari 1989, dan dimakamkan di Hollywood Hills.

Tentu saja, dari pengalaman-pengalaman masa lalu, kita belajar untuk memperbaiki agar kesatuan itu tetap bisa dipertahankan.

Melalui lintasan “Zamrud Toleransi” dalam buku ini kita melihat pengalaman-pengalaman kemasyarakatan dan juga kenegaraan di Indonesia. Dari pengalaman itu kita menjumpai keragaman, menyaksikan perselisihan dan melihat bagaimana masyarakat dan juga negara menyelesaikan masalah-masalah itu. Meski tidak semua

masalah terselesaikan secara tuntas, tetapi komitmen untuk membangun kehidupan bersama dalam damai dan saling toleran justru semakin kuat. Kita menyaksikan hal itu di Maluku, Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan tempat-tempat lain. Komitmen



Rumah Tradisional Batak (Ruma Gorga) di Toba, Samosir, Sumatra Utara.

Sumber: KHOMAINI.

kolektif semacam itu barangkali yang membuat Indonesia masih ada dan berdiri hingga hari ini. Meski bukan sesuatu yang unik, tidaklah salah jika pengalaman-pengalaman ini kita bagi.

Buku ini menjadi bagian dari tiga upaya penting berkaitan dengan usaha membangun kehidupan dalam keberagaman: (1) literasi, yaitu merekam pengalaman nyata masyarakat di beberapa wilayah Indonesia dalam membangun kerukunan antaretnis dan agama; (2) membangun kemampuan bergenerasi dari masyarakat Indonesia untuk tetap mampu menerima, mengolah, dan mentransformasi keberbedaan itu menjadi keindonesiaan; (3) membangun jalan-jalan yang memungkinkan semakin banyak keragaman itu memberikan sumbangan pada Indonesia.

### MAKNA TOLERANSI

Kata “toleransi” berasal dari bahasa Inggris “*toleration*”. Akar kata itu diambil dari bahasa Latin “*toleratio*”. Arti paling klasik (abad ke-16) kata “*toleration*” adalah “izin yang diberikan oleh otoritas atau lisensi.” Sementara di abad ke-17 (1689), kata itu memiliki nuansa hubungan antaragama karena ada undang-undang/kesepakatan toleransi (*the Act of Toleration*). Dalam kesepakatan itu ditegaskan jaminan kebebasan beragama dan beribadah kepada kelompok Protestan di Inggris. Pada masa itu kerap terjadi pelarangan dan pembatasan berkeyakinan yang

merupakan akibat dari konflik antara Katolik dan Protestan di Eropa. Melalui kesepakatan itu, pemerintah atau penguasa diminta untuk mengakui hak dan kebebasan beragama bagi siapa pun.

Dalam perkembangannya, kata dan praktik toleransi mengalami pendalaman. Toleransi bukan hanya sekadar menerima perbedaan. Michael Walzer menunjukkan beberapa tingkat makna dan praktik toleransi dalam sejarah (Walzer, 1997). Menurutny ada beberapa makna dan juga gradasi praktik toleransi. Pada tingkat pertama, praktik toleransi yang berlangsung di Eropa sejak abad ke-16 dan ke-17 sebenarnya baru sekadar

praktik penerimaan pasif terhadap perbedaan demi lahirnya perdamaian. Sebagaimana diketahui, di masa itu telah terjadi perang antara Katolik dan Protestan yang berlangsung lama sehingga pihak-pihak yang bertikai akhirnya merasa lelah dan mengajukan damai dengan menerima keberadaan masing-masing. Dalam pandangannya, pengertian ini belum cukup untuk memaknai toleransi yang lebih aktif.

Walzer kemudian menunjukkan model berikut di tingkat kedua. Ia menyebut tingkat kedua ini sebagai ketidakpedulian yang lunak pada perbedaan. Pada tingkat ini, keberadaan orang lain (*the others*) sebenarnya sudah diakui. Hanya saja



Lukisan yang menggambarkan keragaman dan harmoni antarwarga masyarakat Kampung Sawah menghiasi dinding gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah, Jatimelati, Bekasi.

Sumber: KHOMAINI.

kehadirannya tidak memiliki makna apa-apa. Barangkali pengertian ini masih pada tingkat yang minimal dalam relasi antar-yang berbeda. Kita mengetahui bahwa kita punya tetangga yang berbeda, tetapi kita tidak terlalu peduli pada perbedaan itu. Bahkan kita cenderung tidak mau tahu pada perbedaan itu. Hal itu bisa saja karena kekhawatiran akan membuat mereka berselisih paham misalnya. Dalam konteks toleransi pada perbedaan, kondisi seperti ini tentu masih belum ideal untuk menyebutnya sebagai sikap saling toleran.

Baru pada tingkat ketiga kita melihat adanya pengakuan (*recognition*) terhadap yang berbeda. Pada tahap ini kita mengakui orang lain memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dilangkahi meski kita tidak menyetujui isi pandangan pihak lain itu. Toleransi pada tingkat ini tentu saja sudah beranjak lebih jauh di mana perbedaan tidak harus disikapi secara negatif. Secara praktis, jika sebuah masyarakat mampu mencapai level ini, sebenarnya mereka sudah mencapai tingkat hubungan toleransi yang baik atau cukup dalam membangun kehidupan bersama dalam damai (*peaceful coexistence*). Mereka saling mengakui adanya perbedaan dan tidak mempersoalkan perbedaan itu meski mereka tidak saling bersepakat.

Kita sebenarnya masih bisa mengangkat kondisi ini ke level yang lebih tinggi, ke tingkat yang keempat. Pada level yang lebih tinggi ini,

kita tidak hanya mengakui adanya perbedaan tetapi juga bersikap terbuka pada yang lain. Di level ketiga, kita memang sudah mengakui adanya perbedaan bahkan pada hal yang sangat prinsip, tetapi setiap pihak masih belum membangun sikap saling terbuka dan belum ada upaya saling mengerti (*mutual understanding*). Pada tahap keempat ini, keterbukaan dan upaya membangun saling pengertian terjadi. Tentu saja jika sebuah masyarakat mampu mencapai level ini, mereka sudah mencapai level yang sangat baik. Nah, sebenarnya masih ada level yang tertinggi atau tingkat kelima. Pada tingkat yang dianggap sebagai capaian tertinggi dalam praktik toleransi, kita tidak hanya mengakui dan terbuka, tetapi juga mendukung, merawat, dan merayakan perbedaan itu.

Dalam konteks penulisan buku ini, kami ingin menyajikan toleransi sebagai proses inklusi sosial dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Proses inklusi itu bisa saja ada dalam gradasi toleransi yang berbeda-beda. Apa yang disajikan tentu bukan model ideal sebuah masyarakat toleran. Namun satu hal yang perlu dicatat, meski belum ideal dan masih memiliki banyak catatan (kekurangan)—konflik antaretnis dan tindakan kekerasan mengatasnamakan agama masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia—capaian proses inklusi yang telah berlangsung mampu menyelamatkan keragaman Indonesia dalam satu komitmen kesatuan yang luar biasa. Kita berusaha

untuk belajar memaknai hidup bersama dengan tetap dalam keragaman.

### KONFLIK DALAM KERAGAMAN

Sejatinya, konflik dalam kehidupan masyarakat adalah sesuatu yang bersifat endemik. Tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik. Karenanya, konflik selalu ada dalam setiap masyarakat, apalagi dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Kesenjangan budaya dan perbedaan keyakinan sangat potensial untuk melahirkan konflik. Namun, konflik tidak hanya lahir karena perbedaan budaya dan keyakinan. Ada faktor lain yang juga penting untuk dilihat, yakni ketimpangan sosial dan akses atau partisipasi pada kekuasaan. Dalam beragam konflik yang pernah terjadi di Indonesia, faktor-faktor itu bisa ditelusuri, meski barangkali tidak sederhana yang dibayangkan.

Pada faktor yang pertama, soal kesenjangan budaya dan perbedaan keyakinan, atau yang kerap disebut masalah kultural, kita sangat menyadari bahwa komunitas bangsa ini sangat beragam. Karenanya perlu ada kearifan dalam mengelola keragaman itu. Supardi Suparlan memiliki catatan dalam menyikapi keragaman masyarakat Indonesia. Menurutnya, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kita perlu memperhatikan keseimbangan hubungan kekuatan antara masyarakat suku bangsa dan sistem nasional. Keseimbangan itu menjadi prasyarat bagi stabilitas

sosial. Jika sistem nasional terlalu kuat atau dominan maka nilai-nilai yang dianut masyarakat suku akan tertekan dan melemah. Kondisi ini bisa memunculkan ekspresi-ekspresi kekecewaan dalam satire atau lelucon. Ekspresi itu merupakan bentuk dari pemberontakan terselubung atas dominasi kekuasaan nasional. Jika tidak direspons dengan tepat, kekesalan itu bisa meledak secara terbuka sebagaimana yang bisa dilihat dalam kasus konflik komunal tahun 1996 hingga 2000 di Kalimantan Barat (Suparlan 2005).

Dalam konteks kebijakan pengelolaan keragaman di Indonesia, Suparlan berpendapat, alih-alih menekankan keragaman suku bangsa, ia lebih memberikan perhatian pada keragaman kebudayaan. Dalam hal ini ia membedakan antara cara pandang keragaman suku bangsa dan keragaman kebudayaan. Yang harus kita ambil sebagai perspektif adalah masyarakat berkeragaman kebudayaan (*multicultural society*) atau paham multikulturalisme, bukan masyarakat majemuk (*plural society*). Yang ia pahami sebagai multikulturalisme adalah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak hidup masyarakat. Multikulturalisme mengagungkan dan melindungi keanekaragaman budaya, termasuk kebudayaan kelompok



minoritas. Dalam multikulturalisme semua kebudayaan ada pada posisi yang sederajat. Tidak hanya itu, dalam multikulturalisme juga terjadi pengayaan budaya dengan mengadopsi unsur-unsur budaya lain yang dianggap cocok dan berguna tanpa ada hambatan.

Selain masalah budaya, kita juga harus melihat ketimpangan sosial yang tajam sebagai sumber konflik. Masalah pengangguran karena tidak adanya pekerjaan menjadi perhatian van Klinken ketika menganalisis konflik-konflik di luar wilayah Jawa. Menurutnya

pandangan yang mengatakan bahwa konflik di luar Jawa adalah akibat dari migrasi yang masif tidaklah terlalu tepat. Jika dilihat lebih detail, jumlah para pendatang di beberapa daerah konflik sebenarnya tidak terlalu besar. Misalnya orang Madura di Kalimantan jumlahnya tidak lebih dari 3 persen. Padahal di tempat lain, jumlah pendatangnya bisa lebih besar. Begitu juga pandangan yang menilai bahwa konflik itu terjadi karena adanya kejengkelan dan sakit hati sehingga muncul mobilisasi untuk menyerang kelompok lain. Bagi van Klinken, sulit membayangkan bahwa



Rumah Budaya di Kampung Budaya Sindangbarang, Bogor, Jawa Barat.

Sumber: KHOMAINI.

orang bisa dimobilisasi sedemikian lama sebagaimana yang terjadi dalam konflik di luar Jawa, hanya karena kejengkelan atau sakit hati semata (van Klinken 2007).

Dalam pandangannya, untuk kasus daerah luar Jawa sebenarnya ada penjelasan yang barangkali lebih masuk akal. Alternatif penjelasan itu ada pada akses pekerjaan masyarakat yang mengalami deagrarianisasi. Deagrarianisasi adalah beralihnya masyarakat dari kerja sektor pertanian dan juga nelayan ke kerja non-pertanian. Sejak masa Orde Baru, Indonesia mengalami deagrarianisasi besar-besaran, dari 36 persen pada tahun 1971 menjadi 55 persen pada 1998. Pertanyaan penting dalam masalah ini, setelah mereka pergi dari sektor kerja pertanian atau nelayan, ke mana mereka kemudian bekerja? Di Jawa, hal itu terjawab karena kerja industri mampu menyelamatkan mereka. Namun di luar Jawa, hal itu menjadi masalah yang sangat serius. Kelompok masyarakat yang mengalami deagrarianisasi menggantungkan hidupnya pada para broker yang memperoleh proyek-proyek pemerintah lewat birokrasi. Ketergantungan ini menjadi kondisi yang memungkinkan (*condition of possibility*) bagi konflik komunal dalam jangka panjang ketika para broker itu menjadi aktor-aktor utama dalam konflik itu.

Faktor lain yang juga perlu dilihat sebagai sumber konflik adalah proses peminggiran yang masif yang dilakukan oleh negara terhadap satu kelompok

masyarakat. Di masa Orde Baru, lewat kebijakan pembangunannya, pemerintah kerap menempatkan kelompok etnis lokal, seperti yang dialami oleh suku Dayak di Kalimantan sebagai terbelakang dan primitif. Kebijakan tersebut membuat kelompok yang dinilai primitif itu semakin tersingkirkan. Mereka bukan hanya tidak bisa mengakses kekuasaan, tetapi ruang hidupnya juga hilang. Kondisi itu tentu saja melahirkan kemarahan kolektif. Namun pada saat yang sama mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan kekuasaan negara yang dijaga oleh militer pada saat itu. Maka ekspresi kemarahannya diarahkan kepada kelompok “paling lemah” yang kadang juga disokong oleh negara. Barangkali itulah beberapa penjelasan tentang faktor-faktor konflik dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Faktor-faktornya juga sangat beragam dan kompleks sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus.

Semua faktor itu seharusnya disadari dan dipahami sebagai peringatan agar kita tidak lagi terjerembab dalam konflik besar di masa depan. Memang dalam kondisi yang sangat kompleks seperti di Indonesia, tidak ada jaminan bahwa konflik akan hilang total. Suparlan pernah berpendapat, dalam hubungan antar-kelompok dan budaya yang beragam, tidak ada obat mujarab yang menjamin masyarakat akan imun dari konflik. Konflik antar-suku misalnya adalah produk dari hubungan antar-

suku itu sendiri dengan sebab-sebab yang ada dalam konteks lokal mereka. Karenanya, solusi yang ditawarkan tidak bisa sama untuk semua konflik. Baginya, cara terbaik menyelesaikan konflik jelas bukan dengan kekerasan, misalnya dengan menggunakan tentara. Potensi konflik selalu ada dan akan tetap hidup seperti api dalam sekam yang bisa meledak setiap saat. Dalam jangka panjang, konflik bisa diredam dengan memahami penyebab-penyebabnya. Setelah itu, kita perlu memikirkan strategi negosiasi agar masyarakat yang bermusuhan dapat hidup berdampingan secara damai.

### KEARIFAN LOKAL

Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, konflik merupakan peristiwa yang kadang sulit dihindari. Karena kesadaran itu, maka kita perlu memahami potensi-potensi dan faktor-faktor yang bisa menciptakan konflik dalam masyarakat yang sangat beragam ini. Selain itu, di internal setiap masyarakat kadang juga terkandung kearifan lokal, yang pada level tertentu bisa meredam kemungkinan konflik melebar dan meluas. Tentu saja, kearifan lokal bukan obat mujarab, namun paling tidak ia bisa mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Dalam kasus-kasus konflik yang pernah terjadi, seperti di Maluku, Poso, dan Kalimantan, kearifan lokal bisa membantu mempercepat pemulihan ketegangan dan kecurigaan yang masih berlangsung pascakonflik.

Ada beberapa budaya lokal yang memiliki fungsi merekatkan masyarakat yang memiliki potensi konflik. Misalnya adalah tradisi *pela gandong* di Maluku. Dengan tradisi *pela gandong*, dua negeri (desa) yang berbeda agama, Islam (*Salam*) dan Kristen (*Sarane*, dari kata Nasrani), diikat dalam tali persaudaraan. Tradisi *pela gandong* sebenarnya tradisi yang sudah ada sejak lama, dan tradisi itu yang membuat sebagian masyarakat Maluku, meski berbeda agama namun sudah seperti saudara kandung. Karenanya, bagi sebagian besar kalangan, konflik antara umat Islam dan Kristen pada 1999 adalah kejadian yang sangat mengagetkan. Ke mana tradisi *pela gandong* yang mengikat kedua umat tersebut? Tentu saja penjelasannya cukup rumit dari hanya sekadar lunturnya budaya *pela gandong*. Ada masalah distribusi politik yang tidak adil dan kecemburuan sosial akibat tata kelola yang buruk.

Namun setelah konflik itu, selain memperbaiki tata kelola keragaman dan distribusi kekuasaan agar lebih *fair*, sebagian masyarakat, baik muslim maupun Kristen kembali aktif menghidupkan budaya *pela gandong*. Melalui tradisi *pela gandong*, masyarakat yang memiliki ikatan persaudaraan itu akan merasa berkewajiban untuk saling membantu. Jika pihak muslim sedang mempunyai hajat, misalnya membangun masjid, maka saudara-saudaranya yang Kristen dipastikan akan membantu. Begitu juga sebaliknya, ketika umat Kristen sedang

membangun gereja, yang muslim wajib membantu. Budaya semacam ini tentu saja bukan jaminan bahwa mereka akan terhindar dari perselisihan. Namun paling tidak, budaya ini bisa menjadi alat peringatan dini sehingga konflik tidak meluas.

Di masyarakat Nusantara yang lain juga ada budaya yang memiliki fungsi untuk meredakan perselisihan. Di Kabupaten Soe, Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, terdapat tradisi “Okomama”. Okomama sebenarnya adalah sebuah kotak dengan aneka ukuran yang di luarnya dibalut dan dilapisi kain tenunan adat. Di dalamnya terdapat sirih, pinang, dan kapur.

Dalam masyarakat Soe, bila ada konflik atau pertikaian maka pihak-pihak yang bertikai kemudian dipertemukan untuk berdamai. Oleh para pemimpin adat, mereka diminta untuk berjanji dan bersumpah agar tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Yang ada hanyalah perdamaian. Sumpah dan janji itu dilakukan dengan saling memasukkan kedua tangan pihak yang saling bertikai ke dalam okomama itu. Usai itu mereka saling berangkulan dan saling mengunyah sirih dan pinang dari dalam okomama.

Tradisi Okomama adalah simbol yang menandai adanya ikatan tali persaudaraan dan persahabatan.



Tradisi Okomama di Kabupaten Soe, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi simbol yang menandai adanya ikatan tali persaudaraan dan persahabatan. Tradisi ini dilangsungkan untuk meredakan perselisihan yang berlangsung di antara warga.

Sumber: Istimewa.

Sebagian besar orang Nusa Tenggara Timur, muda atau tua, laki-laki atau perempuan biasanya mengunyah sirih-pinang karena sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka. Bagi orang luar NTT, jika ingin diterima sebagai saudara atau sahabat, mereka harus menerima ketika ditawari sirih-pinang Okomama. Jika si pendatang tidak terbiasa mengunyah sirih, maka ia cukup memasukkan tangannya ke dalam (wadah) okomama itu. Usai itu maka sang tamu atau pendatang itu dengan mudah diterima dengan hangat sebagai sahabat.

Dalam menyelesaikan perselisihan, masyarakat Musi Rawas, Sumatra Selatan juga memiliki tradisi yang disebut Tepung Tawar. Tradisi ini memiliki fungsi untuk menetralisasi konflik tersebut. Sejauh ini, tradisi tepung tawar dinilai cukup efektif bukan hanya untuk mengakhiri konflik tetapi juga mampu menumbuhkan rasa persaudaraan antar-kelompok yang sebelumnya bertikai. Biasanya, jika terjadi konflik atau perselisihan, tokoh adat setempat berinisiatif menemui keluarga yang bertikai untuk melihat asal usul dan penyebab pertikaian. Setelah itu, tokoh adat dari pihak yang dinilai bersalah mendatangi pihak keluarga yang menjadi lawan bertikai sambil membawa "Punjung Mentah". Di dalam Punjung Mentah itu terdapat kopi, gula, 2 kilogram beras, 1 ekor ayam, dan satu bungkus rokok.

Dari segi nilai, isi barang bawaan itu tentu saja tidak seberapa, tetapi dalam tradisi itu Punjung Mentah itu

merupakan ungkapan penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Sejauh ini, jika sudah dibawakan Punjung Mentah, keluarga korban akan merasa puas dan dihormati sehingga biasanya langsung menerima ungkapan maaf itu dengan lapang dada tanpa rasa dendam. Usai pemberian Punjung Mentah, kemudian dilanjutkan dengan tradisi Tepung Tawar. Dalam tradisi ini, pemuda atau orang yang saling bertikai itu kemudian saling mengoleskan tepung tawar di badannya. Sesudah itu, maka kedua pemuda yang bertikai dianggap menjadi bagian dari saudaranya sendiri. Hal yang ditekankan dalam tradisi ini sebenarnya adalah upaya untuk menempatkan posisi setiap orang atau pihak pada posisi yang bermartabat dan layak dihormati.

Tradisi-tradisi di atas merupakan cara masyarakat Nusantara untuk membangun harmoni, persaudaraan, kerja sama, dan nilai positif lainnya. Masih banyak tradisi lokal lainnya yang memiliki fungsi serupa. Barangkali, tradisi-tradisi itu lahir karena kita sangat menyadari bahwa setiap saat bisa terjadi konflik dalam masyarakat yang sangat beragam ini. Tidak semua konflik harus diselesaikan secara hukum. Melalui tradisi-tradisi itu, konflik dan perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan dengan menjaga martabat dan kehormatan masing-masing pihak. Bahkan jika dimungkinkan, tradisi itu justru diharapkan mampu membangun

tali persaudaraan antarmereka yang bertikai. Karenanya, ada ungkapan yang cukup terkenal dalam masyarakat Nusantara, “Tak Kenal maka Tak Sayang”. Inilah salah satu kekhasan masyarakat Nusantara dalam menyikapi perbedaan. Birgit Bräuchler pernah menegaskan sikap ini pada cara orang Maluku menyelesaikan konflik. Katanya “*Reconciliation came rather naturally (secara alami), when we became aware of the disastrous effects of the conflict and the need to restrengthen our culture, our adat, and our identity (budaya, adat, dan jati diri)*” (Bräuchler 2015: 1).”

### TENTANG BUKU INI

Buku ini disusun dengan menggunakan banyak pendekatan secara sekaligus. Namun, pada dasarnya, buku ini adalah upaya untuk belajar dari pengalaman nyata masyarakat Nusantara dalam membangun nilai toleransi. Kisah-kisah dalam buku ini adalah nyata. Kisah-kisah ini mewakili upaya “nyaris super” (*beyond human*) yang pernah diperjuangkan manusia-manusia Indonesia. Dalam situasi yang sulit dan dengan tanggapan masyarakat yang tidak langsung muncul, upaya itu diperjuangkan.

Kami dari tim penulis juga turut mempunyai pengalaman tersebut, satu dan lain hal. Meski pengalaman itu tidaklah seintensif yang ada dalam kisah ini. Namun, amat jelas bahwa pengalaman ini juga memberikan tuntunan bagaimana membangun Indonesia yang toleran.

Masuk dalam pertimbangan tim penulis adalah pengalaman-pengalaman yang sudah masuk dalam katalog penghargaan publik. Hal ini termasuk Penghargaan Yam Tiam Hien, Penghargaan Kompas, Penghargaan Maarif, untuk menyebut beberapa. Tim penulis menghargai penghargaan ini sebagai bagian penting dalam menyemai Indonesia yang toleran dan kaya.

Dalam proses penulisan, tim penulis mencermati survei dan laporan yang ada mengenai situasi (in)toleransi di Indonesia, dengan intensitas yang berbeda. Termasuk dalam penghargaan tim penulis adalah laporan dari PPIM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Solidaritas Perempuan, The Wahid Institute, dan Setara Institute.

Dengan tetap menimbang pencermatan, tim penulis membingkai penulisan ini sebagai sebuah interaksi dengan pengalaman. Penulisan ini tidak dimaksudkan sebagai studi ilmu sosial atau, misalnya, studi pemerintahan. Pembaca, penggiat masyarakat, atau khalayak yang lebih luas dapat melakukan pencermatan terhadap kisah-kisah yang ada, dan dapat membangun upaya-upaya di berbagai tingkat dan intensitas masyarakat.

Bisa saja ada bagian dari sidang pembaca yang tidak setuju, namun pengalaman dari kisah-kisah itu adalah nyata dan asli. Dalam hal ini, yang mengalamilah yang mempunyai tempat untuk mengisahnkannya. Interaksi antar-pengalamanlah yang diharapkan dapat terjadi.



Kelenteng Sam Poo Kong di Simangan didirikan untuk mengenang pendaratan Laksamana Cheng Ho di Semarang. Selain menjadi tempat sembahyang, kelenteng ini juga menarik minat wisatawan yang penasaran dengan sosok sang Laksamana.

Sumber: KHOMAINI.







# AKAR TOLERANSI INDONESIA

**S**ejarah Nusantara adalah sejarah pertautan dari beragam peradaban besar, mulai dari Hindu, Buddha, Islam, dan kebudayaan Barat. Yang terjadi dalam pertautan itu bukan hanya sekadar masuknya budaya-budaya besar ke Nusantara, melainkan sebuah dialog yang aktif dan konstruktif. Dialog itu menghasilkan sesuatu yang baru yang khas Nusantara. Dengan demikian, masyarakat Nusantara sebenarnya tidak melakukan replikasi atas apa yang datang dari luar, mereka justru juga menciptakan kebudayaan baru.

Karena Nusantara menjadi tempat pertautan dari beragam peradaban dan kebudayaan, maka pengalaman keragaman merupakan sesuatu yang

inheren dalam masyarakat Nusantara. Kondisi ini menjadi lahan subur bagi pertumbuhan tradisi toleransi keragaman di Indonesia. Dari sejarah Nusantara, kita bisa melihat bahwa masyarakat Nusantara sangat terbuka terhadap semua kebudayaan yang berasal dari luar. Dengan daya kreativitasnya, kebudayaan-kebudayaan itu kemudian “dikunyah” sehingga menghasilkan bentuk budaya baru yang sesuai dengan kondisi setempat.

Apa yang ditunjukkan dalam bab ini adalah sebuah “*the condition of possibility*” dari tradisi toleransi di Indonesia. Kondisi yang memungkinkan pertumbuhan toleransi di Indonesia ini dapat kita telusuri jejaknya dari interaksi Nusantara dengan kebudayaan-kebudayaan besar.

Interaksi dan dialog itu kemudian menghasilkan sesuatu yang baru yang dianggap lebih cocok dengan karakter Nusantara.

Kenyataan ini sangat disadari oleh para pendiri bangsa ketika mereka merumuskan prinsip hidup bersama untuk Indonesia merdeka di pertengahan abad XX. Mereka berhasil menangkap jiwa dari Nusantara, yakni semangat gotong royong, sebuah semangat yang mencoba merangkul semua untuk tujuan dan kebaikan bersama. Rumusan itu mereka tuangkan dalam lima prinsip hidup bersama yang dikenal sebagai Pancasila. Kini kita menyadari betul bahwa Pancasila menjadi perekat hidup bersama. Setiap kali ada gangguan dalam kehidupan kolektif, kita selalu diingatkan oleh pesan yang ada dalam Pancasila.

#### **A. PEMBENTUKAN PERADABAN**

Mari kita ambil contoh Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Satu kepulauan ini saja ada sekitar 300-an pulau besar dan kecil. Atau Kepulauan Anambas yang mempunyai jumlah pulau sekitar 238 pulau-pulau kecil, dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Inilah yang memberikan penjelasan mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah total mencapai 13.466 pulau. Terdiri atas 5 kepulauan besar, yaitu Kalimantan, Sumatra, Papua, Sulawesi, dan Jawa, juga 30 kelompok kepulauan kecil lainnya.

Kepulauan Indonesia terbentuk dari pegunungan yang membujur dari barat ke timur, membuatnya menjadi salah satu wilayah paling vulkanik di dunia. Indonesia memiliki luas daratan 1.910.000 km<sup>2</sup> dan luas lautan 6.279.000 km<sup>2</sup>, dilewati khatulistiwa, terletak di persilangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Penduduk Indonesia kini berjumlah sekitar 255 juta orang. Mereka terdiri atas beragam suku, di antaranya Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, Banjar, Bali, Aceh, Dayak, Sasak, dan sebagainya. Lebih daripada 700 bahasa daerah memiliki penutur dalam jumlah signifikan, dan terdapat satu bahasa nasional, yaitu Bahasa Indonesia, yang berakar dari Bahasa Melayu. Di antara para pemeluk agama, tercatat 87,2% Muslim, 7% Kristen, 2,9% Katolik, 1,7% Hindu, 0,9% Buddha dan Konghucu, sementara 0,4% lainnya menganut kepercayaan berbeda.

Nama Indonesia, yang berarti pulau-pulau India, dipopulerkan oleh seorang etnolog Jerman Adolf Bastian dan telah digunakan sejak 1884 untuk menyebut semua pulau antara Australia dan Asia. Sempat populer dengan studi-studi Cornelis van Vollenhoven, Indonesia semakin dirujuk menjadi subjek pengetahuan tersendiri. Di tahun 1930, "Indonesia" dipakai sebagai subjek cita-cita kebangsaan dalam pembelaan Sukarno, dengan judul "Indonesia Menggugat". Nama inilah yang kemudian dipilih oleh para

pejuang kemerdekaan untuk menyebut suatu bangsa baru yang hendak mereka bentuk dan kemudian diproklamasikan bersama oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Pahlawan nasional E.F.E. Douwes Dekker sempat menghidupkan kembali istilah Nusantara dari masa Majapahit, yang diberi makna baru sebagai “kepulauan di antara dua benua dan dua samudra,” sebagai nama bagi negeri kepulauan ini.

Sejak awal, Indonesia selalu beragam dan terbuka terhadap pengaruh yang datang dari luar. Keberagaman ini melahirkan suatu Indonesia yang kaya, dan sifat keterbukaannya terus membentuk ulang Indonesia menjadi lebih kaya. Asimilasi tersebut sekaligus menunjukkan adanya energi kreatif yang dimiliki bangsa ini. Indonesia bukan sekadar penerima budaya lain, melainkan pencipta yang menghasilkan



Tiga pendiri *Indische Partij*: Soewardi Soerjadiningrat (1889-1959), E.F.E. Douwes Dekker (1879-1952), dan dr Tjipto Mangoenkusumo (1889-1953).

Sumber: Parakriti T. Simbolon, *Menjadi Indonesia Buku I: Akar-akar Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Kompas, 1995), h. ab.

suatu budaya baru. Merujuk kitab *Sutasoma* yang ditulis Mpu Tantular dari masa Majapahit pada abad XIV, *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi satu jua) dijadikan semboyan dalam lambang negara Garuda Pancasila.

Tak hanya majemuk secara kultural, Indonesia adalah negara hibrida yang terbentuk sebagai suatu persilangan atau kombinasi di antara beragam budaya berlainan. Indonesia adalah suatu *melting pot*, tempat berbagai suku dan ras membangun suatu kohesivitas dari bayangan bersama tentang kesatuan di antara mereka. Inilah juga suatu tempat berlangsungnya suatu dialog antar-peradaban yang berbeda. Mereka saling memberi pengaruh dalam jangka panjang tanpa menimbulkan suatu guncangan radikal. Tak pelak, Indonesia masa lalu menyediakan warisan pengalaman toleransi yang luar biasa bagi kehidupan kontemporer untuk dapat berdamai dengan perbedaan dan untuk memperkaya peradaban lewat proses memberi dan menerima satu sama lain.

### Stimulus Peradaban Hindu

Kerajaan benuansa Hindu pertama di Nusantara adalah Kutai di Kalimantan Timur, yang didirikan Kudungga sekitar abad IV. Bukti keberadaan Kerajaan Kutai antara lain suatu tugu tempat persembahan yang bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Aṅwawarman, nama ini berakar Sanskerta, adalah raja kedua



Prasasti Yupa merupakan salah satu bukti sejarah Kerajaan Kutai yang paling tua.

Sumber: [www.satujam.com/kerajaan-kutai/](http://www.satujam.com/kerajaan-kutai/).

yang sekaligus disebut pendiri wangsa. Menilik gejala-gejala tersebut, Vlekke (2016: 19) berkesimpulan bahwa terjadi asimilasi gradual budaya Hindu dan praktik-praktik kuno dari suatu kerajaan yang telah ada sebelumnya.

Berpusat di Jawa Barat, pada abad V berdiri Kerajaan Tarumanagara. Rajanya yang terkemuka bernama Purnawarman, seorang penganut Hindu. Kebesaran Purnawarman, yang dianggap perwujudan Dewa Wisnu, digambarkan dalam Prasasti Ciaruteun yang antara lain menceritakan inisiatif raja dalam pembangunan kanal. Kemajuan peradaban semacam itu mengindikasikan bahwa kontak budaya

dengan India tidak berlangsung satu arah.

Dalam pengaruh tradisi Hindu, kita juga mengenal Kerajaan Mataram Kuno yang didirikan pada abad VIII di Jawa Tengah. Raja pertamanya adalah Sanjaya, yang setelah meninggal digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian menjadi penganut Buddha. Raja Sanjaya meninggalkan antara lain Prasasti Canggal bertarikh 732, ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta, menceritakan asal usul kepemimpinannya.

Selain itu, kita dapat menyebut Majapahit sebagai kerajaan Hindu terakhir di Nusantara. Terletak di Jawa Timur, Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada 1293, setelah dia menggulingkan Raja Kediri Jayakatwang dan mengusir pasukan Mongol utusan Kublai Khan. Mencapai puncaknya di era Hayam Wuruk. Dalam kakawin *Nagarakretagama*, dikisahkan wilayah Majapahit terbentang dari Jawa, Kalimantan, Sumatra, hingga Semenanjung Malaya. Pengaruh Hindu tampak antara lain pada pembangunan candi-candi sebagai bangunan suci maupun ritual-ritual yang berpadu dengan keyakinan lokal.

Meluasnya pengaruh Hindu tidak lepas dari kemungkinan bahwa Hinduisme dijadikan sebagai landasan legitimasi kekuasaan raja, antara lain lewat kehadiran para Brahmana. Kalangan elite pun menyerap pengaruh Hindu sebagai bagian dari sarana meningkatkan gengsi sosial.

Kontak dengan India bukan hanya membuat orang-orang menyadari pencapaian budaya Hindu, mereka dianggap membawa serta bentuk-bentuk peradaban yang lebih tinggi ke Nusantara. “Kemungkinan ini sangat jelas tercermin pada penyerapan kata-kata Sanskerta ke dalam Bahasa Jawa

Kuno” (Simbolon 2007:10).

Meskipun penyebaran peradaban Hindu merupakan suatu proses yang sangat lambat, asimilasi tradisi Hindu-India dan tradisi lokal di Nusantara menghasilkan bekas mendalam hingga saat ini. Bukan hanya bahwa sekitar 3% penduduk Indonesia kini memeluk



Candi Prambanan, warisan kerajaan Mataram Hindu dibangun oleh Rakai Pikatan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dengan ketinggian mencapai 47 meter.

Sumber: KHOMAINI.

Hindu dan sebagian besar dari mereka berada di Bali, tetapi juga bahwa berbagai praktik sosial yang diwarisi generasi sekarang berasal dari masa-masa awal sejarah Nusantara tersebut.

### Stimulus Peradaban Buddha

Ajaran Buddha masuk ke Indonesia sejak abad I, terutama melalui hubungan perniagaan lewat jalur laut yang juga diikuti hubungan politik. Selain itu, para sarjana dari Tiongkok maupun India (golongan Brahmana) berdatangan untuk memperkenalkan dan melakukan kajian tentang Buddhisme. Sekitar tahun 420, Gunawarman seorang pangeran dari Kashmir mengajarkan Buddhisme, yang selanjutnya menjadi agama kalangan elite di Nusantara. Tidak kurang, arus balik para pelajar dari Nusantara yang mengkaji Buddhisme di India berkontribusi pada pesatnya perkembangan agama ini.

Sejak paruh kedua abad VII, beberapa laporan dari Tiongkok mengabarkan perkembangan Buddha di Nusantara. Selama 664-667, Hoewining, seorang pendeta Buddha asal Tiongkok, tinggal di Kalingga, Jawa Tengah. Bersama seorang pendeta setempat bernama Jnanabhadra, ia menerjemahkan naskah-naskah Buddhisme Hinayana. Kerajaan Kalingga sendiri didirikan sekitar abad VI, dan nama Kalingga dipercaya berasal dari Kerajaan Kaling dalam sejarah India Kuno.

Laporan lain menyebut Kerajaan

Sriwijaya (didirikan pada abad VII) di Sumatra Selatan sebagai salah satu pusat kajian Buddha Mahayana, antara lain lewat penerjemahan naskah-naskah keagamaan yang melibatkan I-Tsing seorang pendeta dari China. Vlekke (2016: 37) menulis bahwa kesetiaan pada Buddhisme Mahayana memungkinkan Sriwijaya memiliki hubungan kuat dengan dunia luar, antara lain dengan China dan India. Selain itu, cerita dari para saudagar maupun referensi para ahli geografi dari Arab dan Persia menunjukkan luasnya hubungan perniagaan Sriwijaya pada abad X.

Salah satu bukti tertua tentang Kerajaan Sriwijaya (dalam Bahasa Sanskerta berarti “kemenangan yang gemilang”) adalah prasasti Kedukan Bukit di Palembang bertarikh 682. Peninggalan tertulis Kerajaan Sriwijaya menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Melayu Tua, berbeda dibandingkan peninggalan serupa



Relief-relief yang menghiasi dinding Candi Borobudur menggambarkan cerita terkait tradisi Buddha, yang sumber-sumber literernya berasal dari India.

Sumber: KHOMAINI.



Patung Buddha, di tahapan Arupadhatu (ketiga) Candi Borobudur.

Sumber: KHOMAINI.

di Jawa yang menggunakan Bahasa Sanskerta. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya India meluas hingga kalangan non-elite di Sumatra. Wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi hampir seluruh Sumatra, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Sriwijaya dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara.

Salah satu penguasa di wilayah Nusantara yang memiliki hubungan baik dengan Sriwijaya adalah Wangsa Syailendra dari Kerajaan Mataram Buddha di Jawa Tengah. Pada abad VIII, penguasa Jawa ini telah memiliki hubungan dengan pusat pengetahuan Benggala, yang terkenal dengan kajian Buddhisme Mahayana, juga dengan raja-raja Kamboja.

Salah satu peninggalan terpenting Syailendra adalah Candi Borobudur, yang selesai dibangun sekitar 820. Borobudur merupakan candi Buddha

terbesar dunia, dengan luas dasar 123 m x 123 m dan tinggi lebih dari 35 m. Tidak kurang dari 400 patung dan 1.400 pahatan relief menghiasi dinding-dinding teras. Setiap set relief menggambarkan cerita terkait tradisi Buddha, yang sumber-sumber literer untuk ini datang dari India.

Banyak penguasa di Nusantara menganut Buddha tanpa menjadikannya agama resmi dan tanpa menyingkirkan keyakinan lain. Adalah suatu kebiasaan umum, dalam tradisi Nusantara, untuk menerima kultus baru tanpa menolak yang lama (Vlekke 2016: 25).

### Stimulus Peradaban Islam

Meskipun terdapat perdebatan tentang kapan Islam masuk ke Nusantara, cukup pasti bahwa sejak masa Khalifah Utsman (644-656) telah terjadi kontak antara Nusantara dan dunia Islam. Orang-orang Islam, misalnya, telah memainkan peran penting dalam perdagangan di Sumatra di bawah Kerajaan Sriwijaya, yang didirikan pada akhir abad VII. Sedangkan petunjuk pertama tentang keberadaan kerajaan Islam Nusantara dapat ditelusuri dari bagian utara Sumatra dengan ditemukannya nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bin al-Basir yang wafat pada 1211. Serangkaian nisan yang ditemukan di Jawa Timur juga mengindikasikan bahwa sebagian elite Jawa telah memeluk Islam pada masa kejayaan Majapahit sekitar abad XIII.

Pengaruh awal Islam masuk ke Nusantara selama beberapa abad antara lain dari India, Tiongkok, Arabia, Mesir, dan Persia. Ricklefs (2005: 27) menggambarkan dua proses utama kemungkinan persebaran awal Islam di Nusantara. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan Islam dan kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia (Arab, India, Tionghoa, dan lainnya) penganut Islam menetap di suatu wilayah dan mengikuti gaya hidup setempat. Sesudahnya, Islam juga didakwahkan oleh ulama terutama kalangan Melayu dan Jawa serta penaklukan oleh para penguasa Muslim.

Di tengah meningkatnya hubungan politik dan perdagangan di kawasan Nusantara, para pedagang Muslim

dan sekelompok sufi asing telah memperkenalkan Islam hingga kemudian menyebar luas. *Hikayat Raja-raja Pasai*, yang menceritakan peristiwa-peristiwa bertarikh 1250-1350, meriwayatkan Raja Meurah Siloo yang memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Malik al-Shalih. Sekitar awal abad XV, Malaka menjadi pusat perdagangan sekaligus penopang persebaran Islam. Sedangkan awal abad XVI, berdiri Kerajaan Aceh yang kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di kawasan barat Nusantara. Islam juga berkembang di pulau-pulau utama, seperti Kalimantan dan Sulawesi, juga kepulauan penghasil rempah di Maluku.

Di Jawa Tengah, Demak didirikan oleh Raden Patah sebagai kekuatan baru pada 1500 dari puing-puing kebesaran Majapahit. Di bawah Sultan Trenggana, masa kejayaan Kerajaan Demak ditandai oleh misi-misi penyebaran Islam dan pelayaran untuk perdagangan hingga wilayah timur. Masjid Demak, yang telah didirikan sejak era Raden Patah, menjadi lokasi penting kajian Islam yang melibatkan para wali sebagai pemuka agama.

Asimilasi budaya di Jawa terjadi sebagai hasil pertemuan wilayah ini dengan Islam dan tradisi-tradisi lain yang lebih tua. Konversi ke dalam Islam jarang diikuti suatu perubahan radikal. Sejarah konflik antara daerah pesisir dan daerah pedalaman Jawa bukanlah hasil pertentangan antara agama dan budaya, melainkan lebih merupakan



Lonceng Cakra Donya di Museum Aceh memiliki hiasan serta tulisan Arab dan China. Lonceng ini merupakan hadiah yang dibawa Laksamana Cheng Ho dari Kaisar Yongle di Tiongkok untuk Kerajaan Samudera Pasai.

Sumber: Istimewa.



pertentangan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Proses asimilasi dan akomodasi terus berlangsung setelah mayoritas penduduk Jawa memeluk Islam; Islamisasi adalah suatu proses yang berlangsung terus hingga saat ini (Ricklefs 2005: 34).

Setelah munculnya gerakan-gerakan pembaruan pada abad XIX dan XX, proses asimilasi tidak pupus. Gerakan-gerakan Islam bahkan menjadi semakin beragam, dan turut mewarnai pembentukan Indonesia hingga saat ini.

### **Stimulus Peradaban Barat**

Meskipun pengaruh Barat terhadap dunia kini secara umum signifikan, namun pengaruh mereka—terutama orang-orang Belanda—terhadap kehidupan sosial di Nusantara pada awalnya sangat terbatas. Pertama, bahwa Eropa, dibandingkan terutama Turki Ottoman, bukanlah kawasan paling maju di dunia pada awal abad XV, ketika mereka mulai menjelajah kawasan Timur. Namun, keunggulan teknologi pelayaran dan kemiliteran memungkinkan mereka, mulanya Portugal, menjelajah dan kemudian bahkan mengubah secara mendasar organisasi sistem perdagangan Asia (Ricklefs 2005: 65). Kedua, dalam kasus Nusantara, Belanda mulanya tidak berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial selain perdagangan. Pembatasan kebudayaan Belanda untuk kalangan mereka sendiri telah memperlambat akulturasi dan menghambat pula perkembangan

Nusantara (Lombard 1996a: 97). Gejala semacam itu mulai berubah pada awal abad XIX, dan pengaruh Barat menjadi kian kuat setelahnya.

Terdapat tiga kelompok masyarakat yang memiliki peran terbesar dalam proses meluasnya pengaruh Barat dalam kehidupan masyarakat Nusantara: komunitas Kristen, para priyayi, serta tentara dan akademisi (Lombard 1996a).

Terutama di Kepulauan Maluku dan pulau-pulau tertentu di Nusa Tenggara, Portugal mendirikan gereja-gereja pertama setelah kedatangan mereka pada abad XVI. Lombard mencatat bahwa lama sekali sesudahnya baru di Batavia terdapat seorang pendeta. Kemudian sejak 1753 terdapat seorang pendeta di Semarang, dan sejak 1785 seorang pendeta lainnya bertugas di Surabaya. Namun, baru pada paruh pertama abad XIX berkembang misi Protestan dan misi Katolik benar-benar aktif menjelang akhir abad tersebut. Pada dasawarsa pertama abad XX, Kristianitas telah diterima meluas di Tana Toraja, bagian utara Tanah Batak, dan bagian tengah Kalimantan (Lombard 1996a: 98). Meskipun begitu, bukan berarti pembaratan berlangsung segera dan utuh; unsur-unsur lokal di sini bercampur dengan keyakinan Kristen dan sebagian budaya lain dari luar dalam jangka lama.

Kelompok sosial lain yang sangat terpengaruh budaya Barat adalah para priyayi. Terutama pasca-Perang Jawa (1825-1830), pemerintah

kolonial Batavia mulai merangkul kalangan bangsawan. *Cultuurstelsel* atau tanam paksa merupakan pintu



Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa di Nusa Dua, Bali, mengadopsi unsur-unsur lokal seperti nampak pada bangunan luar gereja.

Sumber: KHOMAINI.

masuk akomodasi para priyayi sebagai pembantu pengelolaan pemerintahan kolonial. Hingga batas tertentu, para priyayi bahkan diperkenankan untuk ikut serta dalam kebudayaan para penakluk mereka (Lombard 1996a: 103). Penguatan administrasi pemerintahan negeri jajahan telah meningkatkan integrasi mereka pada suatu struktur hirarki birokratis sebagai pejabat pemerintah (*pangreh praja*). Moral para priyayi yang terbentuk dari konformisme Jawa dan disiplin “Calvinis” tetap menonjol dan berpengaruh setelah kemerdekaan Indonesia (Lombard 1996a: 103).

Pasca-kemerdekaan, perombakan struktur golongan elite berlangsung seiring terbentuknya dua lembaga baru

yang selanjutnya berperan penting; angkatan bersenjata dan universitas. Pembentukan angkatan bersenjata modern banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Barat, demikian pula pengelolaan pendidikan di universitas-universitas. Kedua lembaga tersebut merupakan wadah-wadah utama tempat proses pembaratan cenderung berpusat (Lombard 1996a: 118).

## B. BUDAYA GOTONG ROYONG

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus yang perlu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dari interaksinya dengan orang lain, manusia hidup dalam kelompok-kelompok sosial dan merasakan hadirnya berbagai manfaat dari relasi dan kerja samanya dengan sesama. Kerja sama antarmanusia ini disebut dengan gotong royong.



Warga Sindangbarang bersama-sama menggotong hasil bumi untuk disajikan dalam upacara adat Seren Taun.

Sumber: KHOMAINI.



Masyarakat bersama-sama memanggul aneka hasil bumi dalam acara Seren Taun di Sindangbarang.

Sumber: KHOMAINI.

### Pengertian Gotong Royong

Istilah “gotong royong” yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Jawa. Kata “gotong” dapat dipadankan dengan kata “pikul” atau “angkat.” Kata “royong” dapat dipadankan dengan “bersama-sama.” Jadi, gotong royong secara sederhana berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama atau juga diartikan sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Misalnya, menyapu jalan, membersihkan lingkungan, atau mendorong mobil mogok bersama-sama, dan sebagainya.

Secara luas, gotong royong dapat

dimaknai sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap objek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif.

Secara konseptual, gotong royong dapat diartikan sebagai suatu model kerja sama yang disepakati bersama. Koentjaraningrat membagi dua jenis gotong royong sebagaimana dia amati dalam masyarakat di Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, yang dibedakan antara gotong royong atas inisiatif warga dengan gotong royong yang dipaksakan. Misalnya, membangun jalan dan mendirikan balai rakyat untuk wadah pertemuan warga (Koentjaraningrat 1987).

Konsep gotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas,

masyarakat negara serta masyarakat lintas bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut juga dikarenakan di dalam gotong royong terkandung makna tindakan bersama, mengelola secara sendiri, tujuan bersama, dan kedaulatan.

Dalam perspektif sosiokultural, nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa pamrih untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama atau individu tertentu. Misalnya, petani secara bersama-sama membersihkan saluran irigasi yang menuju ke sawahnya, masyarakat bergotong royong membangun rumah warga yang terkena angin puting beliung, dan sebagainya. Bahkan dalam sejarah perkembangan masyarakat, kegiatan bercocok tanam seperti mengolah tanah hingga memetik hasil (panen) dilakukan secara gotong royong bergiliran pada masing-masing pemilik sawah.

Budaya gotong royong merupakan cerminan perilaku yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Bilamana dilakukan kajian di seluruh wilayah Indonesia, akan ditemukan praktik gotong royong tersebut dengan berbagai macam istilah dan bentuknya, baik sebagai nilai maupun sebagai perilaku.

Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, sebagaimana pengertian yang dikemukakan sebelumnya, namun

juga berperan sebagai nilai-nilai moral. Artinya, gotong royong selalu menjadi acuan perilaku, pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbagai macam wujudnya.

### **Implementasi Budaya Gotong Royong**

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, gotong royong menempati posisi penting karena dianggap mampu menciptakan harmoni dan memperkuat jalinan persaudaraan antarwarga. Dari waktu ke waktu, gotong royong telah menjadi kebiasaan atau budaya yang terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Mari kita tengok sejenak sejarah kelahiran bangsa Indonesia di mana budaya gotong royong berperan sebagai pengikat setiap elemen bangsa.

Menengok berbagai catatan sejarah perjalanan bangsa, kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih rakyat merupakan buah dari kerja sama apik seluruh komponen bangsa, bukan kepentingan golongan apalagi perseorangan. Dengan kata lain, kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 merupakan upaya bersama seluruh elemen bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama ketimbang kelompok, golongan atau individual. Upaya bersama itu kemudian kita sebut sebagai gotong royong yang merupakan wujud nyata dari nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki segenap warga bangsa dalam perjuangan mereka.

Sebelum era Kebangkitan Nasional, perjuangan melawan penjajah masih tersekat pada suku dan golongan masing-masing, belum terpusat dikarenakan belum ada ideologi pemersatu. Dengan perkataan lain, perjuangan kala itu masih bersifat kedaerahan, bergantung kepada pemimpin, belum terorganisasi dengan tujuan perjuangan yang jelas. Selanjutnya, ketika era Kebangkitan Nasional tiba, perlawanan terhadap musuh mulai dilakukan secara terorganisasi. Pendirian organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 merupakan titik mula munculnya pergerakan nasional di Indonesia serta lahirnya kesadaran bersama untuk memperjuangkan nasib dan masa depan bangsa. Sejak itu, gotong royong menjadi nafas dari setiap langkah dan upaya setiap warga bangsa demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Dalam momen-momen penting perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebagaimana ditulis Yudi Latif dalam karyanya *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan* (2014), jiwa gotong royong telah menjelma sebagai ruh dari setiap rangkaian rencana dan tindakan para pendiri bangsa. Proses penyusunan Teks Proklamasi, misalnya, ditulis langsung oleh Bung Karno, namun didiktekan oleh Bung Hatta untuk selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik, wartawan asal Yogyakarta (Latif 2014: 304)

Semangat gotong royong pun tampak dalam upaya para pemuda menyiarkan secara langsung

pembacaan Teks Proklamasi melalui pemancar luar negeri di Studio Djakarta Hosyo Kioko. Meski tidak berhasil, para pemuda tak patah semangat. Adam Malik lantas berangkat ke Kantor Berita *Domei* untuk mencari kemungkinan pembacaan Teks Proklamasi dapat disiarkan secara langsung. Hasilnya, Kemerdekaan Indonesia menjadi berita resmi Kantor Berita *Domei* ke semua cabang di Indonesia dan luar negeri. Tak ketinggalan, para seniman Jakarta yang bermarkas di Pasar Senen membuat poster dan tulisan-tulisan (mural) di berbagai tempat, termasuk dinding kota dan kereta api, untuk menyebarkan berita Proklamasi.

Tidak berhenti di situ, para aktivis pemuda masa itu yang kerap berkumpul di Jalan Menteng 31 bergotong royong menyebarkan berita gembira berupa stensilan Teks Proklamasi itu ke pelosok negeri hingga dunia. Di antara para aktivis itu, misalnya, ada anggota Barisan Pemuda Gerindo, M. Zaelani, yang siap dikirim ke Sumatra dan juga Masri yang berangkat ke Kalimantan, serta sejumlah pemuda lain yang dikirim ke Sulawesi dan Jawa. Misi membawa berita gembira itu tentu saja harus melalui perjalanan yang kurang nyaman. Namun, semangat gotong royong yang telah merasuki jiwa mereka telah mengalahkan semuanya.

Para tokoh bangsa lintas etnis dan iman, dari kalangan sipil dan militer, pun ikut terus memupuk semangat gotong royong sebagaimana

ditunjukkan selama era revolusi kemerdekaan di Yogyakarta. Semangat kebersamaan dengan mengesampingkan perbedaan agama, ras, suku, bahasa menjadikan Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia di tanah Jawa. Para tokoh agama dengan latar pandangan berbeda seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo (Muhammadiyah), K.H. Wahid Hasjim (Nahdlatul Ulama), Mohammad Natsir (Persatuan Islam), Sayyid Shah Muhammad Al-Jaeni (Ahmadiyah), I.J. Kasimo (Katolik) begitu apik membangun pergaulan dan komunikasi untuk Indonesia yang lebih besar (Latif 2014: 305-307).

Perbedaan pandangan dan keyakinan agama serta pendapat politik tidak membuat mereka saling menjatuhkan, apalagi saling melenyapkan. Perbedaan telah menjadikan mereka lebih kaya dan membuat keyakinan mereka menjadi semakin kuat. Perbedaan tidak menjadi alasan bagi mereka untuk saling mencaci, saling membenci, tidak menghormati dan tidak bergaul sebagai sesama ciptaan Tuhan. Tengok saja pengakuan Mohammad Natsir selama tinggal di Yogyakarta ketika era revolusi kemerdekaan. Polemik dan perbedaannya dengan Sukarno menyangkut Dasar Negara telah diketahui publik luas. Namun, perbedaan pandangan yang sangat tajam antara tahun 1930-an itu dia lupakan ketika panggilan revolusi harus diutamakan. Bahkan Natsir mengakui,

dia adalah salah satu menteri yang memiliki hubungan paling dekat dengan Sukarno selama di Yogyakarta (Latif 2014: 310)

Selain itu, sistem pertahanan dan bela negara juga didasarkan pada semangat gotong royong segenap komponen bangsa melalui kemanunggalan antara rakyat dan tentara, yang dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Dengan peralatan terbatas dan pasukan yang kurang terlatih dan teratur, sistem ini dilahirkan untuk menghadang serangan musuh. Sejarah menunjukkan, berkat semangat gotong royong mengembangkan Sishankamrata, Belanda yang bermodalkan senjata canggih dan tentara yang terlatih dibuat kocak-kacir sehingga memaksa pemerintah Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

### **Gotong Royong dalam Praktik**

Sukarno menggunakan istilah gotong royong untuk menegakkan etos persatuan pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada sebuah pidato tertanggal 1 Juni 1945, Sukarno menegaskan bahwa gotong royong merupakan intipati Pancasila setelah diperas sedemikian rupa. Mengutip langsung pidato Sukarno, dia mengatakan,



Gotong royong merupakan budaya yang berlangsung sejak dulu di bumi Nusantara.

Sumber: Ida Bagus Putra Adnyana, Bali: *Ancient Rites in the Digital Age* (Indonesia: BAB Publishing, 2016), h. 21.

Sebagaimana tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang

tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong!

Gotong royong merupakan paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, kata Sukarno,

Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. *Holopis-kuntul-baris* buat kepentingan bersama.

Sebagai nilai budaya yang penting, sebenarnya gotong royong sangat bagus sejauh diberi makna yang luas dan dihayati dengan semangat persatuan yang benar. Pada 1930-an, Muhammad Hatta—sebagaimana tertuang dalam tulisannya di harian *Daulat Rakjat*, No. 75, tanggal 10 Oktober 1933—menggunakan istilah kolektivisme untuk merujuk pada konsep gotong royong yang menurutnya mengandung arti serupa. Tanda-tanda kolektivisme, kata Hatta, tampak pertama kali pada sifat “tolong-menolong” yang menjiwai setiap individu dalam masyarakat Nusantara. Kata Hatta, “Sifat ‘tolong-menolong’ itu menjadi satu tiang daripada pergaulan hidup Indonesia. Dan sifat itu berpengaruh pula atas caranya orang-orang di desa mengurus beberapa hal yang bersangkutan dengan kebutuhan mereka. Keputusan dengan mufakat!” Lebih jauh, istilah ini dapat dipadankan dengan solidaritas, suatu

prinsip yang penting dalam mendirikan negara di samping prinsip subsidiaritas.

Dalam pengertian yang lebih luas, kolektivisme adalah nilai di mana masyarakat tergabung dalam sebuah ikatan kohesif. Di dalam ikatan tersebut, setiap individu harus menjaga loyalitas terhadap kelompoknya. Dalam pengertian demikian, kolektivisme berarti perhatian individu terhadap masyarakat di mana ia berada (Latif 2011).

Kolektivisme atau gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Praktik itu sangat mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kerap kali bersama-sama mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu, apa pun itu. Seorang kolektivis cenderung menjaga martabat dan perasaan antarsesama. Mengkritik dan mempermalukan seseorang di hadapan orang lain merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Menghormati, menghargai, dan berperilaku sopan santun merupakan nilai-nilai yang terpenting dalam kolektivisme.

Perlu ditekankan di sini, penghormatan terhadap eksistensi perseorangan dan hak asasinya tidak berarti harus mengarah pada individualisme. Individualisme memandang bahwa manusia secara perseorangan merupakan unit dasar dari seluruh pengalaman manusia. Postulat dasar dari individualisme adalah otonomi independen dari setiap pribadi. Ungkapan yang sangat terkenal dari individualisme menyatakan:

“Kamu datang ke dunia seorang diri dan meninggalkan dunia seorang diri.” Meski kenyataannya tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia secara sendirian. Selalu ada ibu dan budaya komunitas yang menyertainya, bahkan mengantarnya hingga ke “tempat peristirahatan yang terakhir” (Gilbert 2013: 34).

Apa yang menjadi karakteristik dari individualisme adalah keyakinan implisit bahwa relasi sosial bukanlah pembentuk perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental. Dengan kata lain, perseorangan tak dipandang sebagai produk relasi-relasi sosial. Relasi sosial adalah sesuatu yang terjadi pada individu ketimbang sesuatu yang mendefinisikan identitas dan mengoordinasikan eksistensi individu. Individu tidaklah dibentuk dan diubah secara fundamental oleh relasi sosial. Karena itu, tetap sebagai pribadi yang otonom-independen.

Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, bergantung pada bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan



potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Tanpa kehadiran yang lain, manusia tidak akan pernah menjadi manusia sepenuhnya. Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, selain menjadi manusia yang baik, manusia harus membentuk kolektivitas yang baik.

Berikutnya, ketika Orde Baru memerintah, makna gotong royong bergeser dari pengertian sebelumnya dan lebih diasosiasikan kepada istilah kekeluargaan. Gagasan ini digunakan untuk menyukseskan berbagai agenda pembangunan. Pada era ini, kekeluargaan diangkat ke permukaan dan dijadikan asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah ini dianggap keliru karena ternyata menyuburkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Gagasan ini kemudian merambat pada penguasaan negara oleh segelintir kelompok dan golongan, termasuk keluarga. Dalam praktik seperti ini, pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem negara yang sentralistik dan otoriter.

Dalam negara yang berteraskan kedaulatan keluarga, rakyat dan orang yang berada di luar *inner circle* dianggap hanya sebagai penumpang dan dijaga agar tidak menjadi orang dalam dengan cara meminggirkan peran, kedudukan, dan haknya untuk bersuara. Dengan kata

lain, mereka sengaja dibuat rentan terhadap pemerasan, penindasan, dan perlakuan sewenang-wenang lain oleh negara atau birokrasi negara.

Dari berbagai contoh dan paparan di atas, tidaklah berlebihan jika mengatakan semangat gotong royong menunjukkan kekuatan dan keampuannya sebagai karakter bangsa dan memiliki pengaruh yang begitu dahsyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita terus bekerja bersama-sama mewujudkan satu kebaikan agar bisa dimanfaatkan dan dinikmati bukan oleh diri sendiri, melainkan bersama-sama.

Tak keliru pula jika Sukarno menyebut gotong royong sebagai inti sari Pancasila, ruh pandangan hidup bangsa Indonesia. Seperti dia katakan,

Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu *karyo*, satu *gawe*. Marilah kita menyelesaikan *karyo*, *gawe*, pekerjaan, amal ini, bersama-sama.

### C. INTELIGENSIA INDONESIA

Inteligensia Indonesia membentuk fondasi kebangsaan Indonesia di mana toleransi menjadi tulang punggungnya. Inteligensia memainkan peran penting dalam proses kebangsaan Indonesia terutama dalam pembentukan tradisi “bertukar pikiran” dan memahami dilema-dilema dalam hidup bermasyarakat.

Peranan inteligensia Indonesia

dalam membangun keindonesiaan setidaknya dibahas dalam 2 karya penting. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20* karya Yudi Latif (2003) memberikan gambaran pembentukan lapisan intelegensia di Indonesia. Meskipun karya ini secara khusus dimaksudkan untuk membahas intelegensia muslim, tetapi dibahas pula persoalan intelegensia Indonesia secara umum beserta kelahiran dan liku-liku berbagai jenis gerakannya.

Berikutnya adalah karya penting *Menjadi Indonesia* tulisan Parakriti T. Simbolon (1995). Di sini dibahas secara pendek mengenai beberapa aspek penting dari peran intelegensia ini dalam membentuk Indonesia.

Secara umum, peranan intelegensia di Indonesia tidaklah unik karena merupakan gejala umum yang terdapat dalam gerakan-gerakan kebangsaan dan peradaban di dunia sepanjang abad XVIII-XIX. Dunia melihat peran yang amat kuat dari gerakan parlementer di Eropa yang digalang oleh kalangan intelegensia dan akar rumput.

Mohammad Hatta, salah satu pendiri bangsa, mengenyam pendidikan di Belanda dan melihat peran yang konstruktif dari parlemen. Dalam parlemen bukan hanya terjadi proses pengawasan dan perimbangan (*checks and balances*) pada kekuasaan eksekutif, tetapi juga terjadi proses berdiskusi (*parler*) atau diskursus (*discourse*) menyangkut gagasan kebangsaan dan perbaikan taraf hidup masyarakat.

Dalam hal ini, “diskusi” adalah buah pencermatan dan pikiran. Di Indonesia, Mohammad Hatta selalu menekankan proses yang menjadi ciri penting intelegensia ini. Salah satu contoh yang bisa dirujuk tentang betapa Hatta menempatkan intelegensia di posisi sangat penting dalam hidupnya adalah ketika dia memberikan buku *Alam Pikiran Yunani* yang dituliskannya kepada istrinya Rachmi sebagai mas kawin.

Gambaran ini merupakan wujud penting dari Keindonesiaan, bahwa yang menjadi seseorang atau suatu peristiwa di dalam “Indonesia” adalah wujud “bangsawan pikiran”. Penyebutan ini untuk membedakannya dengan “bangsawan usul”, suatu pencirian kebangsaan yang didasarkan pada akar primordial. Dalam *Inteligensia Muslim dan Kuasa* (Yudi Latif 2003), hal ini juga dibahas secara mencolok. Penggambarannya sendiri juga didukung oleh generasi kontemporer, semisal Rosihan Anwar, sebagai berikut:

Dokter Abdul Rivai yang juga wartawan pada awal abad ke-20 memperkenalkan istilah “bangsawan pikiran”. Istilah ini dibedakannya dengan “bangsawan usul”. Pada edisi perdana (1902) majalah Bintang Hindia, Abdul Rivai menulis,

“Tak ada gunanya lagi membicarakan “bangsawan usul”, sebab kehadirannya



Dr. Abdul Rivai (1876-1932), seorang dokter sekaligus wartawan yang memperkenalkan istilah “bangsawan pikiran” yang membedakan dengan “bangsawan usul”.

Sumber: Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia Buku I: Akar-akar Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Kompas, 1995), h. u.

merupakan takdir. Jika nenek moyang kita keturunan bangsawan, maka kita pun disebut bangsawan, meskipun pengetahuan dan capaian kita bagaikan katak dalam tempurung. Saat ini, pengetahuan dan pencapaianlah yang menentukan kehormatan seseorang. Situasi inilah yang melahirkan “bangsawan pikiran”.... Para “bangsawan pikiran” telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, memimpin perjuangan menegakkan proklamasi kemerdekaan memperoleh pengakuan internasional atas keberadaan RI dan selanjutnya selalu ada di tengah perkembangan negeri ini (Rosihan Anwar 2007).

Pada saat yang sama inteligensia di negara dunia ketiga dibentuk oleh dilema mereka. Di sini, pikiran-pikiran Soedjatmoko dalam membangun gambaran mengenai interelasi di atas perlu dikutip. Kutipan ini menyorot

konteks Indonesia pasca-merdeka, di mana klaim “bangsa yang baru lahir” harus dikonfrontasi dengan persoalan-persoalan kekuasaan, pranata, sosial-ekonomi, dan keterbatasan sebuah kekuasaan pemerintah.

... Satu hal yang berubah dalam konteks pengalaman pasca-kemerdekaan adalah kesadaran kaum cendekia akan kekuasaan, pengaruh, batas-batasnya, serta sifat-sifatnya. Kini di antara kaum cendekia terdapat kesadaran yang lebih besar terhadap kebutuhan akan pemerintah pusat yang kuat, yang mampu mengejar tujuan pembinaan-bangsa (*nation-building*) dan pembangunan ekonomi, di hadapan rintangan-rintangan besar yang ditimbulkan oleh tradisi, kebodohan, dan keterbelakangan. Terdapat juga kesadaran yang lebih besar akan kebutuhan untuk membangun dan menumbuhkembangkan kekuatan-kekuatan tandingan di dalam masyarakat untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin inisiatif, organisasi maupun partisipasi rakyat secara sukarela. Kaum cendekia di negara berkembang menempatkan dirinya pada kedua sisi pandang di atas.... Kesulitan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang, telah membuat kaum cendekia sadar bahwa kekuasaan bukan merupakan komoditas yang netral yang



Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1945 dihadiri beragam kelompok dan golongan untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia.

Sumber: Istimewa.

dapat diterapkan pada semua persoalan dan semua pekerjaan... (Soedjatmoko 1994: 5).

Sekarang, peran untuk memahami dan menjawab dilema masyarakat ini dilakukan secara lebih luas oleh bentuk-bentuk inteligensia yang ada. Memahami adanya dilema ini tidak berarti para inteligensia hanya diam dan meratapi situasi, melainkan secara aktif membangun simpul-simpul di tingkat lokal maupun nasional sehingga komunikasi dan tindakan sosial-politik yang perlu bisa terlaksana.

#### **D. PANCASILA DAN KEINDONESIAAN**

“Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua.’ Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua.” Sukarno

tentu tidak menggantung asap saat menyampaikan hal tersebut di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Sebagai bagian dari upaya untuk menemukan dasar negara, Sukarno bersama para pendiri negara lainnya menyampaikan visi mereka tentang Indonesia Merdeka.

Indonesia sebagai suatu negara untuk semua golongan bukanlah suatu visi tanpa landasan. Bahkan sejak mimpi tentang Indonesia sebagai suatu nasion itu mulai mekar pada awal abad XX, ia telah bertolak dari kekayaan pandangan. Indonesia yang sama dibentuk pertama kali oleh para pelopor yang memiliki latar berlainan; ras dan suku, agama, juga ideologi politik mereka berbeda. Perbedaan tersebut, sedemikian rupa, memberi sumbangan luar biasa pada orientasi mereka untuk membangun suatu struktur yang melindungi keberagaman tersebut.

Pancasila, yang ditetapkan sebagai dasar negara, sesungguhnya memberi landasan kukuh bagi beroperasinya suatu negara demokrasi modern yang melindungi kebebasan sekaligus mengupayakan kesejahteraan warga negaranya. Pancasila adalah lima prinsip yang terdiri atas: 1] Ketuhanan Yang Maha Esa, 2] kemanusiaan yang adil dan beradab, 3] persatuan Indonesia, 4] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 5] keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 tidaklah berarti bahwa mimpi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia telah sepenuhnya tercapai; mimpi kemerdekaan masih terus diperjuangkan dalam kehidupan bernegara hingga kini. Bergulat dengan berbagai tantangan, Indonesia mesti meniti perjuangan yang tidak mudah untuk semakin mendekat pada perwujudan mimpi tersebut. Dinamika pergulatan ini dapat digambarkan, sebagai berikut.

### **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Meskipun ide tentang negara berbasis keyakinan agama ditolak dalam perdebatan di antara para pendiri negara, suatu kesepahaman kemudian dicapai dan melahirkan Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan itu, Indonesia tidak dilandaskan



Gereja Hati Kudus Yesus di Ganjuran, Yogyakarta (selesai dibangun pada 1924) memiliki arsitektur unik bergaya Jawa.

Sumber: [www.klikhotel.com](http://www.klikhotel.com).

pada keyakinan agama tertentu, melainkan menghormati dan melindungi kebebasan warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Menilik sejarah Indonesia, peradaban-peradaban besar dengan muatan keyakinan agama yang berlainan telah memberi pengaruh yang tidak kecil pada berkembangnya budaya Nusantara. Dialiri pengaruh yang begitu kaya, Indonesia tidaklah tumbuh dalam suatu monokultur. Perbedaan tersebut menghadirkan suatu khazanah pandangan dan keyakinan, yang mestinya dapat semakin kaya oleh dialog di antara mereka.

Semangat dialog tersebut secara fisik tampak pada bentuk bangunan-bangunan tempat ibadah yang menerima secara asimilasionis pengaruh eksternal. Kemampuan untuk mengadopsi pengaruh dapat disebut sebagai suatu modal bagi diterimanya agama-agama dan bersenyawanya rumah-rumah ibadah dengan tradisi yang lebih dulu hidup dalam masyarakat.

Kita dapat mengambil contoh Masjid Agung Demak, yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Selesai dibangun pada 1479, antara lain berkat prakarsa Raden Patah dan Sunan Kalijaga, masjid ini menggabungkan gaya arsitektural Jawa-Melayu. Atapnya bersusun tiga, berbentuk segitiga sama kaki, serupa karakter bangunan pura tempat pemujaan bagi umat Hindu. Masjid ini juga memiliki nilai historis

sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa.

Demikian pula Gereja Hati Kudus Yesus di Ganjuran, Yogyakarta yang selesai dibangun pada 1924 atas prakarsa keluarga Schmutzer dari Belanda. Selain altar gereja, terdapat dua relief yang dibangun dengan corak Jawa. Relief Hati Kudus Yesus digambarkan sebagai raja Jawa yang bertakhta di singgasana, sedangkan relief Bunda Maria digambarkan sebagai ratu Jawa yang sedang menggendong Yesus kecil.

Lebih dari bangunan fisik, semangat dialog mestinya juga mewujudkan dalam kehidupan bersama antarumat beragama. Sukarno mengandaikan bahwa rakyat Indonesia dapat bertuhan secara berkebudayaan, beragama dalam keadaban. Dalam kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing, para pemeluk agama hendaknya saling menghormati dan bukan saling



Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Mohamad Hatta (1949) tiba di Amsterdam untuk merundingkan penyerahan kedaulatan.

Sumber: [www.dw.com](http://www.dw.com).

membenci. Dalam ketundukan untuk mengagungkan Tuhan, manusia-manusia beragama ini menempatkan sesamanya sebagai yang harus diterima.

Para pendiri negara sendiri mempraktikkan secara langsung konsep Ketuhanan yang Berkebudayaan tersebut dalam merumuskan sila pertama Pancasila. Sementara “golongan Islam” berpandangan bahwa negara tidak mungkin dipisahkan dari agama, “golongan nasionalis” melihat bahwa pendasaran kehidupan bernegara pada syarat Islam dapat berdampak pada persatuan nasional. Suatu kompromi tercipta manakala mereka bersama-sama memahami bahwa negara nasional yang bersatu tidaklah harus *areligious*. Kesepahaman yang tercapai lewat rumusan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan suatu jalan tengah antara konsep penyatuan dan konsep pemisahan antara negara dan agama. Orang Indonesia dapat beragama sekaligus bernegara secara beradab.

### **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Berabad-abad terbelenggu imperialisme, Indonesia menyadari bahwa prinsip kemanusiaan mestilah melandasi bagaimana negara dijalankan. Dari teks “Indonesia Menggugat”, pembelaan Sukarno di hadapan pengadilan kolonial Bandung 1930, kita paham bahwa penjajahan dan penundukan telah menghasilkan

penderitaan rakyat, yang hendak dilawan lewat pergerakan nasional berbasis kemanusiaan. Dari teks “Indonesia Merdeka,” pembelaan Hatta di hadapan pengadilan Den Haag pada 1928, kita mengerti bahwa pemenuhan hak-hak dasar adalah bagian dari perjuangan politik Indonesia merdeka.

Seperti yang dituturkan oleh Mahatma Gandhi, kebangsaan kita pun, sudah semestinya, adalah kemanusiaan. Pada situasi setara, setiap manusia adalah makhluk yang padanya lekat hak berikut kebebasan yang harus dihormati dan dilindungi. Bukan saja manusia yang satu berkewajiban menghargai manusia lainnya dan memperlakukan yang lain secara adil; melainkan bahwa negara dilimpahi tugas untuk memberi perlindungan terhadap segenap hak asasi manusia.

Kendati demikian, pelanggaran hak asasi manusia kerap dilakukan oleh kekuasaan negara atas nama pembaruan atau pemeliharaan tatanan. Pada masa 1950-an, pemenjaraan lawan politik, penutupan surat kabar, dan pelarangan organisasi politik dilakukan untuk meredam oposisi. Lebih daripada itu, pendekatan militer dalam memberangus pemberontakan masa itu juga banyak diwarnai pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, pergantian kekuasaan dari Sukarno ke tangan Soeharto diikuti oleh pergolakan paling berdarah dalam sejarah Indonesia sejak 1945.

Selama masa Soeharto, represi berlangsung secara sistematis, dengan

skala lebih brutal dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya membatasi aktivitas politik, rezim pembangunan ini juga melarang ekspresi budaya dan keyakinan yang dipandang berlawanan dengan pandangan dominan. Jalan menuju jatuhnya kekuasaan Soeharto dibuka oleh kerusuhan-kerusuhan, yang sebagian di antaranya berlanjut menjadi konflik berskala luas, yang terutama berakar dari buruknya kondisi demokrasi sosial. Setelah sejumlah penculikan dan penembakan mahasiswa, kerusuhan melanda Jakarta pada Mei 1998 yang kemudian disusul pernyataan berhenti Soeharto sebagai Presiden Indonesia.

Keadaban sosial kembali jatuh pada titik nadir selama masa transisi pasca-Soeharto manakala kerusuhan dan konflik masih berlanjut di sejumlah tempat, seperti di Maluku dan Kalimantan. Di tengah lemahnya kemampuan negara untuk menegakkan tertib sosial, ledakan partisipasi sosial kerap bermuara pada konflik antarkelompok. Di tengah buruknya kondisi ekonomi pasca-krisis, ketimpangan sosial menjadi bara yang menyalakan kebencian terhadap yang dipandang berbeda.

Kini, negara dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keberlangsungan tatanan sosial, tanpa menggerus kebebasan asasi. Selain pemenuhan hak-hak sipil, negara juga mesti memberi prioritas pada upaya perwujudan keadilan sosial sehingga demokrasi politik dan demokrasi

ekonomi dapat beriringan. Selanjutnya, keadaban publik akan terus-menerus diuji lewat gesekan kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berlain dalam masyarakat. Suntikan gagasan Bhinneka Tunggal Ika dalam demokrasi Indonesia berpeluang membuat sistem sosial kita mampu menghadirkan stabilitas tanpa harus mengorbankan kemajemukan.

### **Persatuan Indonesia**

Sejak pergerakan nasional mulai bersemi pada awal abad XX, isu persatuan Indonesia menjadi perhatian khalayak. Bukan perkara mudah untuk menyatukan wilayah yang begitu luas dengan masyarakat yang begitu beragam, berikut afiliasi primordial mereka yang begitu kuat. Faktanya, wilayah ini mulai menyatu secara administratif di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda setelah perlawanan bersenjata dalam Perang Aceh berakhir pada 1904. Dibangun di atas wilayah bekas Hindia Belanda, Indonesia dipersatukan antara lain lewat perasaan senasib sepenanggungan sebagai jajahan Belanda.

Zaman baru penjajahan pada permulaan abad XX ditandai oleh Politik Etis, yang mewujudkan dalam kebijakan perbaikan di bidang edukasi, irigasi, dan migrasi. Inilah kebijakan yang muncul sebagai reaksi terhadap pandangan van Deventer tentang “utang kehormatan” Belanda kepada Hindia Belanda, yang harus dibayar





Parade rakyat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan alun-alun Kota Yogyakarta.

Sumber: KHOMAINI.

dengan memprioritaskan kepentingan rakyat jajahan dalam kebijakan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, “dalam kebijakan Politik Etis terdapat lebih banyak janji daripada pelaksanaan, dan fakta-fakta penting tentang eksploitasi dan penaklukan sesungguhnya tidak berubah” (Ricklefs 2005: 319).

Akses lebih luas di bidang pendidikan, kemudian, bukan hanya menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang mengisi kebutuhan birokrasi publik dan perusahaan di Hindia Belanda. Proses yang sama telah melahirkan suatu kesadaran baru tentang kesetaraan dan identitas kebangsaan. Kebangkitan nasional tersebut menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan sekaligus membangunkan identitas nasional, melampaui identitas-identitas primordial.

Saat Kongres Pemuda II pada 1928, berbagai organisasi pemuda, seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong

Sumatranen Bond, dan Jong Islamiyeten Bond berupaya menemukan suatu platform bagi gerakan bersama. Lewat Sumpah Pemuda, mereka mendeklarasikan:

*Kami poetra dan poetri Indonesia/  
mengakoe bertoempah darah jang  
satoe, tanah air Indonesia.*

*Kami poetra dan poetri Indonesia/  
mengakoe berbangsa jang satoe,  
bangsa Indonesia.*

*Kami poetra dan poetri Indonesia/  
menjoenjoeng bahasa persatoean,  
bahasa Indonesia.*

Suntikan gagasan nasionalisme dan imajinasi bersama tentang Indonesia merdeka membuhulkan solidaritas di antara kelompok-kelompok yang memiliki pertalian erat dengan suku maupun agama mereka. Dengan itu, kebangsaan Indonesia bukanlah suatu kebangsaan yang menelan habis identitas-identitas yang lebih primordial. Kebangsaan Indonesia adalah suatu bhinneka tunggal ika yang menghargai dan melindungi keberagaman, namun tetap terikat dalam solidaritas sebagai suatu nasion.

Solidaritas inilah yang tercabik selama pemberontakan pada kurun 1950-an, terutama disebabkan oleh sentralisasi kekuasaan. Pembangunan kebangsaan mengalami kemunduran di akhir kekuasaan Sukarno, dan tidak lebih baik di era Soeharto. Pendekatan keamanan nan militeristik tidak pernah menjadi jawaban atas masalah



Musyawarah merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak berabad silam.

Sumber: [www.masoedabidin.wordpress.com](http://www.masoedabidin.wordpress.com).

ketidakadilan, yang merupakan akar disintegrasi. Demikian pula pemberangusan keberagaman tak pernah menjadi solusi atas perbedaan pandangan. Lebih buruk, stabilitas semu yang dihasilkan oleh represi membuka selubung konflik dalam skala luas begitu negara kehilangan cengkeraman represifnya.

Akhir masa kekuasaan Soeharto hingga beberapa tahun setelahnya menjadi salah satu episode terburuk dalam sejarah negeri ini. Kontestasi kepentingan berbalut primordialisme sempit sempit menggansir solidaritas yang telah diupayakan sejak lebih seabad sebelumnya. Di tengah kuatnya gejala ketidakadilan, mekarnya kebebasan

ternyata diikuti oleh sempitnya wawasan kebangsaan. Akibatnya, berbagai penjuru negeri ini terbenam dalam kebencian, yang berakhir hanya setelah terusirnya mereka yang dipandang berbeda.

Upaya tak kenal lelah untuk menghadirkan resolusi konflik serta optimisme pada masa depan kebebasan yang kemudian berhasil menyelamatkan Indonesia dari perpecahan yang lebih parah. Rajutan persaudaraan yang sempat renggang perlahan pulih dan menerbitkan harapan bahwa persatuan Indonesia dapat terus terjaga.

**Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam**



Warga Sindangbarang berembuk agar acara Seren Taun berlangsung lancar.

Sumber: KHOMAINI.

### Permusyawaratan/Perwakilan

Pada 1932, Hatta menulis bahwa dasar-dasar demokrasi telah ada dalam pergaulan hidup asli di Indonesia, dan kita gunakan sebagai sendi politik kita. Hatta mengidentifikasi “anasir demokrasi” itu: rapat, mufakat, tolong-menolong atau gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja. Dalam pembangunan demokrasi, anasir-anasir tersebut diadaptasi sesuai dengan struktur negara modern.

Musyawarah atau deliberasi adalah bagian dari proses pengambilan keputusan yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara selama berabad silam. Tradisi berbagai suku di Nusantara yang tumbuh dari kebiasaan turun-temurun menunjukkan bahwa musyawarah untuk menemukan permufakatan merupakan mekanisme penting dalam proses sosial. Tidak hanya untuk memilih pemimpin, mekanisme serupa dimanfaatkan untuk menentukan langkah bersama

menyangkut problem-problem bersama.

Dalam musyawarah semacam itu, gotong royong telah mendorong keterlibatan anggota masyarakat sekaligus menjaga agar putusan yang diambil tidak menafikan aspek keadilan. Melampaui sekadar ada bersama, gotong royong mengandung semangat saling menolong; di dalamnya, solidaritas terbangun di antara anggota komunitas dalam rasa senasib sepenanggungan. Solidaritas semacam itu hidup dalam berbagai tradisi masyarakat, sebagai suatu mekanisme pengaman sosial, yang menjaga keberlangsungan organisasi sosial.

Pada sisi lain, tradisi oposisi tidak mengambil bentuk perlawanan yang frontal. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, terdapat tradisi *mepe*, ketika rakyat berjemur di luar keraton di bawah terik matahari sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan penguasa. Selain bentuk-bentuk protes terbuka, tradisi Nusantara juga mengenal penarikan diri dari kehidupan formal politik sebagai ekspresi penentangan terhadap putusan yang dipandang tidak adil. Bentuk-bentuk penentangan itu tidak dimaksudkan sebagai suatu destruksi, melainkan bagian dari mekanisme kontrol kekuasaan.

*Raja bijak, raja disembah; raja lalim, raja disanggah.* Demikian tradisi Melayu mengajarkan bahwa kekuasaan mesti menghasilkan kebijakan dan kebajikan, sebagai suatu syarat mendasar bagi

legitimasinya. Sebaliknya, rakyat memiliki hak untuk mengingkari kekuasaan yang sewenang-wenang, termasuk di antaranya dengan menyanggah atau protes terhadap putusan raja. Jelas bahwa akar-akar demokrasi hidup dalam tradisi masyarakat Nusantara.

Namun, dalam sejarah Indonesia, pemusatan kekuasaan terutama di era Sukarno dan Soeharto telah mengakumulasi berbagai bentuk ketidakadilan. Kekecewaan masyarakat terhadap penguasa yang diekspresikan melalui berbagai bentuk protes

dihadapi justru dengan ancaman dan penindasan. Kelaliman, pada akhirnya, terjungkal terutama oleh kekuatan rakyat yang menghendaki perbaikan dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Sejak 1998, Indonesia memasuki suatu era baru demokratisasi. Tertatih, Indonesia harus bergulat di antara tarikan yang menghendaki kembalinya masa gelap kekuasaan dan yang menginginkan terkonsolidasinya tatanan bersendi kedaulatan rakyat. Perlu energi besar untuk memastikan agar demokrasi menjadi *the only game in town*.



Dua perempuan pembuat penganan tradisional di pesisir pantai Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial masih menjadi mimpi masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Sumber: KHOMAINI.

### **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

*Tidak mungkin ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi*; inilah salah satu titik temu antara pandangan Sukarno dan pandangan Hatta tentang keadilan sosial. Bagi Sukarno, demokrasi adalah permusyawaratan yang memberi hidup; karena itu, demokrasi politik-ekonomi harus mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Bagi Hatta, demokrasi sosial adalah suatu penghubung antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi; di sebelah demokrasi politik, berlakulah demokrasi ekonomi.

Prinsip keadilan sosial tidak semata memberi kebebasan bagi pengejaran tujuan-tujuan individual. Pada sisi lain, kegotong-royongan memberi suatu jaring pengaman yang idealnya tidak membiarkan mereka yang berkekurangan lantas tercecer dalam suatu kompetisi sosial. Di sini negara terbebani kewajiban untuk memastikan bahwa warga negara terpenuhi hak-hak dasarnya, melalui distribusi berkeadilan atas sumber-sumber daya. Karena itu, negara diberi kewenangan besar untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Tidaklah mengherankan bahwa bagi Hatta pasal 33 UUD 1945 itu merupakan sendi utama politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Pasal tersebut menyiratkan bahwa negara mengemban tugas mewujudkan keadilan sosial, yang dengan itu negara menemukan basis keabsahan bagi kekuasaan yang dimilikinya untuk menguasai sumber-sumber daya terpenting bagi kehidupan. Negara perlu menjamin bahwa warga negara mendapatkan akses setara untuk dapat mewujudkan hidup berkualitas.

Sayangnya, ketimpangan sosial terus-menerus direproduksi oleh rezim ekonomi yang memusat sekaligus eksploitatif. Pada 1950-an, di antara pendorong utama pemberontakan daerah ialah relasi yang tidak berimbang dalam pemerintahan dan distribusi yang timpang dalam perekonomian. Meski pemberontakan



Seorang petani tengah memotong batang padi yang sudah siap untuk dipanen.

Sumber: Istimewa.

mereda, oleh represi militer, pada masa sesudahnya, pemerintahan Soeharto memperburuk kondisi demokrasi sosial lewat kebijakan pembangunan yang tidak mengindahkan aspek keadilan tersebut. Buruknya demokrasi sosial, sedemikian rupa, telah melemahkan kapabilitas warga negara untuk melakukan partisipasi sosial.

Menguatnya konflik sosial selama periode transisi adalah eksekusi yang harus diterima Indonesia sebagai konsekuensi kebijakan yang mengabaikan keadilan sosial. Era kebebasan ditandai oleh menguatnya partisipasi dan kesadaran baru identitas, namun hal itu tidak dibarengi kepemilikan sumber daya maupun kapabilitas memadai. Konflik atas penguasaan sumber daya—terutama politik dan ekonomi—menggejala di

banyak tempat sebagai suatu tegangan antara meningkatnya partisipasi dan memburuknya distribusi.

Distribusi kekuasaan, melalui otonomi daerah, menjadi suatu resep yang dipandang mampu menampung melimpahnya gairah partisipasi dan tumbuhnya kesadaran baru identitas (di sini identitas politik berkelindan dengan identitas lain yang lebih primordial, seperti identitas kesukuan atau keagamaan). Dengan kekuasaan lebih besar, warga berhak memilih secara langsung pemimpin-pemimpin pada level lokal; dengan kekuasaan lebih besar, para pemimpin lokal membutuhkan sumber daya lebih besar untuk mengongkosi keberlangsungan pemerintahan mereka. Pendekatan ekonomi ekstraktif atas sumber-sumber alam semakin menggila dan distribusi

sumber daya justru tidak menjadi lebih baik. Perbaikan distribusi sumber daya di daerah-daerah kaya sumber daya alam justru termasuk yang terburuk di antara daerah-daerah lainnya. Demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi masih jauh dari harapan, keduanya bahkan terus-menerus rentan terhadap ancaman.

### **E. KARAKTER NUSANTARA**

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dikelilingi perairan laut (*archipelagic state*). Dalam hubungan antarbangsa, Indonesia menyatakan Deklarasi Juanda yang menjadi tonggak penting pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Deklarasi ini juga diakui dunia dalam memahami bangun alam dan kebangsaan Indonesia sebagai Nusantara. Meskipun diakui tidak mudah mengelola masyarakat Nusantara, klaim Nusantara ini bukan tanpa dasar.

Di kawasan Nusantara yang mencakup “Indo-Malaysia”, satuan masyarakat serta teknologi dasar, organisasi pemukiman, serta penjelajahan sudah muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kawasan ini menjadi ranah yang subur terhadap tumbuh-kembangnya suatu peradaban. Satuan masyarakat ini dapat dilacak dari alat-alat berburu dan pertanian mereka, serta sistem kepercayaan mereka.

Untuk kawasan “Indo-Malaysia”, ada upaya melacak bagaimana satuan masyarakat ini sudah melakukan

penjelajahan mengingat konteks kepulauan yang amat menonjol. Adanya pencirian “Proto-Melayu” dan “Deutero-Melayu” perlu dilihat bukan sebagai pemisahan antarkelompok masyarakat saat itu, seolah-olah “Proto-Melayu” lebih tua atau terpisah dengan “Deutero-Melayu”. Pencirian ini lebih dalam konteks gelombang pengetahuan yang menonjol, yang didukung oleh pergerakan masyarakat. Gelombang pengetahuan ini muncul dalam teknologi penjelajahan dan pemukiman terutama dalam, misalnya, cadik, fleksibilitas pemukiman, model terasering (dan punden berundak), rumah panggung. Hal ini amat kuat terutama di bagian barat dan tengah “Indo-Malaysia”.

Bentuk paling nyata dari karakter Nusantara ini adalah peradaban yang berada di sekitar padi. Budi daya padi diperkirakan berasal dari kawasan Tiongkok Selatan dan kawasan Jepang-Korea. Melihat bagaimana budi daya padi menjadi amat ekstensif dan intensif di Asia, maka dapat dilacak bagaimana peradaban Nusantara ini pada awalnya tumbuh. Sejarah kemudian mencatat bagaimana “peradaban sekitar padi” ini memberikan pendalaman yang luar biasa kuat, bahkan jika hal itu dibandingkan dengan model penjelajahan dan perdagangan yang sudah lebih dulu kuat dan tumbuh. Denys Lombard, satu di antara para sejarawan penting mengenai Nusantara, memberikan penilaian

bahwa peradaban sekitar padi ini memberikan kontribusi integrasi Nusantara yang amat kuat. Dengan segala kekurangannya, termasuk tendensi membuat masyarakat menjadi bertingkat serta munculnya *gentry* (lapisan sosial yang mempunyai aset dan kontrol sosial), “peradaban sekitar padi” ini secara progresif memunculkan pusat-pusat peradaban, termasuk ekonomi.

Dalam sejarah, karakter Nusantara—dalam hal intuisi asal-muasal, penciptaan pengetahuan dan paradigma—berkembang seiring interaksi berbagai kelompok yang hidup di kawasan Nusantara. Ketika melakukan konsolidasi pengetahuan dan pendalaman sejarah, “peradaban sekitar padi” mempunyai peran besar. Kemudian tumbuh interaksi antara kelompok-kelompok pendatang dengan masyarakat yang sebelumnya.

Dalam hal ini, peradaban Sriwijaya menjadi penanda pertama bagaimana interaksi ini dibangun. Melalui sekolah, armada laut, pergudangan, dan jalur komunikasi yang dibangunnya, Sriwijaya membuka ruang interaksi antarperadaban. Hal ini sekaligus menjadi katalisator bagi perkembangan kebudayaan. Begitu menonjolnya peradaban Sriwijaya ini sehingga peradaban-peradaban Asia lainnya belajar dan mengambil bentuk-bentuk terbaik dari Sriwijaya. Peradaban Khmer, misalnya, juga membangun sekolah-sekolah dan armada laut sebagai katalisator

peradaban mereka.

Dalam landasan sosio-historis Nusantara, situasi sejenis ini juga memberikan kejutan yang menarik. Kita menemukan adanya tokoh yang pada dasarnya mewujudkan kenusantaraan dengan mengolah pengetahuan-pengetahuan penting dunia. Karaeng Patinggaloang, misalnya, yang menguasai *know-how* sekaligus memahami sejarah masyarakatnya, mempunyai pemahaman mengenai kosmologi (serta intuisi mengenai asal muasal) dan kemampuan menciptakan pengetahuan beserta paradigmanya. Karaeng Patinggaloang adalah seorang *polymath* dan poliglot, sekaligus menjadi perdana menteri.

Jika kita melihat peralihan sejarah pra-republik, maka kita menemukan bagaimana sekolah-sekolah menjadi pendukung utama kehidupan sosial ekonomi sebuah peradaban. Sekolah-sekolah di masa Sriwijaya, dan kemudian Majapahit, menghasilkan ragam jenis aparat dan inteligensia yang berperan dalam siklus peradaban keduanya. Sekolah-sekolah jenis ini juga yang menjalin hubungan dengan sekolah di Asia Selatan, yaitu Nalanda, dan di Tiongkok. I-Tsing/Yi-Jing adalah sarjana yang terhubung erat antara ketiganya. Perannya sebagai inteligensia mencakup transformasi pengetahuan ke dalam peradaban, dan juga memproyeksikan pandangan topografis terhadap peradaban Hindu-Buddha. Amartya Sen mencatat dengan amat menarik:



...Memang, interaksi itu telah memperkaya dan juga berhasil menyebarkan bahasa Sanskerta melewati batas-batas India selama beberapa abad. Pada abad ke-7, seorang sarjana dari Tiongkok belajar bahasa Sanskerta di Jawa (di sebuah kota Sriwijaya) dalam perjalanannya dari Tiongkok ke India. Pengaruh interaksi itu terefleksi di dalam bahasa dan kosakata di sepanjang Asia, dari Thailand dan Malaysia hingga Indochina, Indonesia, Filipina, Korea, dan Jepang. Hal ini juga terjadi di Tiongkok, di mana kesarjanaan dalam bahasa Sanskerta berkembang dengan sangat baik di awal millennium, di samping juga ada pengaruh yang datang dari negara-negara lain di kawasan tersebut. Cukup sering diakui bahwa bahkan kata “Mandarin”, kata yang menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Tiongkok itu diderivasi dari kata Sanskerta, yakni Mantri, yang datang dari India ke Tiongkok lewat Malaysia. (Amartya Sen 2005: 85)

Karakter Nusantara adalah kemampuan membangun rekaman sejarah yang menjadi sumber pelajaran mengenai era kontemporer dan masa depan. Mereka mendirikan sejenis ingatan kelembagaan (*institutional memory*) sekaligus membangun visi peradaban secara terus-menerus. Karakter ini mewarnai model interaksi yang sekarang mulai dipelajari lagi dan

disemai kembali dalam interaksi sosial-politik Indonesia. Karakter ini dapat dilihat dalam hal:

### 1. Siklus dunia atau siklus sejarah

Dalam lintasan waktu, masyarakat Nusantara telah mengalami beberapa kali guncangan (*upheaval*) yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar, termasuk yang disebabkan oleh bencana alam. Menanggapi perubahan-perubahan besar tersebut, masyarakat Nusantara melakukan upaya untuk mencermati dampaknya terhadap peradaban yang sudah dibangun,



Pelabuhan sejak dulu telah menjadi pusat perdagangan dan transaksi keuangan masyarakat Nusantara.

Sumber: KHOMAINI.

termasuk yang berpengaruh pada kekuasaan, sumber daya, dan pranata sosial-ekonomi. Pencermatan tersebut menghasilkan sebuah pemahaman bahwa “kekuasaan” dituntut untuk mampu mengelola siklus tersebut. Dalam tataran tertentu, hal ini menghasilkan peran orakel–ramalan sekaligus kebijaksanaan untuk menghadapi turbulensi zaman–pada karakter Nusantara, sebagaimana yang muncul dalam “Jangka Jayabaya” dan Ilmu Begja (Ki Ageng Suryomentaraman).

## 2. Long-term perspective/



## perspektif jangka panjang

Kehidupan keseharian sering diwarnai perhitungan biaya-manfaat. Namun, masyarakat Nusantara memiliki karakter untuk lebih mengutamakan perspektif jangka panjang ketimbang perhitungan jangka pendek tersebut. Dalam lintasan sejarah, karakter Nusantara mewujud dalam bentuk nilai, bahasa, geodesi, tata kelola, dan sebagainya, yang terus-menerus berkembang tanpa henti, apa pun rezim kekuasaan dan rezim globalisasinya. Kekuasaan yang paling tiran pun biasanya tidak dapat mengatasi superioritas perspektif ini.

## 3. Interaksi

Karena perhatiannya pada soal siklus dan perspektif jangka panjang, maka menjadi bisa dimengerti bahwa karakter Nusantara muncul dalam penghargaan atas “pertukaran gagasan”. Ada ribuan informasi dan pengetahuan yang muncul namun belum diolah. Dalam hal ini, kesediaan untuk belajar dan selalu mengolah ditumbuhkan. Misalnya, pengetahuan mengenai kondisi alam Nusantara dibentuk dari pertukaran gagasan dari beragam kebudayaan yang ada di Nusantara, yaitu tradisi lokal, Hindu, Buddha, Islam, dan kebudayaan Barat.

## 4. Perdagangan dan lapangan Nusantara

Dalam pertumbuhan peradaban Nusantara, perdagangan membawa barang dan jasa sekaligus ilmu dan

sekolah dari penjuru dunia ke tanah Nusantara. Sebaliknya, ilmu Nusantara dan sekolah-sekolah dikembangkan di seluruh sudut dunia. Dalam konteks Sriwijaya, peradaban Nusantara berinteraksi dengan peradaban India, Tiongkok, dan Khmer. Sebaliknya, penjelajahan pedagang Bugis amat berkontribusi dengan perkembangan komoditi rempah-rempah di berbagai daerah di dunia, sekaligus peradaban Islam yang dikembangkan dalam kebijaksanaan Nusantara.

Dunia kolonialisme bukan satu-satunya penjelasan mengenai bagaimana Nusantara tumbuh. Lintas sejarah dalam peradaban ini menunjukkan bahwa globalisasi juga menjadi cara hidup masyarakat Nusantara. Cara pandang terbuka dan optimis ini dicerminkan oleh modus penjelajahan kelompok-kelompok dagang Nusantara. Pramoedya Ananta Toer, misalnya, dalam *Arus Balik*, mengambil konteks dampak serangan Demak ke Malaka (1511) terhadap elan peradaban di Nusantara. Cara pandang ini dianggap amat umum di kalangan kerajaan dan pedagang di wilayah pesisir Nusantara, bahkan di masa kolonialisme (dilihat mulai dari masuknya VOC).

Konteks lain, kita melihat jenis pengetahuan Prambanan (abad ke-9) diproyeksikan dalam kompleks candi Angkor Wat (abad ke-11). Konteks ini menarik karena, meski Mataram Hindu dan Khmer mempunyai sifat “pedalaman” yang kuat, proyeksi

pengetahuan (teknik sipil, geodesi, arsitektur, dan lainnya) berkembang bersama perdagangan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam lintasan waktu 4 abad, perdagangan dipakai sebagai alat, lintasan (*trajectory*), dan sumber daya bagi peradaban yang ditumbuhkan di pedalaman.

Kesadaran hidup dengan masyarakat global muncul dari rempah-rempah dan perdagangan yang tumbuh darinya. Perdagangan sekitar rempah-rempah terus berkembang tanpa henti sejak masa Sriwijaya. Namun, perlu dicermati bahwa perdagangan adalah suatu bentuk hubungan internasional yang “non-hegemonik” atau “non-penaklukan”. Dalam sejarah wilayah Nusantara, hal ini menjadi lebih nyata. Setiap kekuatan dagang yang mau membangun ragam kekuatan menjadi monolitik akan menemui kegagalan. VOC sendiri gagal di Nusantara. Begitu pun, kerajaan-kerajaan Nusantara yang monolitik, juga dalam perdagangan, tidak mempunyai siklus hidup (*lifecyle*) yang panjang.

Berada di antara kekuatan besar dunia, seperti India, Khmer, Thai, Tiongkok, Vietnam, kekuatan-kekuatan dagang (*guild*) Nusantara selalu melihat perdagangan sebagai *trajectory* yang operasional. Perebutan Laut Tiongkok Selatan tidak terjadi karena perdagangan membuat kelompok-kelompok tersebut menghargai kawasan Laut Tiongkok Selatan sebagai platform bagi “kemakmuran pedalaman”. Dalam perjalanan sejarah,

ilmu dan sekolah turut berkembang dalam perdagangan ini.

Perlu juga dilihat konteks perdagangan dan nilai yang dibawa. Misalnya, ilmuwan Tiongkok dan India amat menghargai matematika, susastra, dan arsitektur. Perdagangan membawa ketiganya. Misal lain, pedagang Gujarat membawa peradaban Islam dari berbagai sekolah di Timur Tengah dan Asia Tengah. Tidaklah mengherankan, lapangan Nusantara menjadi amat diperkaya. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan peradaban Islam memindahkan perhatian peradaban dari kekuasaan konsentrik menjadi relasi konfederatif. Bagi Nusantara, sumbangan ini tidak dapat dibilang kecil. Berulang kali monolitisme gagal, dan kemudian pedagang Gujarat dan peradaban Islam melaluinya mengembangkan ide-ide konfederatif.

### 5. Perdagangan pembentukan ideal “commonwealth”

“*Commonwealth*” berarti “makmur bersama” atau persemakmuran. Dalam arti ini, perdagangan memainkan peranan besar seturut kondisi kepulauan Nusantara. Peradaban yang dihasilkan dari perdagangan ini menumbuhkan sentimen rileks terhadap banyaknya pusat-pusat pertumbuhan, suatu perspektif konfederatif. Dengan pengetahuan yang tersebar luas, justru pertukaran barang-jasa dan pertukaran ide menjadi subur.

Ketika VOC masuk dan mendesak kekuatan dominan,

bahkan kolonialisme, maka reaksi kelompok-kelompok Nusantara menjadi keras (*harsh*) dan berkelanjutan (*sustained*). Episode *Cultuurstelsel* semakin memberikan penegasan mengenai akibat adanya dominasi tunggal. Episode ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa “pedalaman dan pesisir” tidaklah berhubungan. *Cultuurstelsel* adalah pemaksaan keras pertanian untuk kepentingan sempit perdagangan, diikuti militerisasi.

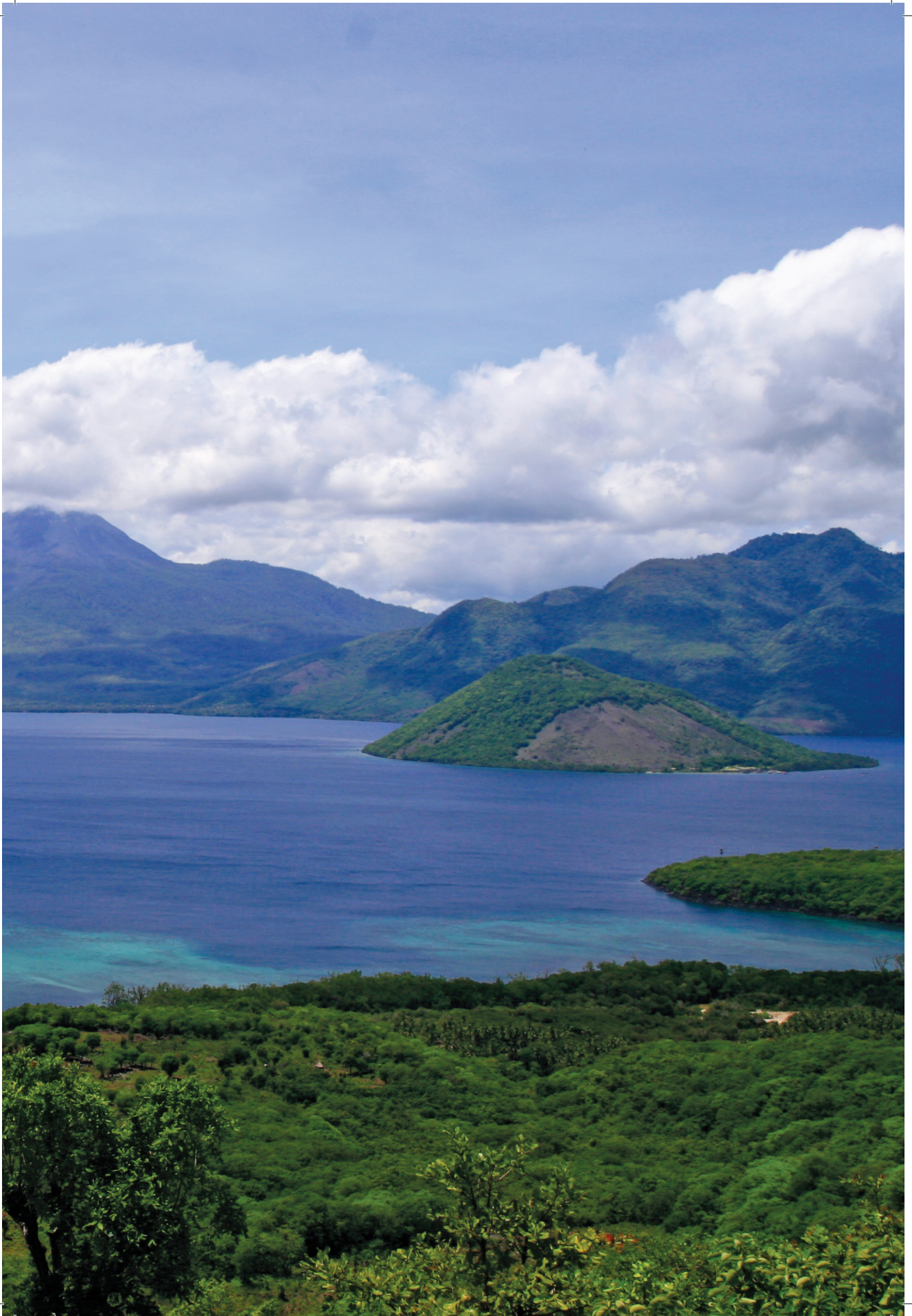
Perspektif “anti-kolonialisme” memperkuat intuisi “anti-hegemoni” atau “anti-penaklukan” yang berkembang dalam sifat perdagangan kelompok-kelompok Nusantara. Sisi-sisi laut Nusantara yang terbuka dan memungkinkan bagi banyaknya jalur perdagangan semakin memperkuat karakter Nusantara yang anti terhadap berbagai bentuk pemaksaan.



Keelokan pantai Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur mampu menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke kawasan ini.

Sumber: KHOMAINI.







# PENGALAMAN HIDUP BERSAMA

**P**erjalanan hidup bangsa Indonesia bukan tanpa masalah. Konflik antaretnis dan kekerasan yang mengatasnamakan agama baik dalam skala kecil maupun yang besar terjadi di negeri ini. Kita bisa menunjuk banyak tempat di Indonesia di mana konflik-konflik semacam itu pernah terjadi. Namun, yang menarik dan menjadi salah satu alasan penulisan buku ini adalah kemampuan masyarakat Indonesia untuk tetap mau hidup bersama sebagai satu bangsa dan bagaimana mereka membangun budaya hidup bersama di dalam keragaman dan perbedaan. Bagi kami, apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Sangat sedikit bangsa di dunia yang bisa melakukannya.

Sebagaimana sudah dikatakan di awal buku ini, bangsa Indonesia terdiri atas banyak bangsa, suku, etnis, agama, dan bahasa. Bukan sesuatu yang mudah bagi bangsa semacam ini untuk bisa hidup bersama. Bab ini akan mengisahkan berbagai pengalaman masyarakat kita hidup bersama dalam perbedaan berikut berbagai persoalan yang menyertainya. Berbagai konflik pernah terjadi: di Maluku antara umat Islam dan Kristiani; di Kalimantan antara etnis Dayak dan Madura, dan juga antara etnis Madura dan Melayu; di Sumatra Utara antara umat Muslim-Melayu dengan etnis Tionghoa; di Bali terjadi dua kali serangan bom (Bom Bali I dan II) oleh kelompok ekstremis; dan masih ada banyak konflik lain yang pernah terjadi di Indonesia.



Masjid Agung Al-Ghuraba Baiturrahman Bajawa (sebelum direnovasi) dan Gereja GMIT Ebenhaezer. Lokasinya berdampingan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisanata, menunjukkan kerukunan antarumat beragama berlangsung baik di tanah Bajawa, Flores.

Sumber: KHOMAINI.

Dalam konflik-konflik tersebut, kita melihat upaya-upaya berbagai pihak, baik yang dilakukan di level kultural maupun struktural, untuk memperjuangkan sebuah rumusan bagaimana bisa hidup bersama di dalam keragaman, tanpa ada niat untuk mengeksklusi pihak yang lain. Apa yang lahir dari upaya itu, pada tingkat tertentu, barangkali masih belum ideal. Namun, secara praktis telah berhasil membuat kita bisa bertahan sebagai sebuah bangsa yang majemuk hingga saat ini. Bagi kami capaian ini sudah luar biasa. Ini yang hendak kami bagi kepada sidang pembaca.

### A. INSPIRASI PERDAMAIAN DARI MALUKU

Maluku, sebuah daerah kepulauan di Indonesia timur yang sangat

indah. Sudah sejak lama, kehidupan masyarakat Maluku menjadi simbol toleransi keragaman agama di Indonesia. Ada dua agama besar di Maluku, yakni Islam dan Kristen. Orang Maluku menyebut *Salam* untuk Islam dan *Sarane* untuk Nasrani atau Kristen.

Secara sosial-budaya, kehidupan masyarakat Maluku masih terikat dalam garis kesukuan dan marga. Beberapa marga identik dengan agama tertentu, tetapi beberapa marga yang lain justru berbagi, sebagian menjadi Islam dan sebagian yang lain menjadi Kristen. Untuk menghindari terjadinya konflik karena alasan agama, masyarakat Maluku memiliki sistem budaya yang dianggap dan diharapkan mampu meredam kemungkinan terjadinya konflik. Mereka memiliki beberapa tradisi yang bisa merekatkan perbedaan melalui kerja sama dan ikatan persaudaraan. Beberapa tradisi itu misalnya adalah pela gandong, masohi, badati, dan maano.



Pasawari Adat "Panas Pela" Amahai Ihamahu mengenang dan memperkuat kekerabatan dan hubungan sosial di Pulau Seram, Maluku Tengah (20/9/2016).

Sumber: <https://ipji.org/2016/09/30/panas-pela-amahai-satu-darah-satu-gandong/>.





Tarian Dansa Tali diperagakan pada acara "Panas Pela" (mempererat ikatan kekerabatan) antara empat negeri (desa) yaitu Waii, Soya, Kaibobu dan Morella, di pelataran Masjid Negeri Hausihu Morella, Pulau Ambon, Maluku, Selasa (5/8/2014).

Sumber: <http://beritadaerah.co.id/2014/08/05/panas-pela-di-pulau-ambon-maluku/>.

Namun, sistem budaya yang diharapkan mampu meredam segala perbedaan itu tidak mampu menahan konflik sosial yang pecah pada 19 Januari 1999 silam. Konflik yang dimulai oleh sebuah pertengkaran kecil antara pemuda Batu Merah yang muslim dan Mardika yang Kristen kemudian berkembang menjadi konflik saling bunuh dan saling menghancurkan dalam skala yang sulit dibayangkan sebelumnya. Konflik besar ini terjadi dalam beberapa fase dengan skala yang cukup luas. Ketegangan antara dua kelompok agama ini terus terjadi hingga ada kesepakatan Malino 2 yang ditandatangani pada 2002. Setelah kesepakatan itu, di beberapa tempat

sebenarnya masih terjadi konflik, hanya saja sudah dalam skala yang lebih kecil. Dalam melihat konflik Maluku, tidak ada orang yang mengira bahwa Maluku dan Ambon menjadi *battle ground* antara muslim dan Kristen dalam skala yang luas dan mengerikan.

Pada zaman kolonial, Maluku dan kota Ambon adalah daerah penting sebagai salah satu pusat perdagangan. Pemerintah kolonial di masa itu cenderung membuat kebijakan diskriminatif yang memberikan banyak keuntungan bagi penduduk Ambon yang beragama Kristen. Pemerintah Belanda banyak memperkerjakan orang Kristen Ambon untuk administrasi dan juga kemiliteran. Sementara orang Ambon yang muslim, lebih terpinggirkan. Mereka tinggal di desa-desa dan dari segi pendidikan ada di bawah orang Ambon yang Kristen (Bertrand 2012: 186). Pada zaman Orde Baru, gerak sebaliknya terjadi. Pemerintah memberikan akses kekuasaan kepada banyak kelompok muslim.

Hal itu diakui oleh tokoh perdamaian, baik dari kelompok muslim maupun Kristen. Pendeta Jack Manuputty dan Abidin Wakano menilai pemerintah kolonial di masa lalu telah membangun segregasi berdasarkan agama di Maluku. Segregasi itu terus bertahan hingga Indonesia merdeka. Pengelompokan itu terjadi tidak hanya di kampung-kampung yang identik dengan agama tertentu, tetapi juga di institusi pendidikan

dan kantor-kantor pemerintahan. Pecahnya konflik 1999, salah satunya dipicu oleh pengelompokan semacam itu. Pemerintah dianggap gagal membangun sistem inklusi sosial yang berkeadilan bagi kedua belah pihak. Kebijakan yang dibangun justru menimbulkan permusuhan dan dianggap meminggirkan satu kelompok tertentu.

Ketika konflik meletus di Maluku banyak orang kaget dan tidak mengira bahwa skalanya menjadi sangat luas. Bagi banyak pihak, khususnya di level nasional, konflik itu merupakan perang antara Muslim dan Kristen. Para tokoh agama yang ada di Ambon pada awalnya terjebak dalam kondisi itu karena masyarakat betul-betul terpecah dalam kelompok Muslim dan Kristen. Namun, para aktivis setempat kemudian mencoba menjaga jarak sehingga mereka berpandangan bahwa sejatinya konflik itu bukan masalah agama. Tokoh-tokoh lintas agama dari seluruh kawasan Maluku saling berkoordinasi untuk merajut perdamaian yang tengah koyak. Bekerja sama dengan pemerintah pusat mereka meniti perdamaian. Hasilnya, kini Maluku benar-benar menjadi simbol toleransi yang amat penting bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia. Duta besar Vatikan untuk Indonesia, Antonio Guido Filipazzi mengakui itu. Keragaman tidak membuat mereka saling memusuhi. Pengalaman itu tentu sangat inspiratif bagi masyarakat dunia yang dirundung

konflik karena perbedaan agama.

Kemampuan masyarakat Maluku untuk mau hidup bersama dalam keragaman ditopang oleh para tokoh masyarakat yang aktif memberikan teladan pendidikan toleransi. Berbagai kekuatan sosial yang mereka miliki kembali dihidupkan dan diaktifkan. Misalnya, tradisi *pela gandong* yang cukup terkenal di Maluku. *Pela Gandong* merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua negeri (kampung) atau lebih. Melalui *Pela*, mereka saling mengikat persaudaraan. *Pela Gandong* sendiri merupakan intisari dari kata “*Pela*” dan “*Gandong*”. *Pela* adalah suatu ikatan persatuan sedangkan *gandong* mempunyai arti saudara. Jadi *pela gandong* merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara.

### PELA GANDONG

Tradisi *Pela gandong* adalah tradisi yang ada dalam masyarakat Maluku. Biasanya *pela gandong* dilakukan oleh dua negeri yang berlainan agama (umumnya Islam dan Kristen). Misalnya ikatan persaudaraan yang dilakukan oleh negeri Kailolo dan Tihulale yang berada di Kabupaten Maluku Tengah yang pada tanggal 2 Oktober 2009 di hadapan Gubernur Maluku. Mereka saling mengangkat *pela* sebagai ikat saudara.

Hubungan antara Tihulale dan Kailolo bisa ditelusuri jauh ke masa lalu. Dalam perang Alaka kedua, ketika Belanda menyerang kerajaan

Hatuhaha (Hulaliu, Kabau, Kailolo, Pelau, dan Rumoni), Kapitan Tihulale membantu kerajaan Hatuhaha hingga membawa kemenangan dengan memukul mundur Belanda.

Peperangan inilah yang akhirnya mengikat Negeri Tihulale dengan Kelima negeri Hatuhaha, yaitu Hulaliu, Kabau, Kailolo, Pelau, dan Rumoni dalam satu hubungan Pela. Keakraban antara Kailolo dan Tihulale ini diperlihatkan pada saat negeri Kailolo membangun masjid Nan Datu, mereka mengundang masyarakat negeri Tihulale untuk membantu. Undangan ini disambut dengan bantuan yang betul-betul konkret. Masyarakat negeri Tihulale datang dengan membawa sejumlah kayu dan papan yang dapat digunakan untuk membangun masjid. Sebaliknya ketika negeri Tihulale membangun Gereja Beth Eden, warga negeri Kailolo pun menyumbang banyak keramik.

### Budaya Masyarakat Maluku

Sebagai pusat perdagangan dunia di masa lalu, masyarakat Maluku sudah menerima kedatangan bangsa-bangsa besar sejak lama, seperti Arab, Portugis, dan Belanda. Bahkan kini orang Jawa, Buton, Bugis, dan Makassar juga turut mewarnai komposisi masyarakat Maluku. Agama Islam, Kristen, dan Katolik telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan masyarakat Maluku baik yang di utara, tengah, selatan, dan tenggara. Sudah sejak lama masyarakat Maluku memiliki tradisi kekeluargaan yang sangat kuat. Tradisi pela adalah

yang cukup terkenal. Selain itu, mereka juga memiliki ikatan marga (famili) yang juga cukup mengakar.

Tradisi pela sebenarnya ada beberapa jenis, yakni pela darah, pela sirih, dan pela gandong. Pela darah adalah jenis pela paling keras. Di dalamnya ada larangan dan kewajiban yang sangat mengikat. Perjanjian dalam pela ini dilakukan dengan meminum darah yang diambil dari jari tangan para pemimpin kelompok yang dimasukkan ke dalam gelas. Mereka kemudian meminum air itu. Melalui pela ini mereka kemudian menjadi saudara selama-lamanya dan di antara mereka tidak boleh terikat dalam perkawinan. Sebagai saudara mereka wajib saling melindungi dan saling membantu. Sementara pela sirih lebih lunak daripada pela darah. Pela ini ditetapkan melalui sumpah untuk saling membantu dan melindungi. Berbeda dengan dua pela sebelumnya, gandong lebih menyiratkan persahabatan yang terbentuk karena adanya kesadaran garis turunan. Gandong sendiri berasal dari kata kandung.

Dalam tradisi bergandong dan juga pela lainnya, sesuatu yang memalukan jika saudara dalam ikatan pela itu tidak turut membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan. Mereka memandang kelalaian itu sebagai aib. Karenanya ketika satu desa sedang membutuhkan bantuan seperti pembangunan rumah ibadah, saudara dalam ikatan pela ini akan turut serta membantu.





Tradisi *pela* dan *gandong* merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Maluku untuk memelihara kekerabatan dan persaudaraan.

Sumber: <https://disbudparkabmtb.files.wordpress.com/2008/11/13112008502>.

Selain ikatan *pela*, masyarakat Maluku juga memiliki famili atau marga. Mereka yang menjadi bagian dari marga tertentu dianggap sebagai bagian dari keluarga inti. Satu marga bisa saja tersebar ke beberapa desa dan juga bisa memiliki agama yang berbeda. Misalnya marga *Pelupessy* tidak hanya ada di negeri *Siri Sori* yang muslim tetapi juga ada di negeri *Ouw* (Kristen), negeri *Paperu* (Kristen) dan negeri *Siri Sori Serani* (Kristen). Begitu juga marga *Tanamal* di *Nusalau*, *Saparua* yang kebetulan Kristen namun di *Werinama*, *Seram* justru beragama Islam. Mereka yang terikat dalam satu marga menjaga hubungan dengan saling kunjung ketika ada perayaan hari besar masing-masing.

Masih ada beberapa tradisi masyarakat Maluku yang memiliki semangat kebersamaan sebagai sebuah masyarakat, meski mereka memiliki

perbedaan keyakinan, seperti *masohi*, *badati*, dan *maano*. Tradisi-tradisi ini mengikat dan menyadarkan masyarakat untuk selalu saling membantu setiap kali ada salah satu anggotanya yang membutuhkan bantuan.

### Aktor Perdamaian di Maluku

Konflik yang mengatasnamakan agama di Maluku justru melahirkan banyak tokoh yang menginspirasi perdamaian. Mereka tidak hanya berhasil mengakhiri konflik tetapi juga semakin menegaskan bahwa agama yang dianut masyarakat Maluku sejatinya tidak mengajarkan kekerasan, apalagi tindakan membunuh. Pengalaman konflik yang pahit semakin meneguhkan ikatan persaudaraan mereka.

### *Abidin Wakano dan Jack Manuputty*

*Abidin Wakano* dan *Jack Manuputty* adalah sebagian dari tokoh penting yang menggagas upaya damai di *Ambon*. Mereka menggagas sebuah gerakan yang disebut *Gerakan Provokator Damai*. Sebelumnya mereka juga sudah terlibat aktif dalam pendirian *Lembaga Antar-Iman Maluku (LAIM)*. Latar belakang *Abidin Wakano* adalah seorang pengajar di *IAIN Ambon* dan juga *Universitas Kristen Indonesia Maluku*. Sementara *Jack Manuputty* adalah seorang pendeta yang aktif menyebarkan pesan perdamaian.

Dalam melihat keragaman di Maluku, mereka berpikir perlu ada upaya inklusi sosial yang aktif dari



Abidin Wakano.

Sumber: [www.malukupost.com](http://www.malukupost.com).

seluruh komponen masyarakat. Menurut mereka, sejak zaman kolonial, masyarakat Maluku sudah tersegregasi menurut agama, antara negeri Islam dan negeri Kristen. Di beberapa tempat memang terjadi percampuran, namun di banyak tempat, sebuah kampung identik dengan agama tertentu. Segregasi juga terjadi di lembaga pendidikan dan pemerintahan yang hanya diisi oleh satu agama tertentu. Kondisi ini tentu turut menyuburkan benih-benih perselisihan dan stereotip terhadap pihak lain. Kerusuhan 1999, antara lain dipicu oleh kondisi itu.

Ketika konflik antara muslim dan Kristen pecah, mereka memahami bahwa perdamaian tidak bisa lahir begitu saja secara natural. Perlu ada upaya dari para aktor yang memiliki kepedulian untuk melakukan tindakan yang mencegah rasa permusuhan semakin melebar. Dengan

pemahaman ini mereka kemudian bergerak dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan perdamaian.

Mereka sengaja menggunakan kata “provokator” bagi gerakan mereka untuk membalik logika yang berkembang selama ini. Seakan-akan kata itu memiliki makna negatif. Dalam pandangan mereka kata provokator sebenarnya netral. Karenanya kata itu juga bisa dipakai untuk mengajak orang membangun situasi damai. Itulah yang mereka lakukan melalui gerakan Provokator Damai ini.

Dalam pandangan mereka, perdamaian harus didorong dan diprovokasi. Gerakan ini tentu mengandaikan bahwa sebenarnya selalu ada benih perdamaian dalam setiap orang, sebagaimana juga ada benih kekerasan dalam diri setiap orang. Hanya saja, benih apa yang dirangsang untuk berkembang bergantung pada “provokasi” apa yang terus dilakukan. Jika provokasi damai terus dilakukan, maka nilai-nilai perdamaian yang akan berkembang.

Dalam memprovokasi dan menumbuhkan benih perdamaian mereka aktif “melawan” media arus utama yang cenderung memprovokasi pada permusuhan. Bahasa-bahasa yang dipilih seharusnya tidak semakin menumbuhkan rasa permusuhan antar-kelompok. Melalui Gerakan Provokator Damai, mereka juga aktif dalam penulisan cerita tentang perjumpaan antar-iman, sanggar tari



Pendeta Jack Manuputty.

Sumber: [www.satuharapan.com/Sabar-Subekti](http://www.satuharapan.com/Sabar-Subekti).

antar-iman, dan lain-lain. Intinya mereka ingin menebalkan kesadaran bahwa perdamaian harus diciptakan oleh mereka sendiri. Karenanya mereka berusaha aktif membangun kesadaran ini di semua sisi.

Pendeta Jacky Manuputty kini juga aktif membangun kembali tradisi Pela. Ia mengikat tali persaudaraan antar-negeri di Maluku, khususnya antara negeri muslim dan negeri Kristen. Ia berharap kerusuhan yang terjadi di penghujung abad 20 adalah yang terakhir. Ia ingin agar Maluku tetap bertahan dalam perdamaian meski mereka memiliki agama yang berbeda-beda.

Abidin Wakano, selain di Gerakan Provokator Damai, di IAIN ia juga mengembangkan program pendidikan dan pelatihan rekonsiliasi dan perdamaian dalam Ambon

Reconciliation and Mediation Center-ARMC. Ia mengajak kelompok-kelompok yang pernah terlibat dalam konflik untuk merajut kembali perdamaian dengan saling “live in” di tempat pihak yang pernah saling berlawanan. Seorang muslim diminta untuk tinggal beberapa hari di rumah keluarga yang beragama Kristiani dan juga sebaliknya. Meski awalnya menimbulkan kekhawatiran dari pihak yang akan *live in*, namun setelah tinggal beberapa hari mereka merasakan sendiri kehangatan persaudaraan itu. Proses ini berhasil mengobati luka lama yang pernah ada.

### **Josep Matheus Rudolf Fofid**

Tokoh yang juga penting dalam proses bina damai di Maluku adalah Josep Matheus Rudolf Fofid. Dalam konflik 1999, ia kehilangan orang-orang yang dicintai. Ayah dan dua kakaknya meninggal dalam peristiwa itu. Namun, ia mencoba memahami semua itu. Baginya yang membunuh dan yang dibunuh sejatinya adalah korban. Karenanya ia belajar untuk tidak menyimpan dendam.

Pada saat peristiwa itu terjadi, masyarakat terbelah berdasarkan agama, Muslim dan Kristen. Tidak hanya itu, bantuan kemanusiaan dan media juga terbelah sehingga semakin memanaskan situasi. Butuh waktu bagi siapa pun untuk memahami situasi saat itu agar tidak terjebak dalam sentimen kelompok.

Ia yang kebetulan saat itu berprofesi



Josep Matheus Rudolf Fofid.

Sumber: [www.katoliknews.com](http://www.katoliknews.com).

sebagai wartawan *Suara Maluku* mengajak rekan-rekan lain lintas agama untuk tidak terjebak dalam sentimen kelompok dan mencoba merumuskan kode jurnalistik yang tidak partisan. Bahasa yang digunakan dipilih agar tidak membuat pihak-pihak tertentu semakin terbakar kebencian dan permusuhan. Ia juga mencoba merangkul semua pihak untuk terlibat dalam menyebarkan benih-benih perdamaian di kelompoknya masing-masing.

Dalam melakukan itu, ia harus menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang berseteru. Bukan hal mudah untuk membangun kepercayaan di tengah masyarakat yang saling konflik. Namun karena kerja keras dan kepercayaan bahwa masih ada yang bisa diajak untuk membina perdamaian, perjuangannya membuahkan hasil. Jaringan komunitas lintas imannya menyebar dan setiap jaringan terus mengabarkan pesan

kasih kepada semua.

Setelah konflik berakhir, ia masih tetap aktif menjaga perdamaian di Maluku. Dalam pandangannya, konflik bisa terjadi setiap saat dan bisa bermula dari hal yang remeh-temeh. Melalui upayanya ini ia ingin agar masyarakat Maluku lebih siap mengelola keragaman dan tidak lagi bisa diprovokasi untuk membenci kelompok lain. Karena komitmennya yang terus berkelanjutan dalam menyebarkan perdamaian ia pernah diberi penghargaan Maarif Award, penghargaan yang diberikan oleh Maarif Institute—sebuah, lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

### ***Suster Brigitta***

Suster M. Brigitta Renyaan adalah salah seorang yang terlibat aktif dalam proses rekonsiliasi ketika terjadi konflik yang mengatasnamakan agama (Islam vs. Kristen) di Ambon. Ia bersama jaringan lintas iman, dari Protestan dan Muslim, membentuk sebuah kelompok bernama Gerakan Perempuan Peduli (*The Concerned Women Movement Group*).

Suster Brigitta sendiri adalah koordinator Gerakan Perempuan Peduli dari agama Katolik. Kehadiran Gerakan Perempuan Peduli (GPP) sangat membantu mengurangi tingkat konflik dan permusuhan yang terjadi di Maluku sejak 1999. Mereka sangat



Suster Brigitta.

Sumber: Istimewa.

gigih memperjuangkan perdamaian. Gerakan mereka dipelopori oleh para perempuan. Sebagian dari mereka adalah para ibu. Perempuan dan para ibu adalah kelompok yang menderita dalam konflik di Maluku dan di mana pun.

Sejak konflik di Maluku pada 1999 berlangsung, Suster Brigitta dan kawan-kawan dari komunitas lintas iman bergerak menyuarakan pentingnya menghentikan kekerasan. Tindakan mereka tentu bukan tanpa risiko. Mereka harus menghadapi ancaman teror akan dibunuh oleh pihak-pihak tertentu. Namun, ia tidak gentar dengan ancaman itu. Ia terus bergerak menyampaikan dan memperjuangkan perdamaian.

Ia bercerita, ketika konflik di Maluku pecah, ada begitu banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Mereka adalah kelompok yang paling

rentan. Ia merasa perlu menghentikan ini. Melalui Gerakan Perempuan Peduli (GPP) ia membangun komunikasi lintas iman untuk menghentikan kekerasan serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.

Mengumpulkan para ibu dalam suasana situasi konflik tentu bukan hal mudah. Apalagi didasarkan pada jaringan lintas iman, karena konflik itu sendiri memakai atas nama agama. Karenanya, sebelum berkumpul mereka biasanya saling berjanji untuk bertemu secara diam-diam supaya tidak diketahui orang lain yang terlanjur memiliki rasa permusuhan pada agama yang dianggap lawan (Islam atau Kristen).

Semua kesulitan yang ia hadapi tidak meluruhkan semangatnya. Untuk melancarkan misi perdamaannya, ia aktif mendatangi berbagai pihak yang dianggap potensial dalam mengurangi konflik. Mereka membangun komunikasi dengan gubernur, tentara, polisi, DPRD (baik provinsi atau kota-kabupaten) untuk menghentikan konflik dan pertikaian.

Lahir di Langgur, Maluku Tengah, Suster Brigitta menjadi biarawati di Biara Puti Bunda Hati Kudus, Kota Ambon sejak 1975. Ia memilih hidup untuk berbagi kasih kepada sesama dengan menjadi biarawati. Di biara itu, ia menempa iman dalam bentuk cinta kasih kepada semua umat manusia. Maka, ketika terjadi konflik yang mengatasnamakan agama, ia merasa hal itu bertentangan dengan iman yang



diyakini. Ia kemudian membangun komunitas lintas iman yang memiliki visi perdamaian antarsesama umat manusia.

Setelah konflik berakhir, ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia mendampingi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik dan juga bencana. Dalam upaya itu, ia aktif dalam tiga yayasan sosial, yakni Yayasan Kasih Mandiri Ambon, Yayasan Astidharma yang memperjuangkan nasib anak dan pendidikan, serta Gerakan Peduli Perempuan. Tempat tinggalnya di kawasan Batumeja tak pernah sepi. Hingga larut malam, pintu selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan uluran tangan.

## **B. MERAJUT DAMAI DI POSO**

Dalam catatan hubungan antarumat beragama di Poso sebenarnya cukup sedikit didapati sejarah konflik antaragama. Meski masyarakat Poso berbeda agama, sebelum 1998 tidak pernah terdengar konflik besar karena perbedaan agama. Karenanya cukup mengherankan ketika 1998 terjadi konflik besar yang mengatasnamakan agama. Kehidupan masyarakat Poso, baik Muslim maupun Kristen diikat dalam kehidupan *mosintuwu* (*si=sama, tuwu=hidup, sehidup semati dalam kehidupan*). Dalam kehidupan bersama itu, cukup umum terjadi kegiatan saling membantu ketika masing-masing agama merayakan hari besarnya.

Secara demografis, penyebaran agama Islam di Poso terkonsentrasi

di daerah pesisir pantai. Agama Islam pada umumnya dibawa oleh para pedagang dari Bugis dan Ternate. Sementara agama Kristen terfokus di daerah perbukitan. Dalam kehidupan ekonomi, kelompok muslim biasanya bekerja sebagai nelayan dan penjual ikan sementara kelompok Kristen menanam sayur dan menjualnya.

Konflik 1998 di Poso bermula dari kompetisi elite lokal yang kebetulan berasal dari dua agama yang berbeda. Pada Desember 1998, ketika kekuasaan Bupati Arif Patanga akan berakhir, muncul dua tokoh yang menginginkan jabatan itu. Dua tokoh itu adalah Damsyik Ladjalani dan Yahya Patiro. Keduanya sebenarnya sama-sama kader Golkar. Hanya saja, Damsyik yang kebetulan muslim didukung oleh PPP yang merupakan partai Islam sementara Patiro yang kebetulan Protestan didukung PDI-P dan tokoh-tokoh Kristen. Perebutan kursi Bupati oleh dua tokoh yang berasal dari agama yang berbeda menyeret pendukungnya dengan melakukan memobilisasi sentimen agama. Sejak itu, perseteruan kemudian didasarkan pada agama.

Meski akhirnya mereka berdua gagal, karena DPRD memilih calon yang lain, yakni Muin Pusadan yang kebetulan juga kader Golkar, perseteruan antara dua tokoh tadi tetap tidak berakhir. Perseteruan itu terjadi kembali ketika Gubernur harus memilih seorang Sekwilda, orang berkuasa nomor dua di sebuah daerah. Keduanya menginginkan jabatan strategis itu.

Karena potensi konflik sangat besar, Gubernur akhirnya tidak memilih keduanya. Namun situasi sudah sulit dikendalikan. Tindakan saling provokasi mengakibatkan konflik antara kelompok muslim dan Kristen tidak bisa dihindari.

Untuk menghentikan konflik antarpihak yang bertikai, pemerintah daerah dan pusat mengambil inisiatif mengumpulkan para tokoh adat di Poso. Mereka menyelenggarakan pertemuan bertajuk *Rujuk Sintuwu Maroso*. Melalui pertemuan itu mereka mengingatkan pentingnya hidup bersama dan bersepakat untuk mengakhiri konflik. Secara simbolis, dalam pertemuan adat itu, mereka melakukan *motambu tana*, yakni penyembelihan seekor kerbau dan menguburkan kepalanya di dalam tanah. Penguburan kepala kerbau dianggap sebagai penguburan perselisihan di masa lalu. Setelah prosesi penguburan itu, pihak-pihak yang bertikai juga diminta untuk tidak mengungkit apa yang terjadi di masa lalu.

Oleh sebagian pihak, pertemuan adat ini dianggap kurang representatif karena tidak melibatkan tokoh-tokoh agama dan pendatang yang memiliki peran penting dalam konflik di Poso. Kemajuan yang cukup berarti dalam upaya meniti perdamaian baru terlihat ketika tokoh-tokoh agama yang bertikai membuat Deklarasi Malino I. Sebelum mengundang para tokoh agama, seorang staf Menkokesra Jusuf Kalla

secara diam-diam menyeleksi siapa saja tokoh agama yang pantas diundang. Akhirnya ditemukan 10 orang dari muslim dan 10 orang dari kelompok Kristen. Sebuah tempat pertemuan rahasia kemudian disiapkan untuk masing-masing kelompok. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, masing-masing pihak bersepakat mengakhiri konflik.

Meski kesepakatan ini dikritik oleh sebagian pihak karena tidak melibatkan kelompok yang menjadi korban, kesepakatan Malino I ini dianggap berhasil mentransformasi konflik ke situasi yang lebih kondusif. Pertikaian-pertikaian kecil memang beberapa kali terjadi, tetapi sudah berkurang signifikan. Salah satu kemajuan penting dari deklarasi ini adalah penyerahan senjata rakitan oleh pihak-pihak yang



H. Sofyan Faried (Tokoh Muslim Poso) berjabat tangan dengan Pdt. R. Damanik (Tokoh Kristen Poso), sebelum penandatanganan Deklarasi Malino di Malino, 20 Desember 2001.

Sumber: Istimewa.

berseteru.

Bahkan oleh sebagian kalangan, kesepakatan Malino I dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan kesepakatan Malino II untuk konflik Ambon. Salah satu penjelasannya adalah karena pihak-pihak yang bertikai di Poso cukup aktif menjaga implementasi butir-butir kesepakatan yang ditandatangani di Malino I.

### **Kedatangan Islam dan Kristen di Poso**

Menurut catatan sejarah, Islam masuk ke Maluku lewat orang Bugis yang berprofesi sebagai pedagang dan pelaut. Wilayah yang mereka tinggali pada umumnya adalah pesisir. Karenanya hingga kini umat Islam di Poso pada umumnya tinggal di wilayah Pesisir. Selain orang Bugis, kesultanan Ternate juga berkontribusi besar pada penyebaran Islam di Poso. Itu terjadi kurang lebih pada abad 17. Penyebaran Islam dilakukan dengan lewat beberapa cara, di antaranya adalah pendekatan politik, dakwah secara damai, pendidikan dan perkawinan.

Sementara penyebaran agama Kristen di Poso tidak lepas dari seorang penginjil bernama Albert Cristian Kruyt yang dirintis pada 1892 dan didukung oleh pengabar Injil di Belanda. Ia juga dibantu oleh N Adriani, juga seorang penginjil, dan Papa I. Woente, kepala suku di Poso. Karena kegigihan mereka, agama Kristen akhirnya diterima dan banyak dianut oleh masyarakat suku di Poso. Dakwah Kruyt banyak dilakukan

dengan pendidikan sekolah. Karenanya tingkat pendidikan umat Kristen di Poso pada umumnya lebih baik dibanding umat Islam yang sudah lebih dulu ada di Poso.

### **Para Perajut Damai di Poso**

Sebagaimana di Ambon, konflik yang pernah dialami masyarakat Poso juga menggugah kelompok yang merindukan perdamaian. Mereka lelah ada di dalam konflik dan saling curiga kepada sesama. Ada dua tokoh yang diangkat di sini tanpa mengurangi peran para tokoh yang lain. Keduanya adalah Budiman Maliki dan Lian Gogali.

#### ***Budiman Maliki***

Ketika konflik Poso pecah, Budiman adalah mahasiswa di Universitas Tadulako, Palu. Kampung halamannya masuk dalam daerah konflik sehingga keluarganya diungsikan ke daerah yang lebih aman. Di Palu, ia menjumpai pengungsi yang sangat banyak. Melihat kondisi itu ia tergerak untuk melakukan sesuatu. Ia kemudian bergabung dalam jaringan Relawan Penanganan Pengungsi Poso. Para relawan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan dan penyembuhan trauma pascakonflik.

Bantuan ini tidak terbatas hanya untuk kelompok muslim, mereka juga membantu pengungsi dari kelompok Kristen. Aksi kemanusiaan jaringan ini tidak ingin tercederai dalam sentimen keagamaan. Semua pengungsi mereka



Budiman Maliki.

Sumber: [www.metrosulawesi.com](http://www.metrosulawesi.com).

bantu, tanpa melihat latar belakang agamanya. Konflik yang berlangsung sejak 1998 baru mulai mereda ketika telah disepakati Perjanjian Malino I pada 2001.

Meski sudah ada kesepakatan damai, konflik sebenarnya masih terjadi hanya saja sudah dalam skala yang jauh lebih kecil. Persoalan-persoalan pascakonflik mulai bermunculan. Ekonomi yang lumpuh, bangunan yang hancur, pendidikan untuk anak-anak korban konflik hingga pemulihan akibat trauma.

Hal yang juga penting untuk diperbaiki adalah hubungan antarkelompok yang pernah bertikai, muslim dan Kristen. Setelah berakhirnya konflik, kecurigaan terhadap masing-masing kelompok ini tidak bisa hilang. Ia bersama-sama dengan beberapa kawan aktivis

kemudian mendirikan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS). Melalui LPMS ia mencoba membina perdamaian dan membangun rasa saling percaya antarkelompok muslim dan Kristen.

Mereka mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pekerjaan pascakonflik itu. Mereka melakukan pelatihan manajemen pascakonflik, diskusi dan juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk. Target yang mereka fokuskan adalah masyarakat akar rumput, bukan para elite. Dalam upaya membangkitkan kondisi ekonomi masyarakat, mereka membantu petani lewat program percepatan tumbuhan kakao.

### ***Lian Gogali***

Pada saat konflik Poso meletus, Lian Gogali sebenarnya tidak berada di lokasi. Saat itu ia masih kuliah di Yogyakarta. Namun, konflik itu membuat kehidupan keluarganya di kampung menjadi tidak menentu, rumahnya dibakar dan isinya dijarah. Karena kondisi itu, biaya hidup yang biasa ia terima kini tidak lagi bisa dikirim.

Setelah konflik mereda, pada 2003-2004, ia merasa tertarik untuk meneliti akar-akar konflik Poso. Ia mewawancarai banyak orang yang berasal dari daerah konflik dan pengungsian. Dari wawancara itu melihat bahwa sebenarnya kaum perempuan punya andil besar dalam



Lian Gogali.

Sumber: YouTube.

merajut perdamaian di Poso.

Ia pernah mendengar cerita seorang ibu yang harus berjalan puluhan kilometer menjual ikan kepada semua masyarakat tanpa melihat agama yang dianut. Padahal apa yang dilakukannya pada saat itu sebenarnya sangat berisiko. Karena konflik, orang muslim yang pada umumnya menjual ikan hasil laut dan orang Kristen yang menjual sayur mayur tidak bisa saling berinteraksi. Mereka saling curiga jika jualannya itu sudah diracun. Namun, niat tulus perempuan itu akhirnya berbuah kepercayaan. Ia benar-benar ingin berjualan demi kehidupan keluarga. Bagi Lian, tindakan ini adalah sebuah terobosan dalam mencairkan hubungan antarkelompok yang masih saling curiga.

Dari pengalaman itu, ia kemudian mendirikan sebuah sekolah yang diberi

nama Sekolah Perempuan Mosintuwu. Baginya perempuan punya peran penting sebagai agen perdamaian. Sekolah ini merupakan jawaban atas pertanyaan seorang ibu yang pernah bertanya kepadanya, apakah penelitian yang ia lakukan itu memiliki manfaat untuk mereka.

Di sekolah itu ia mendidik semua perempuan baik dari Kristen maupun muslim. Ia meluruskan kesalahpahaman yang selama ini diyakini tentang pihak lain. Agar semakin cair, ia kadang mengajak perempuan muslim berkunjung ke gereja dan sebaliknya. Interaksi semacam ini berhasil mencairkan ketegangan antarkelompok yang pernah berkonflik ini. Selain pendidikan toleransi, sekolah ini juga mengajarkan ibu-ibu membuat kue dan mengembangkan pertanian organik.

Dalam upaya memulihkan trauma, Lian juga memiliki program perpustakaan keliling yang ia namakan Project Sophia. Perpustakaan ini berkeliling ke 24 desa dengan mengajak anak-anak membaca buku yang digemari. Ia berharap trauma akibat konflik bisa pulih dan tidak lagi dendam terhadap kelompok lain.

### C. MENGELOLA KERAGAMAN DI KALIMANTAN

Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, ada dua kelompok besar yang mendiami daerah itu, yakni Dayak dan Melayu. Selain dua kelompok itu, juga ada kelompok

Tionghoa dan Madura yang memainkan peran sosial yang cukup menentukan. Juga ada beberapa kelompok kecil lain yang berasal dari Jawa, Batak, Sunda, dan Sulawesi. Hanya jumlah dan pengaruh kelompok-kelompok terakhir itu masih relatif kecil. Hubungan antarkelompok atau antarsuku di Kalimantan Barat termasuk cukup rawan konflik. Hal ini terbukti dari beberapa konflik antarsuku yang pernah terjadi di wilayah itu.

Pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan, kelompok Melayu berada pada lapisan teratas stratifikasi sosial masyarakat Kalimantan Barat. Melayu memiliki perkerjaan terhormat, kekuasaan yang besar, dan kemakmuran yang melimpah. Sementara suku Dayak selama beberapa waktu mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan. Di akhir tahun 1950-an, representasi mereka mulai terakomodasi dengan dibentuknya Kalimantan Tengah dan tokoh Dayak, Tjilik Riwut menjadi gubernur pertama. Namun sayang, akomodasi itu semakin sempit ketika rezim berganti ke Orde Baru. Dengan ideologi pembangunan, orang Dayak semakin terdesak di daerahnya sendiri.

Dalam sejarah hubungan antarkelompok di Kalimantan Barat sudah terjadi beberapa konflik, mulai dari skala yang kecil hingga luas dan mengerikan. Misalnya, konflik antara suku Dayak dan suku Madura atau antara suku Melayu dan suku Madura adalah konflik yang paling sering

terjadi. Konflik terbesar antara Dayak dan Madura terjadi pada Desember 1996 yang bermula di Sanggau Ledo. Sementara konflik antara Melayu dan Madura terjadi pada 1999 yang bermula di Parit Setia.

Pada umumnya, konflik antaretnis bermula dari masalah pidana biasa. Masalah itu kemudian berkembang menjadi konflik antarkelompok karena identifikasi masalah kelompok semakin mendominasi. Tentu saja hal ini dimungkinkan karena sudah ada prasangka yang telah terbangun sebelumnya. Dalam kasus hubungan antaretnis di Kalimantan Barat, masing-masing kelompok sudah memiliki prasangka satu sama lain. Prasangka ini semakin mengeras ketika konflik antarkelompok pecah.

Selain proses akulturasi yang gagal, konflik antarkelompok di Kalimantan Barat juga dipengaruhi oleh kebijakan sumber daya alam yang kurang adil. Ada tiga sektor ekonomi sumber daya alam yang menjadi sumbu keributan, yakni sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, pertambangan (khususnya emas) dan hasil hutan (kayu).

Dalam pandangan masyarakat Dayak, tanah dan hutan adalah milik mereka karena tanah itu sudah lama mereka kuasai, bahkan sebelum Indonesia ada. Hal yang lebih menentukan adalah karena tanah dan hutan serta isinya merupakan basis bagi kehidupan masyarakat Dayak, baik secara budaya dan juga



Dua orang warga Dayak Kenyah tengah berburu. Hutan beserta isinya merupakan basis bagi kehidupan masyarakat Dayak.

Sumber: [www.beritagar.id](http://www.beritagar.id).

kehidupan ekonomi. Pola pemanfaatan hutan yang mereka lakukan selama ini biasanya didasarkan pada kearifan kultural mereka. Orang Dayak percaya bahwa segala sesuatu itu memiliki roh sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan ritual-ritual yang tidak boleh dilanggar begitu saja. Jika aturan itu dilanggar maka hubungan antara manusia dan alam akan terganggu. Sementara bagi masyarakat luar Dayak, keyakinan semacam itu dianggap sebagai penghalang bagi aktivitas ekonomi dan percepatan pembangunan yang tengah digalakkan saat itu.

Selain kebijakan sumber daya alam dan ekonomi yang kurang adil dan kurang memberdayakan para penduduk lokal, persoalan distribusi posisi politik juga kerap menjadi pemicu keributan antarkelompok.

Pemerintah pusat beberapa kali membuat kebijakan yang kurang memperhatikan relasi antarkelompok dalam masyarakat. Pada taraf tertentu, hal itu melahirkan kekesalan yang berujung pada konflik sosial.

### Orang Madura di Sambas

Menurut penelitian Suparlan, orang Madura sudah datang dan tinggal di Kalimantan Barat sejak tahun 1920-an (Suparlan 2005: 191). Sebelum perang dunia kedua, keberadaan mereka secara sosial dan ekonomi di wilayah itu tidak terlalu signifikan. Hal itu dikarenakan jumlah mereka yang kecil dan karena posisi sosial mereka yang rendah. Umumnya, mereka berprofesi sebagai buruh kasar. Dalam perkembangannya hingga sebelum kerusuhan 1999, orang-orang Madura sudah hidup di hampir seluruh pelosok wilayah kabupaten Sambas, di desa, dusun dan juga perkotaan. Mereka hidup mengelompok dengan sesama orang Madura. Meski mengelompok, mereka hidup dalam ketetanggaan bersama kelompok lain, khususnya Melayu dan Dayak.

Pusat kegiatan orang Madura adalah tempat ibadah mereka. Jika jumlah mereka sedikit maka tempat ibadah itu masih berupa langgar atau mushola. Namun bila jumlahnya banyak maka pusat kegiatan itu ada di masjid dan juga pesantren. Di pusat-pusat kegiatan itu mereka kurang inklusif terhadap kelompok lain. Tempat ibadah itu hanya diisi oleh orang Madura saja.

Bahasa komunikasi yang digunakan juga bahasa Madura. Kyai dan imam yang ada di masjid dan pesantren juga orang Madura. Bahkan, orang-orang Madura di Sambas memiliki kecenderungan untuk bersembahyang berjamaah di masjid milik orang Madura, yang khotbahnya dilakukan dalam bahasa Madura.

### **Kerusuhan Sambas dan Pemicunya**

Dalam memahami konflik antara Madura dan Dayak, pendekatan kultural melihat ada masalah serius di tingkat relasi antarkelompok itu. Secara budaya, kedua suku memiliki budaya kekerasan sehingga memiliki potensi besar terlibat dalam konflik. Dari data yang ada, antara 1962 hingga 1999 sudah terjadi kerusuhan antara Dayak dan Madura sebanyak 11 kali. Kerusuhan paling besar dan luas terjadi pada 1996-1997 yang dimulai di Sanggau Ledo.

Berbeda dengan konflik antara Dayak dan Madura yang sudah sering terjadi, konflik antara Melayu dan Madura justru lebih sedikit jumlah kejadiannya. Peristiwa Parit Setia merupakan peristiwa yang relatif jarang. Kericuhan itu terjadi karena perselisihan antara dua kelompok itu tidak lagi bisa dibendung. Hingga kini, orang-orang Madura yang mengungsi dari Sambas belum bisa kembali karena kendala resolusi yang belum usai.

Khusus tentang konflik antara Madura dan Dayak, Jacques Bertrand memiliki analisis yang cukup tajam. Menurutnya, ada beberapa penjelasan

yang pernah mengemuka dalam membaca konflik tersebut. Yang pertama adalah penjelasan budaya. Dua suku ini dianggap sebagai suku yang memiliki tradisi kekerasan sehingga potensi konfliknya cukup tinggi. Suku Dayak memiliki tradisi kayau (*headhunting*), jika merasa kehormatannya dilangkahi. Meski tradisi ini sudah lama ditinggalkan, namun dalam konflik 1996-1997, tradisi itu mereka hidupkan kembali. Sedangkan suku Madura memiliki tradisi Carok. Tindakan ini juga dilakukan ketika kehormatan mereka merasa dilecehkan (Bertrand 2012: 77).

Dalam pandangan suku Dayak, suku Madura adalah satu suku yang tidak memberikan hormat pada nilai-nilai Dayak dan adat istiadat setempat. Menurut Bertrand, alasan ini paling sering dikutip untuk menjelaskan mengapa Dayak dan Madura kerap terlibat dalam konflik terbuka di Kalimantan Barat dibanding dengan suku-suku lain (Bertrand 2012: 78).

Penjelasan kedua yang juga dianggap mungkin adalah karena adanya tindakan provokasi. Tahun 1996-1997 adalah periode menjelang dilakukannya pemilu terakhir Orde Baru. Ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penghasutan antardua suku yang memiliki potensi konflik. Tindakan provokasi barangkali memang ada, tetapi penjelasan ini dianggap sulit untuk dipertahankan, karena ia tidak menjelaskan mengapa konflik itu sangat



mudah terjadi. Sementara penjelasan ketiga adalah penjelasan sosio-ekonomi. Penjelasan ini pun dianggap kurang relevan karena di antara pendatang di Kalimantan Barat, suku Madura bukan suku yang kaya. Pada umumnya mereka miskin, kurang lebih sama dengan suku Dayak. Kebanyakan mereka adalah tukang becak, kuli, sopir, buruh dan pedagang kecil (Bertrand 2012: 79).

Jacques Bertrand mencoba menganalisis lebih jauh soal konflik itu dengan menunjukkan nasib orang Dayak yang mengalami proses peminggiran, khususnya sejak Indonesia merdeka. Puncak dari proses peminggiran itu berlangsung di masa Orde Baru lewat kebijakan pembangunannya. Dengan ideologi pembangunannya, rezim Orde Baru melihat suku Dayak sebagai terbelakang. Paling tidak ada dua kebijakan yang membuat mereka semakin asing di rumah sendiri. Pertama standardisasi konsep desa bagi suku Dayak. Karena kebijakan ini, konsep rumah Betang milik suku Dayak dianggap tidak layak dan kemudian ditata ulang agar sesuai dengan format desa pada umumnya. Perubahan ini mencabut struktur dasar budaya suku Dayak yang ada dalam format rumah Betang. Pola berladang yang berpindah-pindah juga dianggap tidak efisien.

Kedua, kebijakan izin pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah Orde Baru kepada para pengusaha dan kroni semakin membuat suku Dayak tidak bisa bertahan dalam ekosistem

yang selama ini mereka hidupi. Ketika proses peminggiran secara sistematis terhadap suku Dayak terjadi, mereka menyaksikan proses migrasi masif suku Madura ke Kalimantan Barat. Sebagaimana sudah dikatakan di atas, secara ekonomi, sebenarnya suku Madura bukan kelompok atas, sehingga alasan sosio-ekonomi dianggap kurang relevan untuk menjelaskan konflik antara Dayak dan Madura.

Dari uraian itu kita melihat bahwa ada proses peminggiran yang dialami suku Dayak dengan hilangnya representasi politik yang baru saja mereka peroleh di masa sebelumnya. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan dan kekesalan kolektif. Namun sebagai sebuah kelompok mereka tidak mampu melawan kekuatan negara yang sangat dominan dan represif saat itu. Di tengah kekesalan itu, mereka melihat suku Madura yang jumlahnya tidak terlalu banyak yang secara kebetulan kerap terlibat perselisihan dengan mereka. Situasi ini memberikan alasan bagi suku Dayak untuk melampiaskan kekesalan terhadap orang-orang Madura.

### **Merajut Damai di Kalimantan**

Upaya untuk membina perdamaian dan kondisi harmonis antarkelompok masyarakat di Kalimantan Barat dilakukan dengan memperbaiki dua hal penting. *Pertama*, melibatkan kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakan yang akan diambil. *Kedua*, mengikis prasangka dan stereotip yang

ada dalam masyarakat.

Pada level pertama, kita barangkali bisa melihat adanya sedikit perbaikan perumusan kebijakan yang berbasis pada kepentingan masyarakat itu sendiri. Sementara pada level kedua, pemerintah jelas sangat menginginkan agar hubungan antarkelompok dalam masyarakat bisa berlangsung harmonis. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan merevitalisasi nilai-nilai lokal pada masing-masing kelompok. Upaya ini didorong oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga non pemerintah.

Patut dicatat bahwa ketika terjadi konflik antara Dayak dan Madura, tidak semua orang Dayak memerangi warga Madura. Sebagian orang Dayak bahkan ada yang rela mengambil risiko dengan melindungi orang Madura yang sedang dikejar. Pengalaman itu bisa kita lihat dari tokoh perempuan Dayak Bakate' Sanggau Ledo yang bernama Paleng. Katanya:

Waktu itu rumah ini dipenuhi oleh masyarakat Madura yang mengungsi. Siangnya kita disibukkan memberi makan mereka walau kami makan apa adanya. Malam hari kita juga mengantar mereka (para pengungsi) pergi ke hutan mengambil harta benda mereka yang ditinggal di sana, walau kami juga takut menjadi korban dibunuh oleh kawan Dayak. (Rosdiawan 2007: 67)

Pengalaman semacam ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa



Ritual Singer Manetes Hinting Bunu di Kota Banjarmasin. Ritual ini diselenggarakan untuk menjalin perdamaian di antara pihak yang bertikai.

Sumber: Istimewa.

selalu saja ada masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kekerasan dan konflik adalah sesuatu yang sepatutnya dihindari. Orang seperti Paleng, yang membantu orang Dayak dari penyerangan, memang melihat ada perbedaan budaya yang perlu diperbaiki. Namun, perbaikan itu seharusnya tidak dengan konflik. Selain Paleng tentu saja masih ada beberapa orang atau aktor yang aktif merajut perdamaian di Kalimantan.

Setelah konflik memakan korban cukup banyak dan perhatian yang begitu luas, masing-masing pihak merasa harus mengakhiri situasi itu. Bersama pemerintah mereka berkonsolidasi membina perdamaian. Dalam upaya itu, ada semangat yang cukup luas dari segala lapisan mengenai pentingnya mengakhiri konflik. Baik konflik antara Dayak dan Madura atau antara Melayu dan Madura, mereka semua betul-betul berkeinginan

mengakhiri semua perseteruan sosial itu. Masing-masing pihak melakukan introspeksi diri dalam memandang kelompok lain. Mereka berusaha untuk adil dalam melihat kelompok lain dengan tidak melakukan generalisasi.

### **Harmoni Dayak-Madura di Desa Retok**

Sejauh ini, setelah lebih dari 15 tahun, kita memang tidak lagi mendengar konflik besar terjadi di Kalimantan. Pemerintah dan masyarakat telah belajar dari pengalaman masa lalu. Namun, bila kita bicara mengenai potensi konflik di Kalimantan, hal itu sebenarnya masih cukup besar mengingat beberapa persoalan mendasar tidak terpecahkan secara menyeluruh. Hal ini tidak berarti bahwa perdamaian menjadi sulit. Kita bisa melihat beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam merajut perdamaian antarkelompok dan suku di Kalimantan.

Hal yang perlu dicatat dalam melihat konflik antarkelompok di mana pun, sejatinya kita tidak melihat konflik antarkelompok itu dalam arti total bahwa semua suku A pasti bermusuhan dengan suku B. Karenanya kita juga tidak memahami bahwa semua orang Dayak pasti bermusuhan dengan orang Madura. Selalu saja ada bagian dari kelompok yang “keluar” dari relasi permusuhan itu. Mereka ini justru aktif pada upaya sebaliknya, yakni merajut perdamaian. Kisah-kisah itu tentu sangat penting untuk memahami relasi

antarkelompok di Kalimantan.

Salah satu kisah penting itu ada di sebuah desa yang bernama Retok. Kisah di desa ini menggambarkan hubungan saling pengertian antara suku Madura dan Dayak. Urat nadi desa itu adalah Sungai Retok yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain. Karenanya di daerah itu ada beberapa usaha transportasi yang dikelola baik oleh orang Madura, Dayak, dan juga Tionghoa.

Mayoritas penduduk Retok adalah suku Madura. Mayoritas kedua adalah suku Dayak. Sisa sebagian kecil lain adalah Tionghoa. Desa ini terdiri dari empat dusun, dusun Retok Kuala, Babante, Acin, dan Memperigang. Kehidupan ekonomi warga dusun banyak bergantung pada hasil alam dan budi daya lokal seperti karet, jagung, nanas, dan lain-lain. Pola pemukiman masyarakat desa Retok masih didasarkan pada kelompok etnis.

Dari penelusuran para orang tua di desa Retok diketahui bahwa komunitas yang pertama kali menempati desa itu adalah suku Dayak di akhir abad 19 dan disusul oleh orang Madura yang baru tiba pada 1920-an. Namun, karena ada migrasi yang cukup masif, jumlah orang Madura bertambah secara signifikan hingga menjadi mayoritas. Kehidupan bersama antara dua etnis yang pernah dan kerap mengalami konflik ini relatif terjaga karena ada komitmen kuat untuk saling mengerti dan memahami budaya masing-masing.

Bagi orang Dayak, adat memainkan

peranan yang sangat penting. Inti dari adat yang mereka yakini adalah keseimbangan hubungan antarsesama manusia, hubungan antara manusia dan alam, dan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Jubata). Adat menuntut agar manusia menjaga keseimbangan ini. Karenanya jika ada pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut, mereka menuntut ganti-rugi lewat ritual adat.

Tindakan yang melanggar keseimbangan itu dianggap sebagai tindakan yang “mengotori” sehingga mereka perlu melakukan “pembersihan”. Proses pembersihan dilakukan melalui ritual yang dipimpin oleh para tokoh adat Dayak. Mereka yang dianggap melanggar keseimbangan juga diminta bertanggungjawab dengan melakukan penebusan sebagai “sanksi adat”.

Adat yang diyakini masyarakat Dayak ini bisa diterima oleh masyarakat Madura. Orang Madura mau mengikuti sistem sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa kasus. Orang yang dianggap bertanggung jawab, baik dari suku Dayak ataupun Madura diharuskan membayar sanksi atau tebusan atas tindakan yang dianggap mengotori. Dalam ritual adat, mereka melakukan doa bersama, berharap agar mereka selalu terhindar dari kejahatan.

Proses penting yang turut menopang kohesi ini adalah kemampuan mereka untuk saling mengerti. Kebanyakan orang Madura

di Retok bisa berbahasa Dayak dan juga sebaliknya. Kemampuan ini membantu mereka untuk melakukan inklusi sosial secara baik. Selain pertukaran bahasa, mereka juga mampu mendistribusikan kekuasaan politik secara arif. Misalnya, meski orang Madura menjadi mayoritas, mereka selalu menyerahkan kekuasaan kepala desa kepada orang Dayak. Paling tidak, hal ini telah berlangsung sejak tahun 1972. Dalam upaya menghindari konflik, mereka juga aktif menyeleksi orang dari masing-masing suku ketika hendak tinggal di desa Retok. Mereka tidak akan menerima orang yang dianggap sulit untuk dikendalikan karena berpotensi mengganggu kohesi yang sudah dibangun (Atok).

#### **D. HARMONI DI SUMATERA UTARA**

Kerusuhan Tanjung Balai yang terjadi pada Jumat 29 Juli sekitar pukul 23.30 WIB hingga Sabtu 30 Juli 2016 dini hari diawali permintaan seorang ibu etnis Tionghoa, Meliana, agar masjid di dekat rumahnya mengecilkan volume pengeras suaranya. Ternyata, tindakan ini menimbulkan kemarahan sejumlah orang yang tidak terima atas protes ibu tadi. Awalnya, kemarahan ini bisa diredakan oleh pimpinan lingkungan dan polisi setempat. Namun, beberapa jam kemudian muncul massa beringas yang membakar dan merusak sejumlah bangunan wihara, kelenteng, dan kendaraan pribadi. Peristiwa ini menyebabkan 15 bangunan yang terdiri atas wihara,



Vihara Tri Ratna Tanjung Balai (sebelum patung Buddha diturunkan pada Oktober 2016) di Asahan, Tanjung Balai Sumatera Utara.

Sumber: [www.jadagram.com](http://www.jadagram.com).

kelenteng, dan rumah pribadi dibakar dan dirusak massa, tujuh di antaranya rusak berat.

Banyak yang mengatakan, juga penduduk Tanjung Balai sendiri, kerusuhan ini sebenarnya bukan konflik agama. Kesenjangan ekonomilah yang menjadi penyebab utama. Unsur agama hanya menjadi pemantik saja. Beberapa pihak menyebutkan sikap etnis Tionghoa di Tanjung Balai selama ini arogan dan tidak menghormati etnis-etnis lainnya yang beragama Islam. Warga yang telah lama memendam kemarahan lalu melampiaskannya ketika ada seorang warga etnis Tionghoa memprotes pengeras suara masjid. Mereka menganggap protes yang disampaikan Meliana merupakan

wujud nyata dari sikap arogansi warga pendatang.

Namun, pihak Komnas HAM mengambil kesimpulan lain. Dalam siaran persnya, Komnas HAM berpendapat bahwa permintaan Meliana untuk mengecilkan volume pengeras suara disampaikan dengan cara yang wajar. Permintaan tersebut diutarakan ke pihak pengurus masjid dan sudah ada mediasi dengan pihak kelurahan. Pihak Meliana pun sudah meminta maaf atas permintaannya. Komnas HAM menilai bahwa sebenarnya peristiwa ini tidak akan terjadi jika tidak ada distorsi informasi yang disampaikan beberapa oknum. Informasi yang menyebar adalah ada warga etnis Tionghoa yang melarang azan dan memprotes pengeras suara masjid. Tulisan-tulisan provokasi melalui media sosial yang menyebar di masyarakat untuk menyulut kebencian etnis dan agama kemudian menyulut kemarahan warga hingga mereka melakukan perusakan dan pembakaran.

Sebelumnya, warga Buddha etnis Tionghoa dan warga muslim Tanjung Balai juga pernah berkonflik. Pada 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010, beberapa ormas yang mengatasnamakan “Gerakan Islam Bersatu” melakukan demonstrasi ke kantor DPRD dan Walikota Tanjung Balai. Mereka mendesak pemerintah menurunkan patung Buddha Amithaba di wihara Tri Ratna dengan alasan bahwa keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan

kesan islami di Kota Tanjung Balai dan dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Lagi-lagi, alasan utama di baliknya disinyalir bukanlah agama, persaingan sosio-ekonomi yang menjadi penyebabnya. Masyarakat Tanjung Balai merasakan dominasi orang-orang Tionghoa pada bidang sosial dan ekonomi. Saat umat Buddha Tionghoa membangun patung Buddha yang tingginya menjulang mengalahkan tinggi bangunan Balai yang dibangun pemerintah sebagai monumen Tanjungbalai, mereka anggap sebagai sikap arogan etnis Tionghoa untuk menunjukkan dominasinya. Sebab itu, warga menuntut agar patung tersebut diturunkan.

Tuntutan masyarakat akhirnya menerbitkan kesepakatan untuk menurunkan patung tersebut. Namun, kesepakatan ini tak kunjung direalisasikan. Setelah kerusuhan Tanjung Balai pada Juli 2016–Vihara Tri Ratna merupakan salah satu bangunan yang dirusak massa—demi terciptanya suasana kondusif dan hubungan harmonis di antara umat beragama di Kota Tanjung Balai dibuat keputusan bersama yang melibatkan juga pemerintah kota untuk memindahkan patung Buddha setinggi 6 meter itu ke lokasi yang telah ditentukan. Patung ini akhirnya diturunkan pada Oktober 2016.

### **Kekerasan pada Etnis Tionghoa**

Etnis Tionghoa berkali-kali



Seorang warga keturunan Tionghoa tengah bersembahyang di Kelenteng Sam Poo Kong, Simongan, Semarang.

Sumber: KHOMAINI.

mengalami kekerasan di Indonesia, baik sebelum dan setelah Indonesia merdeka. Dalam abad ke-20, tercatat peristiwa kekerasan terjadi pada 1916, 1946-47, 1966, 1980, 1996, dan 1998.

Persaingan sosio-ekonomi sering dijadikan penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Mereka minoritas, tapi secara ekonomi lebih mampu daripada mayoritas pribumi. Namun, alasan adanya persaingan sosio-ekonomi saja tidak cukup untuk menjelaskan terjadinya kekerasan. Faktanya, tidak semua orang Tionghoa kaya, dan kekerasan yang menyasar pada etnis ini tidak terbatas pada kalangan kaya saja.

Adanya pelembagaan baik formal maupun informal yang terus-menerus terjadi pada kalangan etnis Tionghoa merupakan alasan yang lebih bisa menjelaskan terjadinya kekerasan. Etnis Tionghoa dianggap bukan penduduk

asli. Terlepas dari asal-usul mereka yang beragam, bahasa yang digunakan, jumlah generasi sejak kedatangan mereka di Indonesia, ataupun percampuran dengan yang bukan Tionghoa, mereka tetap dianggap dengan kategori tunggal: *Cina*. Istilah ini selalu berkonotasi nonpribumi, atau warga pendatang.

Pelembagaan orang-orang Tionghoa sebagai kelompok terpisah inilah yang tampaknya memainkan peran utama. Mulai dari masa kolonial sampai berbagai periode bangsa Indonesia merdeka, terdapat bermacam-macam peraturan, perundang-undangan, dan lembaga-lembaga representasi yang dimaksudkan untuk membedakan orang-orang Tionghoa dari kelompok-kelompok lain. Bahkan kelahiran nasionalisme Indonesia sendiri terkait erat dengan perbedaan dengan orang Tionghoa yang disokong oleh pelembagaan pemerintah kolonial. Saat itu, berbagai organisasi, seperti Sarekat Dagang Islam, dibentuk sebagai sarana memperjuangkan pedagang pribumi dari dominasi pedagang-pedagang besar Tionghoa.

Pembedaan ini kemudian melahirkan berbagai macam stigma negatif kepada etnis Tionghoa, seperti rasa kesetiaan mereka yang mendua dan bisnis mereka yang bersifat memeras sehingga memiskinkan masyarakat setempat.

Stigmatisasi ini kemudian diperburuk pada zaman Orde Baru. Di satu sisi, Orde Baru melanggengkan

peminggiran terhadap etnis Tionghoa. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat menyulitkan pergerakan etnis Tionghoa. Etnis ini diberi kode khusus dalam KTP mereka, yang dengan jelas mengidentifikasi mereka sebagai orang Tionghoa. Orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa benar-benar terhalang untuk menjadi PNS dan militer khususnya untuk posisi-posisi puncak. Diskriminasi juga terjadi pada bidang pendidikan. Meski tidak tertulis, akses pelajar Tionghoa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri sangat dibatasi. Kebijakan yang dibuat Orde Baru ini meski berbeda secara penerapan, memiliki ciri yang sama dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda, yaitu bersifat memecah belah.

Pembedaan itu kian diperparah oleh cara Orde Baru memelihara sekelompok kecil minoritas pengusaha Tionghoa yang sangat kaya. Berbagai pembatasan pada etnis Tionghoa, kebijakan Orde Baru dalam mobilisasi modal asing dalam negeri untuk pembangunan, serta hubungan patron klien yang ada dengan segelintir pengusaha Tionghoa telah menciptakan suatu kelas pemilik konglomerat bisnis raksasa yang kaya raya. Para cukong ini tumbuh besar di bawah perlindungan penguasa. Timbullah persepsi umum bahwa orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa telah mendominasi perekonomian Indonesia. Anggapan inilah yang kemudian meningkatkan sentimen *anti-Cina* dan menyulut kekesalan di kalangan orang Indonesia.

Krisis keuangan pada 1997-an memperparah keadaan ini. Puncaknya terjadi kerusuhan Mei 1998, di mana banyak etnis Tionghoa menjadi korbannya. Betapa pun provokasi memainkan peran besar dalam membuat sentimen *anti-Cina* menjadi kekerasan, peristiwa ini merupakan akibat dari kebijakan diskriminatif Orde Baru. Orang-orang Tionghoa tetap diperlakukan sebagai orang luar, nonpribumi. Ketika rezim menciptakan ketidakadilan ekonomi yang lebih kuat dan mencolok dengan cara memelihara para cukong, kemarahan terhadap rezim itu ditransformasikan menjadi kekerasan terhadap etnis Tionghoa.

Pada masa Reformasi, keadaan menjadi lebih baik. Kejatuhan rezim Orde Baru dan kerusuhan *anti-Cina* yang mengikutinya menyadarkan banyak pihak bahayanya segregasi bagi keutuhan bangsa. Di samping itu, ketegangan terhadap etnis Tionghoa mulai mengendur dengan diprosesnya para konglomerat Tionghoa di pusaran penguasa Orde Baru karena terlibat korupsi. Setidaknya langkah ini menghilangkan salah satu kekesalan utama terhadap etnis Tionghoa.

Runtuhnya Orde Baru kemudian menjadi langkah untuk memperbaiki berbagai aturan yang lazim. Untuk pertama kalinya, sejak 1950, etnis Tionghoa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik guna membela hak-hak mereka. Secara terbuka, mereka menuntut penghapusan praktik-praktik

diskriminatif.

Pemerintahan era reformasi mengakomodasi tuntutan ini. Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dihapuskan. Praktik agama dan perayaan yang sebelumnya dilarang bisa kembali dirayakan di ruang publik. Tahun Baru Tionghoa (Imlek) bahkan dinyatakan sebagai hari libur nasional. Yang paling penting adalah amandemen UUD yang dilakukan MPR pada November 2001 yang mengganti persyaratan agar presiden harus “orang asli” dengan persyaratan kewarganegaraan. Juga ketetapan yang dibuat pemerintah untuk kembali menggunakan istilah “Republik Rakyat Tiongkok” dan orang “Tionghoa” menggantikan istilah “Republik Rakyat Cina” dan orang “Cina” yang berkonotasi negatif.

Langkah-langkah formal yang dilakukan pemerintah masa Reformasi memang tidak sepenuhnya menghilangkan praktik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Namun, banyak yang telah berubah. Ruang sosial dan politik saat ini terbuka lebar bagi etnis Tionghoa. Kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pasca-Mei 1998 hampir tidak terjadi. Kalau pun terjadi, seperti pada kasus Tanjung Balai, akan segera menjadi keprihatinan nasional dan langsung ditangani oleh pemerintah.





Wakil Gubernur Sumatera Utara H. T. Erry Nuradi saat melantik Pengurus Daerah Generasi Muda Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (GEMA INTI SUMUT).

Sumber: Istimewa.

### Etnis Tionghoa di Sumatra Utara

Wilayah Sumatra Utara merupakan satu wilayah di mana persentase etnis Tionghoanya paling besar di Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda, sudah terdapat banyak pemukiman permanen etnis Tionghoa, misalnya di Bengkalis, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Binjai, dan Tebing Tinggi. Saat itu, Sumatra Utara dikenal sebagai Sumatra Timur Tanah Kekuasaan Raja-Raja Melayu.

Sampai abad ke-19, mayoritas penduduk Sumatra Timur terdiri atas kelompok etnis Batak Karo, Batak Simalungun, dan Melayu. Mereka inilah yang dikenal sebagai penduduk asli Sumatra Timur. Sudah ada pendatang dari Tiongkok karena pada awal abad ke-7 Masehi, di beberapa pelabuhan di Sumatra Timur sudah terdapat pedagang-pedagang Tionghoa terutama di wilayah Aru, Kota China, dan pulau

Kampai.

Baru pada pertengahan abad ke-19, terjadi imigrasi etnis Tionghoa dalam jumlah besar. Saat itu, kolonial Belanda mengembangkan perkebunan di wilayah ini. Pada awalnya, masyarakat setempat tidak bersedia bekerja di perkebunan itu. Sebab itu, Belanda kemudian mendatangkan pekerja dari luar daerah, terutama dari Tiongkok bagian selatan dan Pulau Jawa. Kawasan Sumatra Timur kemudian dihuni oleh etnis yang beragam.

Sejak itu, wilayah Sumatra Timur berciri sistem ekonomi perkebunan. Ciri utama ekonomi perkebunan adalah daerah yang kaya raya, sekaligus ketergantungan pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Meningkatnya jumlah penduduk dan kurangnya lahan pertanian menjadi penyebabnya. Dalam hal ini, para pedagang etnis Tionghoa memainkan peran besar.

Sementara itu, para buruh Tionghoa yang telah menyelesaikan kontrak kerja dari kolonial Hindia Belanda mulai berupaya untuk menetap di kota-kota, dan lambat laun mereka bekerja sebagai pedagang, pemilik toko, petani kecil, nelayan, dan penjual barang bekas. Pada 1920, pemukiman pedagang Tionghoa sudah tampak di beberapa kota besar, antara lain Siantar dan Medan. Sebagian besar toko dan perdagangan di kota itu didominasi oleh orang Tionghoa.

Pengelompokan yang dilakukan pemerintah kolonial dan Indonesia

pascamerdeka sedikit banyak membuat etnis Tionghoa terasing dari penduduk setempat. Mereka tinggal dalam kantong-kantong pemukiman sesama etnis mereka, terutama di kawasan perniagaan di wilayah perkotaan. Mereka masih kental memelihara budaya Tionghoa dan menggunakan bahasa Tionghoa atau dialek asal kampungnya di daratan Tiongkok. Hal ini membuat integrasi etnis ini dengan masyarakat setempat tidak berjalan lancar.

### Interaksi Antar-Etnis di Sumatra Utara

Pada umumnya, situasi di Sumatra Utara yang dihuni oleh beragam etnis ini kondusif dan tenang. Jarang sekali terjadi kekerasan antaretnis, terutama sejak masa Reformasi. Pematang Siantar, misalnya, dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia pada 2015 oleh Setara Institute. Kota lain di Sumut yang dikenal toleran adalah Sibolga. Dua kota di Sumatra Utara ini dianggap berhasil membangun kebersamaan dalam masyarakat yang multikultur.

Namun, bagaimana dengan kota-kota lain di Sumatra Utara? Apakah minimnya konflik antaretnis dan agama bisa dijadikan acuan bahwa wilayah Sumatra Utara, khususnya di bagian timur, bisa dikatakan sebagai daerah yang menjunjung nilai keberagaman? Sebab, meskipun tidak menjadi konflik yang terbuka, pengalaman-pengalaman konfliktual dalam relasi antaretnis *toh*

tetap terjadi. Penentangan masyarakat terhadap patung Buddha Amithaba di Wihara Tri Ratna dan protes seorang warga terhadap pengeras suara masjid yang berujung pembakaran sejumlah tempat ibadah di Tanjung Balai menunjukkan bahwa ketegangan antaretnis masih ada.

Seperti yang ditunjukkan dalam sebuah penelitian mengenai relasi etnik dan identitas kewargaan di kota Binjai, Sumatra Utara (Budiman ed. 2012), sebagian masyarakat perkotaan di Sumatra Utara masih melihat etnis Tionghoa sebagai kelompok yang eksklusif. Mereka lebih suka bercengkerama dengan sesama mereka. Mereka masih menggunakan bahasa ibu dalam berkomunikasi sesama mereka, bahkan saat mereka berada di tempat publik. Hal ini membuat etnis lain merasa risi. Dalam kegiatan sosial, etnis Tionghoa cenderung menghindari kegiatan yang dinilai tidak menguntungkan etnis mereka. Kalau pun terlibat, keterlibatannya biasanya hanya dalam bentuk menyumbang dana.

Seperti diungkapkan di atas, sejarah panjang kebijakan segregasi baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah pasca-kolonial menjadi penyebab terasingnya etnis Tionghoa dari etnis-etnis lainnya. Segregasi menyebabkan sikap saling curiga sehingga masing-masing etnis saling menjaga jarak dengan yang lainnya. Etnis Tionghoa, kelompok yang selalu dipersepsi sebagai nonpribumi,

kemudian membangun “benteng”. Mereka fokus pada bidang ekonomi—satu-satunya area di mana mereka masih relatif bebas—dan mempererat ikatan di antara mereka sendiri. Inilah yang membuat mereka tampak eksklusif.

Perubahan kebijakan pascaruntuhnya Orde Baru tidak serta merta menghilangkan ketegangan antaretnis ini. Etnis Tionghoa sudah terlanjur kuat dalam bidang ekonomi. Dominasi mereka dalam bidang perdagangan sulit untuk ditandingi etnis lainnya, apalagi oleh orang-orang yang baru masuk.

Beberapa penelitian mengenai kota Medan, misalnya, menunjukkan bahwa keharmonisan relasi antaretnis dalam kota ini lebih dikarenakan populasi yang relatifimbang. Posisi ini membuat para pihak memilih untuk menjaga suasana damai karena konflik akan merugikan semua pihak.

Namun, bukan berarti tidak ada upaya dari beberapa pihak untuk melakukan pembauran antaretnis, untuk mengupayakan sebuah masyarakat yang lebih inklusif. Pengalaman pahit kerusuhan *anti-Cina* pada 1998 menyadarkan banyak pihak betapa destruktifnya kekerasan yang diakibatkan oleh kebencian etnis. Sebab itu, upaya-upaya pembauran banyak dilakukan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat.

Sumatra Utara sendiri telah memiliki sejarah panjang dalam pembauran antaretnis. Seabad yang

lalu, Kota Medan memiliki tokoh Tjong A Fie, seorang pengusaha Tionghoa nonmuslim yang sukses karena kepiawaiannya berelasi dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Ia dikenal sangat dermawan terhadap siapa saja. Ia dekat dengan Kesultanan Deli dan banyak membantu dalam pembangunan masjid. Salah satu masjid yang ia bangun adalah Masjid Lama Gang Bengkok yang sampai saat ini masih menjadi simbol pembauran antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa.

Saat ini, ada sosok dokter bernama Sofyan Tan. Ia adalah contoh betapa sulitnya hidup sebagai orang Tionghoa yang tidak kaya. Berangkat dari getirnya mendapatkan perlakuan diskriminasi, ia terinspirasi untuk membangun kesadaran pluralisme melalui pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci jika kita ingin membangun sebuah masyarakat yang tidak takut akan keberagaman.

### **Masjid Lama Gang Bengkok**

Masjid Lama Gang Bengkok merupakan salah satu dari tiga masjid paling bersejarah di kota Medan. Masjid yang atapnya mirip bangunan kelenteng ini dibangun oleh seorang Tionghoa nonmuslim. Sampai saat ini, bangunan ini masih menjadi simbol pembauran antara etnis Tionghoa dengan etnis Melayu.

Masjid Lama Gang Bengkok terletak di Kampung Kesawan, sebuah kampung di kota Medan yang memiliki banyak bangunan tua sebagai sejarah



Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan.

Sumber: Istimewa.

pembauran multietnis. Jalan Ahmad Yani yang menjadi lokasi masjid ini disebut juga sebagai Jalan Kesawan. Dulu, pada abad ke-19, hampir seluruh area ini milik Haji Mohammad Ali, yang dipanggil Datuk Kesawan.

Datuk Kesawan ini juga yang memberikan tanah wakaf untuk dibangun masjid. Sementara yang membangun adalah seorang saudagar kaya nonmuslim, Tjong A Fie. Proses pembangunan yang dilaksanakan pada 1890 ini sempat menuai kontroversi. Namun, karena mendapat izin dari pihak Kesultanan Deli, pembangunan diteruskan. Setelah selesai, kepengurusan masjid diserahkan ke pihak Kesultanan Deli.

Arsitektur Masjid Lama Gang Bengkok merupakan paduan antara arsitektur Tiongkok, Persia, Romawi, Timur Tengah, dengan ornamen Melayu. Bentuk bangunannya, terutama bagian atasnya, mirip dengan kelenteng. Atapnya melengkung dan terdapat empat tiang setebal

setengah meter yang menopang seluruh bangunan. Di bagian atas tiang terdapat patung buah jeruk dan anggur, salah satu ciri khas dalam arsitektur Tiongkok. Juga ada yang berbentuk stupa seperti di candi-candi.

Namun, semuanya akan berubah ketika memasuki bagian dalamnya. Terdapat mimbar terbuat dari kayu khas Timur Tengah. Mimbar ini memiliki tangga undakan bertingkat 13, digunakan sebagai tempat Khotbah sebelum Salat Jumat. Budaya Timur Tengah juga tampak pada gapura masjid.

Budaya Melayu terlihat dari dominasi warna kuning dan hijau serta sejumlah ornamennya. Di plafon masjid terdapat umbai-umbai, yaitu ornamen yang disebut “lebah bergantung”. Ukiran ini dibuat dari kayu, berbentuk semacam tirai berwarna kuning.

Tidak seperti umumnya masjid lain, Masjid Lama Gang Bengkok tidak memiliki nama Arab. Dinamakan Gang Bengkok karena dulu masjid ini berada di lokasi gang yang bentuknya bengkok. Saat ini, gang tersebut sudah menjadi jalan besar yang ramai dilalui kendaraan. Disebut masjid lama karena memang sudah berdiri sejak dulu, ketika Sultan Deli, Sultan Makmun Al Rasyid, naik takhta.

Masjid ini juga tidak memiliki ornamen kaligrafi Arab. Namun, hal tersebut tidak jadi masalah. Baik dari segi pembangunannya, nama yang dipakai, serta perpaduan budaya dalam arsitektur dan ornamennya justru

menjadi tanda adanya hubungan yang harmonis antaretnis di kota Medan, terutama antara etnis Melayu dan Tionghoa. Perbedaan tidak menjadi halangan untuk hidup bersama dan saling membantu.

Pada saat kerusuhan Mei 1998, masjid ini pernah menjadi tempat berlindung warga etnis Tionghoa. Saat itu, kondisi Medan sudah mencekam. Ada isu penyerangan terhadap etnis Tionghoa. Di kampung ini, etnis Melayulah bergerak untuk mengevakuasi etnis Tionghoa ke Kesawan, berlindung di Mesjid Lama Gang Bengkok.

Sampai saat ini, masjid bersejarah ini terus mempertahankan maknanya sebagai simbol persatuan dan persaudaraan antaretnis. Warga etnis Tionghoa pun tak segan-segan ikut merawat masjid ini.

### **Sekolah Pembauran**

Salah satu upaya untuk mencegah konflik dalam masyarakat multikultural adalah melalui pendidikan. Hal ini disadari oleh dr. Sofyan Tan. Sebab itu, ia kemudian mendirikan “Sekolah Pembauran” sebagai sarana untuk membentuk kesadaran untuk hidup bersama dalam perbedaan pada peserta didiknya.

Lembaga pendidikan tersebut ia namakan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Sekolah yang berdiri pada 1987 di Medan ini menekankan pendidikan multikultural. Setiap peserta didik diajarkan mengenai



dr. Sofyan Tan.

Sumber: [www.tempo.co](http://www.tempo.co).

nilai-nilai toleransi, cinta kasih, dan keberagaman. Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat menghargai perbedaan yang ada.

Sekolah ini mengaktualisasikan semboyan Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*. Pihak sekolah menyediakan 3 tempat ibadah (masjid, gereja, dan wihara) dan satu pendopo yang kerap dipakai oleh para murid yang beragama Hindu. Murid-murid difasilitasi dalam menjalankan ibadah dan perayaan keagamaan menurut kepercayaannya masing-masing. Juga, pihak sekolah mengupayakan interaksi dan pertukaran budaya untuk mendapatkan saling pengertian dan kesepahaman di antara para siswa bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan perbedaan adalah sebuah kewajaran.

Pihak sekolah juga berupaya agar masyarakat ekonomi rendah juga dapat bersekolah. Sofyan Tan sebagai pendiri tampaknya sadar, kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang harmonis antaretnis. Melalui program Anak Asuh Silang, Subsidi Berantai, dan Bantuan sosial dengan melibatkan

masyarakat luas, sekolah ini berupaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat tidak mampu untuk sekolah.

Yayasan Perguruan Iskandar Muda didirikan dr. Sofyan Tan berangkat dari pengalaman pahitnya mengalami diskriminasi. Karena mata sipitnya, ia harus mengulang ujian negara bidang kedokteran beberapa kali untuk satu mata kuliah. Padahal ia bukan orang kaya. Sofyan Tan yang lahir di Medan pada 25 September 1959 ini harus bekerja sebagai guru untuk membiayai kuliahnya.

Pengalaman hidup miskin dan diskriminasi yang diterimanya menginspirasi dr. Sofyan Tan untuk memperjuangkan pembauran antaretnis. Ia kemudian mendirikan sekolah dengan mengusung pendidikan multikultur. Langkah ini tergolong berani. Ia sendiri tidak mempunyai uang untuk membiayai sekolahnya. Dana untuk pendirian sekolah, ia dapatkan dari utang bank. Padahal sekolah yang ia dirikan dimaksudkan untuk menampung juga siswa-siswa tidak mampu. Teman-temannya menganggap tindakannya gila. Bagaimana mungkin orang miskin bisa mengentaskan orang lain dari kemiskinan, ujar mereka. Nyatanya sekolah itu masih berdiri sampai sekarang, menampung ribuan murid dari beragam latar belakang.

Atas kiprahnya dalam memperjuangkan pembauran ini, anggota DPR RI (2014-2019) Komisi

X bidang pendidikan ini dianugerahi Maarif Award pada 2014.

### **E. TOLERANSI ANTAR-AGAMA DI BALI**

Ledakan bom mengguncang Bali pada 2002 dan 2005. Dunia sontak terkejut. Bali yang dikenal sebagai surga dunia terakhir, Pulau Dewata yang sarat dengan kegiatan budaya dan keagamaan, dan salah satu pusat pariwisata dunia mengalami peristiwa teror yang merenggut hingga ratusan nyawa manusia.

Yang menarik dari kasus ini adalah respons masyarakat Bali terhadap peristiwa tersebut. Masyarakat Bali memang frustrasi dengan bom yang bukan hanya mengakibatkan korban manusia, tapi juga membuat perekonomian Bali yang banyak bersandar pada sektor pariwisata



Masjid Agung Ibnu Batutah dan Gereja Katolik Maria Segala Bangsa di Kompleks Puja Mandala, Nusa Dua, Bali menjadi saksi kerukunan antarumat beragama di Bali.

Sumber: KHOMAINI.



Monumen Ground Zero Bali atau tugu peringatan para korban Bom Bali, Legian, Kuta.

Sumber: KHOMAINI.

melesu. Berlalu sudah masa-masa jaya pariwisata Bali yang mendatangkan banyak sekali dolar.

Keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Bali yang multikultur juga sempat terganggu. Kecurigaan mayoritas masyarakat Bali yang beragama Hindu terhadap umat Muslim terjadi dikarenakan para pelaku bom memang membawa nama Islam dalam aksinya. Namun, kekerasan tidak merembet ke mana-mana. Orang Bali tidak melakukan sesuatu sebagai balasan seperti banyak yang terjadi di daerah lain di Indonesia. Bukannya mencari-cari siapa yang salah, pertamanya yang dilakukan masyarakat

Bali adalah menggelar upacara suci untuk menghilangkan kekotoran yang membuat jagat tidak seimbang, mengembalikan ke posisinya semula.

Sebenarnya, sejarah Bali bukannya tanpa kekerasan. Bali pernah mengalami ketegangan politik. Pasca-Indonesia merdeka, di Bali seperti juga di daerah lain, muncul beragam partai politik yang kerap bertabrakan. Situasi ini kemudian memuncak pada pertengahan 1960-an. Saat itu, terjadi pembantaian massal atas ratusan ribu tertuduh komunis tanpa melalui pengadilan yang jelas. Bahkan, bagi orang Bali sendiri, peristiwa ini menjadi tanda tanya besar. Mereka menikam sesama orang Bali. Padahal, orang Bali dikenal sangat religius, santun, bersahaja, dan begitu teguh memegang ajaran mereka yang mengutamakan keharmonisan dan keselarasan.

Namun, selama ratusan tahun, Bali membuktikan diri mampu mengelola perbedaan. Selain umat Hindu yang menjadi mayoritas, ada juga penganut Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sampai saat ini, hubungan antarumat agama terjadi dengan harmonis tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Keragaman bukannya tidak menimbulkan masalah dan gesekan, terutama jika terjadi dua peribadatan dari agama yang berbeda saling berbenturan, misal hari raya Nyepi yang jatuh pada hari Jumat atau tepat pada hari Lebaran. Namun, masyarakat Bali mampu menyelesaikan persoalan ini dengan dialog sehingga

dua peribadatan dapat tetap berlangsung dengan lancar.

Kearifan lokal yang dimilikinya membuat Bali mampu merawat keharmonisan dalam masyarakatnya yang multikultur. Ajaran Hindu Bali menekankan keselarasan baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, maupun dengan alam. Bali sendiri identik dengan Hindu. Ajarannya meresapi segala aspek kehidupan dan menjadi etos masyarakat Bali. Alhasil, mereka mampu mengintegrasikan masyarakatnya yang berbeda latar belakang budaya dan agama. Ini terjadi terutama dalam relasi antara penganut Hindu dengan masyarakat Muslim. Kedua agama ini banyak memiliki ritual yang bertentangan yang sangat mungkin menyebabkan konflik. Namun, masyarakat Bali dengan

kearifan lokalnya terbukti mampu menyelesaikan setiap masalah dengan jalan damai.

### **Bali sebagai Surga Dunia Terakhir**

Bali mulai menjadi perhatian para wisatawan sejak seabad lalu, tepatnya ketika maskapai pelayaran Belanda KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschapij*) melalui promosinya tentang Bali berhasil menarik minat penumpang-penumpang Eropa untuk mengunjungi pulau ini. Sejak itu, pulau yang ukurannya tidak besar ini (5.632,86 km<sup>2</sup>) atau sekitar 0,29% dari total luas kepulauan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit di dunia.

Alamnya yang sangat menawan, budaya yang unik tiada duanya, dan penduduknya yang ramah membuat pulau ini sangat terkenal di dunia. Tidak heran, pada 2015, majalah *Travel and Leisure* memberikan Bali predikat sebagai pulau wisata terbaik kedua setelah Kepulauan Galapagos di Ekuador, atau menjadi yang terbaik di Asia. Prestasi ini bukan yang pertama kali. Bali menjadi tiga besar pulau wisata terbaik dunia versi *Travel and Leisure* sejak 2009.

Begitu terkenalnya Bali di mata dunia sehingga banyak orang mengira Bali merupakan negara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari Indonesia. Beberapa orang yang datang ke Bali terkejut saat mereka tiba di bandara, mereka disambut oleh pihak imigrasi Indonesia dan bukan Bali. Fakta ini menunjukkan bahwa di mata



Bangunan Masjid, Gereja Katolik, dan Vihara berdiri berjajaran di Kompleks Puja Mandala, Nusa Dua, Bali.

Sumber: KHOMAINI.



dunia, Bali lebih terkenal ketimbang Indonesia.

### **Masyarakat Multikultur**

Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu menjadi anomali di Indonesia yang mayoritas muslim. Dalam agama Hindu di Bali, unsur-unsur lokal lebih banyak menonjol. Antara agama dengan adat istiadat terjalin erat sehingga sulit membedakan mana agama dan mana budaya.

Menyangkut praktik keagamaan Hindu, masing-masing daerah di Bali memiliki variasi lokalnya sendiri. Adanya variasi lokal itu justru memperkaya khasanah budaya dan justru menjadi corak masing-masing daerah di Bali. Budaya di Bali menjadi lebih beragam. Namun, dalam keberagaman corak ini, masyarakat Bali tetap memiliki kebersamaan dan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai ajaran Hindu. Tugas untuk merangkai kesatuan ini diemban oleh Majelis Agama Hindu, yang disebut Parisadha Hindu Dharma.

Selain umat Hindu, ada juga penganut agama lain yang tinggal di pulau ini, seperti penganut Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Sebagian masyarakat non-Hindu adalah para pendatang. Sebagian lain, merupakan penduduk Bali asli, terutama pada perkampungan-perkampungan Islam di Bali, seperti Pegayaman di Buleleng, Loloan di Jembrana, serta Kapaon dan Gelgel di Denpasar. Kampung-kampung Islam ini

sudah ada di Bali sejak ratusan tahun lalu. Di Bali juga banyak bermukim orang-orang Tionghoa. Sebagian dari mereka, khususnya yang berada di pedesaan, telah menyatu dengan masyarakat dan kebudayaan Bali.

Keragaman budaya di pulau Bali bertambah lagi dengan membanjirnya turis-turis ke Bali dari berbagai negara di dunia. Mereka membawa budaya dan cara hidupnya masing-masing. Di antara mereka, ada yang akhirnya memilih menetap di Bali. Kedatangan mereka membuat tempat-tempat wisata, seperti Kuta, tak ubahnya perkampungan internasional. Berbagai bahasa dunia bercampur. Bali menjadi sebuah tempat yang benar-benar multikultur.

Yang menarik, di tengah gempuran berbagai budaya Barat yang dibawa para turis itu, masyarakat Bali tetap mampu mempertahankan tradisi yang menjadi identitasnya. Di rumah-rumah, orang-orang tetap menggunakan bahasa Bali. Upacara melasti di pantai tetap berlangsung dengan khusyuk, tak terganggu oleh turis-turis berbikini nyaris telanjang sedang berjemur di sekitarnya.

Memang, masyarakat Bali umumnya tidak menganggap keragaman agama dan budaya sebagai ancaman terhadap identitas kebalian mereka. Mereka punya masalah lain. Turisme membawa banyak perubahan. Di satu sisi, turisme menjadi andalan Bali untuk meraih kemakmuran. Namun, turisme pula yang membuat seni Bali yang sakral menjadi barang tontonan, tanah-tanah adat menjadi tempat pelesir,

sehingga orang Bali tidak lagi leluasa melaksanakan ritualnya. Merangseknya bisnis turisme ke wilayah-wilayah sakral yang menjadi sendi-sendi utama peradaban mereka inilah yang menjadi keprihatinan sebagian masyarakat Bali.

Meski demikian, tidak sedikit juga pandangan optimis bahwa masyarakat Bali mampu bertahan menghadapi perubahan yang diakibatkan turisme. Menurut mereka, komersialisasi seni dan produksi cenderamata tidak mengakibatkan pendangkalan nilai. Sebaliknya, justru memacu para seniman untuk terus berkreasi. Mereka percaya bahwa masyarakat Bali mampu mempertahankan yang sakral sambil terus menciptakan produk-produk baru untuk ditawarkan ke wisatawan.

### Nilai Toleransi dalam Ajaran Hindu Bali

Ajaran Hindu begitu mewarnai masyarakat Bali. Ajaran ini pula yang menjadi landasan bagi masyarakat untuk membangun sebuah kehidupan yang harmonis dalam keberagaman. Salah satunya terdapat dalam Kitab Rg Weda X. 191, 2-4 yang secara bebas diartikan “Hendaklah bersatu padu, bermusyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan dan maksud yang sama, seperti para Dewa pada zaman dahulu telah bersatu padu. Begitu juga, bersembahyanglah menurut caramu masing-masing, tetapi tujuan dan hatimu tetap sama, serta pikiranmu satu, agar dikau dapat hidup bersama dengan bahagia.”

Dalam konsep Tri Hita Karana, nilai keselarasan diperluas, bukan hanya dengan sesama manusia, tapi juga dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam. Filosofi khas Hindu Bali ini mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia akan dapat dicapai bila manusia mampu menjaga keharmonisan hubungan dalam 3 hal, yaitu dalam hubungannya dengan *Parhyangan* (unsur Ketuhanan), *Pawongan* (manusia), maupun *Palemahan* (unsur alam).

Dengan kata lain, manusia dapat mencapai kebahagiaan jika ia mengabdikan pada Tuhannya, mengasihi sesama manusia, dan turut serta dalam menjaga kelestarian alamnya. Konsep inilah yang menjadi modal utama masyarakat Bali dalam menjamin kehidupan yang toleran dalam keberagaman.

Konsep Tri Hita Karana kemudian melahirkan konsep *nyama braya*, yaitu hidup rukun dan damai dalam persaudaraan. Sikap *menyama braya* orang Bali itu merupakan pengamalan ajaran Hindu *tat twam asi* (kamu adalah aku), pegangan hidup yang mengajarkan agar manusia senantiasa mencintai sesama. Nilai ini kemudian menjadi dasar dalam membangun sikap toleransi dan kerukunan dalam masyarakat yang multikultural.

Konsep lain yang berkaitan dengan nilai toleransi adalah konsep *Desa Kala Patra* yang menggambarkan fleksibilitas yang dimiliki orang Bali. Konsep ini pula yang menyebabkan bentuk luar

agama Hindu yang dalam pelaksanaan kegiatan agama di masing-masing daerah Bali memiliki ciri sendiri-sendiri. Kitab suci boleh sama, tetapi cara pengamalan bervariasi karena disesuaikan dengan *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan). Inilah yang menyebabkan—meski bersumber pada Hindu yang sama—masing-masing daerah di Bali memiliki praktik keagamaan berbeda.

Juga ada konsep *karmaphala* yang menyangkut hukum sebab akibat. Dengan falsafah ini, masyarakat Bali dibimbing untuk berpikir lurus, karena apa yang mereka alami sekarang, sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang diperbuat sebelumnya, sedang apa yang akan mereka alami kelak sangat tergantung dari apa yang mereka kerjakan sekarang.

Demikian orang Bali dengan konsep *karmaphala* selalu memandang setiap musibah yang mereka alami sebagai peringatan bagi diri mereka sendiri bahwa ada yang tidak benar, ada yang menyimpang. Penyimpangan ini mengakibatkan keseimbangan alam terganggu. Menghadapi musibah yang terjadi, yang mereka lakukan bukanlah mencari siapa yang salah atau yang bisa disalahkan. Tetapi, mengadakan upacara sebagai bentuk penyerahan diri agar keseimbangan kembali terjadi.

### Integrasi pada Ranah Sosial-Budaya

Integrasi pada ranah sosial-budaya terasa sekali dalam relasi antara



Tradisi Ngejot di Bali.

Sumber: Istimewa.

masyarakat mayoritas Hindu dengan umat Islam di Bali. Sejarah masuknya Islam ke pulau Bali sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Pada abad XVI, kerajaan-kerajaan Hindu di Bali, seperti kerajaan Gelgel di Klungkung, Kerajaan Pamecutan (Badung), dan Kerajaan Buleleng memiliki banyak pengiring dan prajurit yang direkrut dari orang-orang Islam. Prajurit yang direkrut dari orang-orang Islam ini bekerja sama dengan prajurit yang beragama Hindu dan mereka setia mengabdikan kepada raja-raja Hindu di kerajaan-kerajaan tersebut.

Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para pengiring dan prajurit yang direkrut dari orang-orang Islam itu, kerajaan Hindu tersebut mengizinkan dan memberikan suatu area khusus pemukiman untuk ditempati oleh orang-orang Islam. Gelgel dan Kepaon, misalnya, adalah

tanah pemberian raja-raja Hindu untuk ditempati oleh orang-orang Islam. Sampai sekarang di kedua kampung ini banyak ditemui orang-orang Islam yang secara turun-temurun tinggal di sana dan berinteraksi dengan masyarakat Hindu.

Penganut Hindu yang mayoritas juga sering kali “melibatkan” atau mengundang umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan mereka, baik kegiatan keagamaan atau kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan dan penerimaan terhadap umat Islam.

Relasi antarumat melahirkan berbagai tradisi sebagai jalan untuk mempererat hubungan. Di antaranya tradisi *ngejot*. Istilah *ngejot* dalam bahasa Bali berarti memberi. *Ngejot* merupakan tradisi memberikan makanan menjelang hari raya kepada tetangga yang berbeda agama. Penganut agama yang akan merayakan hari rayanya mengantar aneka rupa menu khas Bali baik berupa camilan ataupun makanan berat, yang disebut dengan *jotan*. Isinya aneka rupa menu khas Bali, seperti nasi campur, ayam betutu, dan jukut ares (sayur dari batang pisang). Selain makanan, ada juga kue dan camilan, seperti jaja kukus, jaja uli, begina, dan tape ketan.

Saat hari raya Lebaran, orang-orang Islam di beberapa daerah Buleleng melakukan tradisi *ngejot* kepada tetangganya yang beragama Hindu. Begitu pula masyarakat Hindu di Buleleng, saat hari raya

Galungan, Kuningan, atau hari raya lainnya, mereka juga *ngejot*, yaitu memberikan makanan, buah-buahan atau jajanan kepada masyarakat muslim tetangganya.

*Ngejot* tidak hanya berfungsi untuk membagi makanan, tetapi juga untuk membagi kebahagiaan. Saat mengantarkan *ngejot*, orang akan memberikan selamat pada yang merayakan hari raya. Dalam hal ini, *ngejot* merupakan tradisi lokal dalam merayakan keberagaman di Bali. Perbedaan tidak dianggap sebagai batasan, tetapi sebagai sarana untuk saling mengisi.

Jika terjadi masalah karena bentroknya pelaksanaan ibadah kedua agama, masalah tersebut akan diselesaikan dengan dialog dan diambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Misalnya, perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari Jumat. Maka, dibuatlah sistem agar umat Islam tetap bisa melaksanakan salat Jumat tanpa mengganggu umat Hindu dalam melaksanakan ibadah Nyepinya, yaitu (1) ibadah Jumat di masjid dilaksanakan tanpa pengeras suara, (2) bagi umat muslim yang terpaksa harus melewati desa adat untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka *pecalang* akan mengantarkannya.

Pernah juga Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri terjadi secara bersamaan, tepatnya pada 1994 dan 1995. Kedua perayaan tersebut tetap berlangsung dengan lancar karena masing-masing mau berkorban. Umat

Islam dengan sukarela tak melakukan pawai takbir dan menggunakan pengeras suara. Sementara umat Hindu merelakan umat Islam melakukan takbir di musala dengan menggunakan lampu.

Masyarakat Bali juga peduli dan turut membantu perayaan Islam. Misalnya, umat Islam dipersilakan menggunakan Lapangan Badung yang terletak di kota Denpasar untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Secara tradisional, Lapangan Badung ini biasanya dipakai oleh umat Hindu saat mereka menyelenggarakan upacara hari-hari besar keagamaan dan upacara persembahyangan bersama.

Organisasi sosial masyarakat Bali pun, meski sangat terkait dengan kehinduan, memberi tempat pada umat Islam. Banjar Adat memiliki tradisi *sima karma*, yaitu upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat baik dalam bentuk saran, masukan hingga kritik, yang diadakan sebulan sekali dengan tidak melihat latar belakangnya. Mereka yang datang dalam forum *sima karma* bisa berdialog dengan bebas tanpa memandang perbedaan agama.

Koeksistensi juga terjadi dalam organisasi subak yang beranggotakan petani Hindu dan Islam sebagaimana yang terjadi pada subak Pancoran,



Upacara Melasti sebagai rangkaian Hari Raya Tahun Baru Saka atau Hari Raya Nyepi.

Sumber: [www.balimediainfo.com](http://www.balimediainfo.com).

Tegalinggah, Pemogan, dan Banyubiru. Tradisi Subak merupakan organisasi pengairan tradisional masyarakat Bali. Tradisi ini erat dengan ritual Hindu. Tentu saja, saat umat muslim menjadi anggota subak, terjadi berbagai penyesuaian sehingga mereka menjalankan ritual menurut agama yang mereka anut.

Pada ranah budaya, peminjaman budaya merupakan hal yang umum. Pada bidang kesenian misalnya, ada *geguritan Ahmad Muhammad*. Kidung ini tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat Hindu. Khususnya di Desa Pamogan, *Kidung Ahmad Muhammad* merupakan perlengkapan penting pada saat berlangsung upacara melasti sebagai rangkaian Hari Raya Tahun Baru Saka atau Hari Raya Nyepi. Umat Hindu di Desa Pamogan membuat sesajen khusus terbuat dari jajan. Pada saat sesajen dipersembahkan, dinyanyikanlah *Kidung Ahmad Muhammad*. Setelah itu, sesajen ditutupi dengan kain putih yang dibentuk menyerupai kubah. Kubah mengingatkan pada kubah dalam Masjid. Dalam konteks kehinduan, kubah bisa pula bermakna sebagai alam semesta.

Peminjaman budaya juga terjadi dalam tradisi pemberian nama. Masyarakat Hindu Bali memiliki penanda yang khas dalam hubungannya dengan pemberian nama berdasarkan urutan kelahiran seseorang. Dari namanya dapat diketahui orang tersebut adalah anak pertama, kedua,



Upacara Melasti di Bali, salah satu tradisi keagamaan umat Hindu yang dilangsungkan di pinggir pantai.

Sumber: Ida Bagus Putra Adnyana, *Bali: Ancient Rites in the Digital Age* (Indonesia: BAB Publishing, 2016), h. 1.

ketiga, dan seterusnya. Dalam budaya Bali dikenal adanya empat nama sebagai penanda urutan kelahiran. Di samping itu juga dikenal nama Wayan/Gede/ Putu, Nengah, Made, Nyoman dan Ketut. Masyarakat Islam di Pegayaman menggunakan tradisi penamaan Bali ini pada nama-nama yang mereka berikan.

Kemudian ada tradisi *Nyapar* yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Buleleng, contohnya di desa Pegayaman. Safar atau *Nyapar* dilaksanakan setiap tahun hari Rabu minggu terakhir di bulan Safar (bulan kedua dalam penanggalan Hijriah) pada sore hari. Mereka pergi ke pantai untuk mengaji, berzikir, dan berdoa. Kemudian mereka makan bersama. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas semua *rizki*

dan berdoa memohon keselamatan, juga sebagai kegiatan untuk menolak bala. Umat muslim di Bali, tidak hanya di Pegayaman, masih meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan sial atau bulan bencana. Dalam tradisi Hindu, kegiatan keagamaan yang dilakukan di pinggir pantai adalah upacara melasti.

Pengaruh budaya Hindu pada tradisi Maulud Nabi. Saat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw., umat Islam di Kabupaten Buleleng Bali membuat *bale suji* yang kemudian diarak terlebih dahulu sebelum diletakkan di dalam masjid. *Bale suji* ini mengingatkan kita pada *ogoh-ogoh* yang diarak umat Hindu menjelang Hari Raya Nyepi.

Masih banyak lagi tradisi masyarakat Bali yang menggambarkan keharmonisan umat Hindu dan Muslim, di antaranya tradisi *megibung* di Karang Asem, adanya *banten Selam* (sesajen Islam) dalam upacara *Sugihan Jawa*, dan upacara *Ngusaba Dangsil* di Bungaya yang melibatkan *Nyama Selam* (Islam) pada puncak acaranya.



Tradisi *Megibung*, sebuah potret keharmonisan antarumat beragama di Bali.

Sumber: [www.menara-fm.com](http://www.menara-fm.com).

## Bom Bali, Tantangan bagi Kedamaian

Peristiwa peledakan bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002 (Bom Bali I) di Sari Club, Paddy's Pub, dan Kantor Konsulat Amerika Serikat. Korban meninggal tercatat sebanyak 202 orang dan melukai sekitar 209 orang. Di samping itu, 4 buah bangunan roboh, 20 bangunan rusak berat, 27 mobil rusak berat, dan 7 motor rusak berat.

Kasus peledakan bom kembali terjadi pada 1 Oktober 2005 (Bom Bali II) di tiga tempat, yaitu Rajas's Cafe Kuta Square, Menega Café, dan Cafe Nyoman Jimbaran. Kejadian ini menyebabkan 23 orang meninggal dan 196 orang luka.

Peristiwa bom Bali membawa akibat langsung pada Pulau Bali. Kunjungan wisata menurun hampir 80% beberapa hari pascaperistiwa tersebut. Penurunan terjadi karena beberapa negara, seperti Jepang, Inggris, Amerika, Singapura, Taiwan, dan Australia menerapkan larangan berkunjung ke Indonesia, khususnya Pulau Bali bagi warga negara mereka. Hingga muncul istilah "sebelum bom" yang merujuk pada masa kejayaan pariwisata Bali.

Dalam bidang sosial, muncul keretakan antara kelompok masyarakat dan kelompok lain karena adanya sikap saling curiga. Hal ini terlihat dari pemberitaan mengenai penyelidikan ke beberapa pesantren dan tempat yang dicurigai. Harmoni sosial yang tercipta sebelumnya terganggu.



Barong dan Randa dimainkan dalam ritual drama Calonarang. Keduanya dimainkan oleh penari yang mengenakan topeng dan kostum.

Sumber: Ida Bagus Putra Adnyana, *Bali: Ancient Rites in the Digital Age* (Indonesia: BAB Publishing, 2016), h. 119.

### Respons atas Bom Bali

Orang Bali pun mengerti, bahwa tindakan terorisme ini pun mengarah ke mereka karena banyak orang Bali yang turut menjadi korban. Namun, meski orang Bali mengutuk tindakan kekerasan ini, seperti yang diungkapkan oleh Annette Hornbacher, respons orang Bali berbeda dengan tanggapan masyarakat Barat (Hornbacher 2009: 34-53).

Menanggapi teror yang terjadi pada 2001, Presiden Bush menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut bukan hanya menyerang Amerika Serikat, tetapi nilai-nilai peradaban dan meminta masyarakat dunia untuk bersatu membasmi kejahatan ini.

Masyarakat Barat memahami perang melawan terorisme sebagai perang Kebaikan melawan Kejahatan.

Dan, Kejahatan hanya bisa dilawan dengan kekuatan senjata. Nilai-nilai kemanusiaan hanya bisa dipertahankan melalui “perang suci” melawan para ekstremis.

Pandangan ini berangkat dari pemahaman monoteisme yang memahami Tuhan Pencipta hanya menciptakan kebaikan saja. Segala sesuatu yang buruk berasal dari Kejahatan (*Evil*) yang merupakan lawan dari Kebaikan. Pemahaman teodisi ini menjadi basis tindakan “perang suci” melawan kejahatan, termasuk di dalamnya terorisme.

Namun, orang Hindu Bali memiliki pemahaman yang berbeda. Masyarakat Hindu Bali tidak mengenal konsep Tuhan sebagai pencipta segala kebaikan, juga Kejahatan absolut dan peperangan sebagai penyelamatan akhir. Perbuatan buruk yang dilakukan *leak* misalnya, tidak dipahami sebagai Kejahatan transenden yang telah mengendalikan pikiran manusia, tetapi sebagai sikap banal manusia, seperti sikap iri hati. Kekuatan yang dimiliki *leak*, yang ia gunakan untuk melakukan kejahatan, secara moral bernilai netral.

Pemahaman ini terkandung dalam ritual drama *Calonarang*. Pada drama ini, *Rangda* yang membawa bencana wabah penyakit dan kehancuran pada masyarakat harus diseimbangkan melalui pertarungan dengan *Barong*. Keduanya dimainkan oleh penari yang mengenakan topeng dan kostum. Poin penting dalam pertarungan sakral ini adalah bahwa pertarungan ini tidak



ditujukan untuk menghancurkan *Rangda* sebagai perwujudan dari Kejahatan atau sebagai penyelamatan selamanya dari bencana yang terjadi, tetapi sebagai keseimbangan sementara pada dua kekuatan yang bertentangan demi keberlangsungan kehidupan manusia.

Artinya, *Rangda* dan *Barong* adalah dua kekuatan yang dimiliki dunia yang meski saling berlawanan, keduanya diperlukan demi keseimbangan dunia. Dari sudut pandang Hindu Bali, *Rangda* sama sucinya dengan *Barong*, karena itu tidak bisa dikatakan sebagai Kejahatan dalam pandangan monoteis. Keduanya bersifat sakral dan menjadi objek pemujaan.

Pandangan ini menjadi dasar bagaimana sikap masyarakat Bali terhadap teror Bom Bali. Hornbacher menyebut sikap hidup (etos) orang Bali bersifat kosmosentris. Berbeda dengan etika antroposentris orang Barat yang menekankan manusia sebagai subjek dan agen tindakan, etos orang Bali menempatkan tanggung jawab manusia dalam lingkup alam semesta secara keseluruhan di mana tindakan manusia menjadi bagian darinya. Implikasinya pada kasus bom Bali adalah bahwa penyelesaian terhadap kasus tersebut tidak terbatas pada tindakan subjektif manusia untuk memaafkan atau menghukum pelaku teror semata, tapi meluas pada hubungan manusia dengan alam semesta. Manusia memiliki tanggung jawab tidak sebatas hanya pada sesama manusia, tetapi



Barong dan Rangda.

Sumber: [www.anacaraka.co.id](http://www.anacaraka.co.id).

bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam semesta.

Alih-alih mengadakan serangan balasan, masyarakat Bali mengadakan ritual penyucian, dan deklarasi perdamaian berlangsung hampir di semua wilayah pulau, terutama di Kuta yang menjadi lokasi peledakan. Bagi orang Bali, langkah pertama yang harus diambil adalah mengembalikan keseimbangan melalui berbagai macam upacara keagamaan. Intinya, ketika kekuatan “jahat” mengguncang keseimbangan, solusinya bukanlah menghancurkan kekuatan jahat itu dengan kekerasan yang hanya akan menambah masalah. Yang mereka lakukan adalah memperkuat kekuatan “baik” melalui berbagai ritual sehingga keseimbangan terjadi.

Hal ini membuat Bali tidak seperti daerah lain. Di Jawa, Maluku, Sumatra, dan Sulawesi, kekerasan atas nama agama akan memprovokasi tindakan balas dendam. Mayoritas masyarakat Bali tidak melakukannya. Memang ada percikan-percikan tindakan balas dendam, tapi hanya dilakukan oleh

kelompok kecil yang langsung bisa ditangani karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat luas. Sikap masyarakat Bali ini cukup mengejutkan, mengingat besarnya dampak yang diderita oleh masyarakat Bali akibat serangan bom yang terjadi dua kali.

Memperkuat kekuatan “baik” juga berarti introspeksi terhadap diri mereka sendiri. Orang Bali sering menanggapi musibah sebagai tanda bahwa mereka telah keluar dari dharma sehingga ketidakbaikan menjadi dominan dan hidup menjadi tidak lagi seimbang. Musibah-musibah tersebut menjadi tanda bagi mereka untuk kembali pada *dharma*. Ritual-ritual dilakukan untuk meluruskan kembali setiap penyimpangan sehingga hidup kembali seimbang. Dengan ini, kedamaian akan kembali terjadi.

### Desa Muslim Pegayaman

Desa Pegayaman adalah sebuah perkampungan Islam di Pulau Bali yang masyarakatnya mayoritas Hindu. Terletak di Kecamatan Sukasada, Buleleng, tepatnya sembilan kilometer sebelah selatan Kota Singaraja, Bali bagian utara. Oleh masyarakat Bali, mereka disebut *Nyama Selam*. Masyarakat Bali pedesaan menyebut Islam itu Selam, mereka tak biasa mengucapkan kata awal *Is*.

Warga muslim Pegayaman ini bukanlah warga pendatang baru, mereka warga Bali asli. Agama Islam sudah berkembang di daerah ini setidaknya sejak abad ke-18 M. Dan,



Banten Selam (sesajen Islam) menjadi sajian yang harus dibawa dalam upacara Sugihan Jawa menggambarkan keharmonisan umat Hindu dan Islam di Bali.

Sumber: Ida Bagus Putra Adnyana, *Bali: Ancient Rites in the Digital Age* (Indonesia: BAB Publishing, 2016), h. 8.

sejak awal sudah terjalin hubungan yang harmonis antara mereka dengan masyarakat Hindu Bali.

Mereka pun banyak menyerap budaya Hindu Bali. Akulturasi budaya terjadi begitu baiknya. Seperti dalam penggunaan bahasa, tata sosial masyarakat, dan tradisi pemberian nama, masyarakat Pegayaman tak ubahnya seperti masyarakat Bali pada umumnya.

Akulturasi budaya juga tampak jelas pada bidang kesenian keagamaan yang mereka kembangkan. Pada bulan Maulud, ada pertunjukan kesenian khas Pegayaman dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad saw., yakni *burda*. Dalam pertunjukan ini dilantunkanlah selawat dengan iringan musik tetabuhan. Alat tabuh yang digunakan semacam rebana, cuma lebih besar karena tubuhnya dibuat dari batang pohon kelapa.

Sekeaa burda ini memakai pakaian tradisional Bali, sama dengan pakaian



Masjid Jamik Safinatussalam merupakan masjid tertua di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng. Umat Muslim di desa ini banyak menyerap budaya Hindu Bali.

Sumber: [www.pagayamanvillage.blogspot.com](http://www.pagayamanvillage.blogspot.com).

orang di luar Pegayaman. Memakai destar, berkain yang ujungnya meruncing di tengah, atau istilah Bali, mekancut.

Meski dinyanyikan dalam bahasa Arab, nada lagu selawatan dalam pertunjukan ini mirip *Kidung Wargasari* yang dikenal di kalangan umat Hindu Bali. Di tengah-tengah *sholawatan*, ada juga pertunjukan tari, dengan pakaian dan gerak yang seirama dengan kesenian tradisional khas Bali. Namanya tari Selendang, Tari Tampan, Tari Perkawinan, dan Tari Pukul Dua.

Pekerjaan pokok penduduk Pegayaman bertani dan berkebun. Kalau panen kopi, penduduk sekitar Pegayaman—yang Hindu—ramai-ramai ikut berburuh memetik ke Pegayaman. Tak ada masalah. Mereka bekerja bersama tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan.

Warga Pegayaman pun mengenal subak, tata organisasi pengairan khas

Bali yang terkenal itu. Lengkap dengan upacara religiusnya. Di luar Pegayaman, organisasi subak lekat benar dengan upacara Hindu. Di Pegayaman, tentu dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Orang Pegayaman juga punya *sekeaa manyi* (perkumpulan menuai padi) dan *sekeaa malapan* (perkumpulan memetik kopi). Semangat gotong-royong mereka dalam membangun rumah, apalagi masjid, begitu kuat, tak kalah dengan masyarakat Hindu di sekitarnya. Hanya pakaian keseharian yang mereka kenakan saja yang membedakan mereka dari orang Bali di luar Pegayaman, yaitu *kopiah* untuk lelaki dan *kerudung* untuk perempuan.

Satu lagi yang unik, sama seperti masyarakat Hindu, masyarakat muslim Pegayaman juga memiliki tradisi Nyepi. Jika Nyepi dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap tahun baru Saka, umat Islam Pegayaman melaksanakan Nyepi untuk menyambut bulan Ramadan. Nyepi itu bertujuan untuk membersihkan hati. Tata cara pelaksanaannya mirip dengan tirakat yang biasa dilaksanakan warga Muslim di Jawa. Keunikannya terletak pada pembacaan selawat dengan tembang umat Hindu. Di sini tampak bersinerginya agama dan budaya.

### Ibu Gedong Bagoes Oka

Ibu Gedong Bagoes Oka dikenang sebagai tokoh cendekiawan dan spiritual Hindu yang memperjuangkan nilai kemanusiaan melalui gerakan antikekerasan. Ia adalah seorang aktivis



Tari Janger.

Sumber: KHOMAINI.

Tari Kecak Bali.

Sumber: KHOMAINI.



lintas agama yang percaya bahwa perbedaan agama tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menghormati kemanusiaan.

Pada 1976, Ibu Gedong mendirikan Ashram Gandhi di Desa Candidasa, di pantai timur Bali, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengelola ashram itu.

Ashram yang dikelola Ibu Gedong menyediakan pendidikan untuk anak yatim dan anak dari keluarga tak mampu. Selain masyarakat lokal, ashram juga menjadi tempat bagi orang asing dari segala umur dan latar belakang agama guna memperdalam keyakinan religiusnya dalam suasana meditatif.

Kegiatan sehari-hari di ashram di antaranya doa bersama, yoga, meditasi, dan bentuk yang lebih sederhana dari ritual api suci dalam kitab suci Weda, *Agnihotra*. Murid-murid di ashram juga mendapat kesempatan untuk mempelajari literatur suci di perpustakaan ashram itu.

Tak hanya itu, juga terdapat kegiatan pertukangan, menganyam, mengobati, menjahit, pertanian, dan kebudayaan di ashram ini. Dengan semangat *svadeshi*, Ibu Gedong juga terlibat dalam berbagai proyek kerja yang bertujuan untuk membangkitkan pertanian bersama masyarakat setempat.

Dari hasil perenungannya, Ibu Gedong sampai pada kesimpulan bahwa agama Hindu di Bali sangat terpengaruh oleh budaya Bali yang penuh dengan kompleksitas sistem ritual dan ketatnya

sistem kasta. Beliau ingin memperbaiki hal ini. Oleh sebab itu, Ibu Gedong melakukan pembaruan dengan mengajarkan Hindu yang reformatif, demokratis, dan toleran.

Hindu, menurut Ibu Gedong, adalah agama yang abadi dan universal (*sananta dharma*), terutama karena berdasarkan pada kitab Weda dan Vedanta. Juga, karena nilai-nilai kehinduan sebenarnya juga terdapat dalam kitab Injil atau Al-Qur'an.

Ibu Gedong dengan tak kenal lelah meyakinkan masyarakat untuk mengamalkan Hindu yang lebih menekankan nilai religius dan spiritual, dan jangan terlalu terbelit oleh persoalan ritual yang *njelimet*. Ia mengganti simbol-simbol yang berupa sesajen dengan puja yang panjang. Meski demikian, beliau tidak pernah mengecam tradisi Hindu Bali, seperti yang dilakukan banyak pemikir muda Hindu lainnya.

Selain mengelola Ashram Gandhi Candidasa, Ibu Gedong masih meluangkan waktunya untuk sesekali mengajar Bahasa Inggris di Universitas Udayana. Ia juga memberi kuliah mengenai spiritual Hindu dalam berbagai forum, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Secara reguler, ia datang ke India atas undangan Gandhi Peace Foundation.

Pada 1994, dia menerima penghargaan 'International Bajaj Award' dari the Bajaj Foundation di Bombay atas usahanya yang tak kenal lelah menyebarkan ajaran Mahatma

Gandhi. Pada 1996, Ibu Gedong mendirikan Ashram Bali Gandhi Vidyapith di Denpasar, sebuah ashram yang khusus mendidik mahasiswa di universitas lokal tentang pemikiran Gandhi.

Belakangan, Ibu Gedong juga mendirikan ashram serupa di Yogyakarta. Tidak hanya orang Hindu yang datang ke ashram tersebut, tapi juga umat Muslim dan Kristen.

Ibu Gedong dikenal selalu memperjuangkan harmoni dan kerukunan antarumat beragama. Dia berhasil membangun hubungan konstruktif berdasarkan pikiran terbuka dengan berbagai tokoh dari berbagai agama, di antaranya Gus Dur, Romo Mangunwijaya, Dr. Th. Sumartana, dan Dr. Eka Darmaputera.

Bersama mereka, ia memperjuangkan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan. Baginya, perbedaan agama seharusnya tidak menjadi sumber konflik karena inti dari setiap agama yang sebenarnya adalah berbuat baik. Maka, jika orang benar-benar meyakini dan menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh, ia akan menjadi pejuang kemanusiaan yang sebenarnya.

## F. TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki catatan panjang dalam mengelola kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. Provinsi berpenduduk sekitar 3,5 juta



Parade rakyat menyambut HUT RI ke-62 di Plengkung Gading Alun-alun Keraton Yogyakarta.

Sumber: KHOMAINI.

jiwa itu sejak lama telah ditinggali warga dengan latar agama, keyakinan dan etnis beragam. Berbagai situs peninggalan dari masa lalu pun menjadi saksi bisu betapa kayanya warisan masa silam, baik dari sisi budaya, kebiasaan, agama dan keyakinan.

Meski demikian, Yogyakarta bukanlah daerah yang benar-benar bebas dari gangguan konflik dan ancaman perpecahan. Aneka konflik berlatar belakang isu keagamaan memang sempat muncul hingga sempat mengganggu keharmonisan hidup di wilayah itu. Namun, pengalaman panjang hidup berdampingan segera dapat mengatasi berbagai persoalan yang mengusik tersebut. Bahkan, kesiapan warga dan aparat Pemerintah Kota Yogyakarta—salah satu daerah dalam DIY Yogyakarta—dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan sehari-hari membuat Kota

Gudeg itu dijuluki sebagai Kota Toleran (*City of Tolerance*).

Penyematan *City of Tolerance* oleh Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (Aji Damai) pada Maret 2011 itu bukan tanpa alasan. Yogyakarta dianggap sebagai jantung kebudayaan Jawa yang dikenal sebagai kota yang setia menjaga nilai dan tradisi budaya Jawa. Salah satu nilai pokok yang menjadi pegangan hidup dan etika masyarakat Yogyakarta adalah hidup rukun, saling menghormati dan penuh tenggang rasa atau toleran. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tenteram, tanpa perselisihan dan pertentangan. Inilah yang menjadi alasannya.

Namun, berbagai catatan kelam terus-menerus menggerus kerukunan dan keharmonisan yang berlangsung di daerah ini. Merujuk catatan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), sepanjang tahun 2015 hingga Maret 2016, aneka kasus intoleransi muncul bergantian. Misalnya, penutupan Gereja Pantekosta di Indonesia (GpDI) Semanu dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GpDI) Playen padahal kedua rumah ibadah tersebut telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penolakan acara perayaan Paskah Adiyuswo Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gunungkidul yang disertai penganiayaan terhadap aktivis lintas iman, intimidasi dan kekerasan terhadap kegiatan diskusi tentang Syiah, intimidasi terhadap LGBT, dan pembubaran diskusi lintas agama.

Contoh lain yang bisa disebut yakni penutupan pondok pesantren Waria Al-

Fattah di Dusun Celenan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan. Tindakan intoleran yang terjadi sejak 2011 terus berlangsung hingga pertengahan 2016 dengan angka peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Pada 2015 lalu, ANBTI mencatat sekitar 13 kasus intoleransi terjadi di DIY. Berbagai kalangan mengkhawatirkan meningkatnya angka kekerasan lantaran tidak ada tindakan tegas dari aparat pemerintah daerah.

Penelitian lain datang dari The Wahid Institute. Dari data yang dirilis pada tahun 2014, Yogyakarta menempati urutan kedua sebagai kota paling tidak toleran di Indonesia. Dari total 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat Wahid Foundation sepanjang tahun 2014, 21 peristiwa terjadi di Yogyakarta. Setahun kemudian, 2015, peringkat Yogyakarta sebagai kota intoleran turun ke nomor empat. Dari 190 pelanggaran yang dicatat Wahid Institute, 10 terjadi di kota pelajar itu.

Dua riset memang tidak serta merta mengubur predikat Kota Toleran yang dimiliki Yogyakarta, namun menjadi ujian serta pekerjaan rumah yang perlu dijawab secara serius oleh aparat pemerintahan dan segenap warga Daerah Istimewa Yogyakarta melalui tindakan nyata. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyebut sifat terbuka (inklusif) yang dimiliki segenap warga sebagaimana tersirat dalam

budaya Jawa merupakan modal utama yang dimiliki masyarakat Yogyakarta untuk memperkuat demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sri Sultan mendorong warganya untuk terus berupaya membangun Yogyakarta sebagai pelaku utama yang membentuk toleransi dengan dipayungi filosofi Jawa “*hamemayu hayuning bawana*” atau menjaga keseimbangan kehidupan dan keselarasan dunia.

Dalam arti lebih luas, Sultan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa merawat keseimbangan antara jagad kecil, mikrokosmos (manusia) dengan jagad besar/alam semesta. Keseimbangan ini diwujudkan dalam perilaku manusia yang senantiasa menjunjung tinggi etika dan kebenaran. Atas dasar itu, menjadi penting untuk terus menanamkan nilai-nilai keragaman sejak dini, terutama terhadap generasi muda yang melek teknologi agar nilai keberagaman dapat didalami secara arif dan bijaksana. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas pun perlu dilakukan agar setiap warga negara memiliki rasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup sehari-hari.

### **Pengalaman Toleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, DIY merupakan daerah yang sejak lama dikenal sebagai wilayah yang sangat baik dalam menjaga nilai-nilai keragaman dan toleransi di Indonesia. Keberagaman budaya dan

agama DIY tetap menjadi acuan meski akhir-akhir ini sempat dirongrong oleh berbagai tindakan intoleran. Pengalaman warga DIY dalam hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok lain dengan latar belakang berbeda menjadi penopang utama keharmonisan dan kerukunan di DIY.

Pada era revolusi kemerdekaan di Yogyakarta, wilayah tersebut begitu terbuka sebagai wadah perjumpaan berbagai etnis dan agama, sipil dan militer. Di Kota Perjuangan itu tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar agama, etnis, dan pandangan politik berbeda berkumpul dalam suasana kekeluargaan dan kekerabatan. Ada Sukarno, Ali Sadikin, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Muhammad Yusuf, Mr. Assat, dan A.R. Baswedan yang berasal dari etnis dan agama berbeda-beda. Ada juga K.H. Wahid Hasjim (Nahdlatul Ulama), Ki Bagoes Hadikoesoemo (Muhammadiyah), Mohammad



Candi Palgading di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Sumber: Istimewa.



Natsir (Persatuan Islam), Sayyid Shah Muhammad Al-Jaeni (Ahmadiyah), dan I.J. Kasimo (Katolik). Merujuk pada pengalaman itu, agaknya para tokoh lintas iman dan etnis itu lebih mementingkan persatuan ketimbang perpecahan. Mereka lebih bersemangat bekerja bersama dan bahu membahu mewujudkan keindahan-keindahan daripada menciptakan keburukan. Mereka mengerti dengan seksama peribahasa Jawa *holopis kuntul baris* yang secara luas bermakna bekerja bergotong royong dengan meredam ego dan kepentingan individual untuk kepentingan bersama yang lebih luas (Latif 2014: 307).

Contoh lainnya yaitu penemuan Candi Palgading di Sleman. Penemuan situs bersejarah di Desa Sinduharjo pada 2006 silam itu membuktikan fakta bahwa Nusantara di masa silam pernah mengalami masa kejayaan di mana umat beragama dapat hidup berdampingan dalam suasana yang rukun dan harmonis tanpa perasaan takut dan ancaman intimidasi dari pihak lain.

Secara administratif, Candi Palgading ini terletak di Dusun Palgading, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Tepatnya sekitar dua kilometer arah timur Kantor Kecamatan Ngaglik. Kompleks Candi Palgading bercorak Buddha itu berada di tengah pemukiman penduduk dengan luas situs kira-kira 1 hektare.

Keharmonisan hubungan antarumat beragama terendus karena tak jauh dari

lokasi itu terdapat Candi Kimpulan, dekat kampus Universitas Islam Indonesia, yang bercorak Hindu. Candi Kimpulan ini berhasil ditemukan secara tidak sengaja pada 11 Desember 2009.

Situs Palgading berasal dari masa kejayaan agama Hindu dan Buddha di Nusantara, tepatnya sejak abad ke-9 hingga 10 Masehi. Hal itu tampak dari struktur bebatuan yang membentuk stupa berukuran kecil. Lalu diperkuat pula dengan keberadaan arca Awalokiteshwara yang merupakan simbol penyembahan Boddhisatwa dalam agama Buddha serta dikenal pula sebagai dewa kasih sayang, dewa asih serta dewa penjaga dalam pantheon Buddha Mahayana.

Begitulah keharmonisan yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski sempat diterpa berbagai aksi intoleran beberapa waktu silam, hingga kini DIY masih dijadikan barometer bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam mengelola keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama. Label inilah yang harus terus dipertahankan agar muncul optimisme dalam masyarakat Yogyakarta—dan di Indonesia secara luas—bahwa kita mampu hidup berdampingan secara damai dalam situasi dan kondisi apa pun.

Tentu saja, hidup rukun dan harmonis bukan dalam arti adanya penyeragaman pikiran, tindakan dan kebiasaan sebagaimana yang kerap kali dipaksakan sekelompok kecil dalam masyarakat. Sebab, penyeragaman

berpotensi melahirkan konflik dan gesekan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tetapi hidup rukun dan harmonis dalam makna saling mengerti dan saling menghargai antara teman dan tetangga, antara kampung dan kawasan serta antarsuku bangsa yang berbeda paham keagamaan dan keyakinan. Kesemuanya sangat mungkin dilakukan karena telah membudaya menjadi kearifan lokal selama ratusan tahun.

### G. MENGELOLA KERAGAMAN DI TANAH PAPUA

Pembicaraan mengenai Papua kerap kali dibarengi dengan pembahasan perihal berbagai konflik yang

mengiringinya. Sebelum tahun 1969, wilayah di timur Indonesia itu dikenal dengan nama New Guinea Barat (West New Guinea). Indonesia mengenal daerah itu dengan nama Irian Barat kemudian berubah menjadi Irian Jaya sejak pembukaan pertambangan Freeport pada tahun 1973. Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid wilayah itu secara informal disebut Papua, dan secara formal pada 2001 menjadi Papua. Namun, para nasionalis Papua hingga kini tetap menggunakan istilah Papua Barat untuk berbagai alasan perjuangan mereka (Bertrand 2012: 233).

Perihal konflik yang selalu disandingkan ketika membicarakan



Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Lipiyus Binilek (tengah), tokoh masyarakat serta pimpinan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) memaparkan hasil pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Papua biasanya seputar soal-soal ekonomi dan politik. Dua sektor itulah yang menjadi alasan para nasionalis berjuang untuk memperbaiki nasib mereka. Selain itu, ada juga konflik antarsuku dan kekerasan yang mengatasnamakan alasan-alasan keagamaan. Fenomena-fenomena tersebut menggoda orang untuk mengimajinasikan wajah Bumi Cenderawasih sebagai wilayah yang “murung” dan “menyeramkan”. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat berbagai pengalaman dan cerita kedamaian di Tanah Papua.

Pengalaman hidup bersama warga Kampung Wonorejo, Papua, merupakan salah satu contoh yang dapat diungkap untuk menunjukkan bagaimana Papua piawai mengelola keragaman di wilayahnya. Fakta ini terungkap dalam penelitian Center for Religious and Cross-cultural Studies, Yogyakarta di wilayah tersebut (Ahnaf dkk. 2016).

Kampung Wonorejo adalah sebuah desa yang terletak di daerah tapal batas antara Papua dan Papua New Guinea. Warga desa ini berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang datang sebagai transmigran yang hidup dengan latar belakang kebudayaan, adat-istiadat, dan agama berbeda. Situasi itulah yang menjadi dasar masyarakat Wonorejo membangun kehidupan yang toleran dengan orang-orang di sekitar mereka.

Masyarakat Wonorejo dengan latar belakang kultur dan keyakinan



Para perempuan mengelola bahan makanan menjadi kue yang siap disantap anggota keluarga.

Sumber: KHOMAINI.

berbeda, mempunyai nilai atau memori bersama yang menjadi semangat dan kekuatan untuk memelihara situasi damai. Karena itu, interaksi masyarakatnya berlangsung dalam upaya untuk mencapai keharmonisan hidup bersama. Interaksi antaretnis yang terjadi di Wonorejo juga terwujud dalam proses transfer pengetahuan. Misalnya, interaksi para perempuan transmigran dari Jawa dan para perempuan Papua dalam mengolah bahan makanan, seperti pengolahan singkong menjadi kue yang dipelajari perempuan Papua dari perempuan Jawa, dan pengolahan sayur pohon pisang yang dipelajari oleh perempuan Jawa dari perempuan Papua (Ahnaf dkk. 2016: 25-26).

Masyarakat Wonorejo memberi contoh pentingnya ruang-ruang pertemuan yang bisa menjembatani



Proses pematangan penganan hasil olahan kaum perempuan.

Sumber: KHOMAINI.

relasi lintas-etnik dan antaragama dalam kehidupan sehari-hari agar mewujud dalam bentuk kedamaian. Praktik pengelolaan keragaman dilakukan melalui adaptasi dan transformasi kegiatan kesenian yang tidak menjadi tradisi eksklusif salah satu kelompok etnis, tapi melibatkan dan merangkul seluruh masyarakat.

Cairnya relasi antaretnis nampak dalam kegiatan kesenian Kuda Lumping dari Jawa Timur dan Bakar Batu dari Papua yang dirayakan dengan melibatkan semua warga. Praktik lainnya seperti semangat gotong royong dalam membangun rumah ibadah, yang melibatkan seluruh warga, terlepas dari latar belakang dan identitas keagamaan yang dianut.

Relasi serupa juga bisa dilihat dalam acara-acara keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal yang dirayakan secara bersama-sama disusul dengan tradisi saling mengunjungi dan menyampaikan ucapan selamat. Di sini, para tokoh agama, pemangku adat dan pemerintah

lokal memiliki peran penting dalam proses pengelolaan keragaman dan menjaga perdamaian. Mereka berperan menebat nilai-nilai keragaman, toleransi kepada masing-masing umat, menghindari materi penyiaran agama yang menyinggung, dan memperkokoh jalinan antarumat beragama.

Meski terbilang berhasil dan menjadi contoh pengelolaan keragaman di Tanah Papua, ketegangan dan konflik tidak serta merta hilang dari wilayah ini. Ketegangan dan konflik biasanya dipicu oleh kecemburuan sosial yang tersimpan dalam relasi antarwarga lantaran para pendatang menguasai sebagian besar sektor-sektor perdagangan kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Ketika persoalan tersebut mencuat, para pemuka agama, pemangku adat dan aparat pemerintah segera meredam agar konflik tidak meluas.

Seperti konflik yang terjadi di Tolikara pada 2015 silam. Sebelum insiden pembakaran masjid di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, berdasarkan penelitian Kementerian Agama Republik Indonesia di lapangan, masyarakat setempat memiliki tradisi saling mengunjungi pada hari besar keagamaan khususnya di hari Idul Fitri dan Natal. Namun, eksklusivisme yang ditunjukkan jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) berakibat pada larangan umat Islam menyelenggarakan salat Idul Fitri di lapangan Makoramil Karubaga menggunakan pengeras suara. Pelaksanaan salat di lapangan

karena umat Islam di Tolikara oleh GIDI dilarang membangun masjid, hanya diperbolehkan membangun musala tanpa pengeras suara. Karena umat Islam tetap melaksanakan salat, perpecahan pun terjadi.

Selain persoalan eksklusivisme dalam beragama, kesenjangan ekonomi antara masyarakat asli dengan pendatang juga menjadi pemicu mencuatnya konflik. Berdasarkan demografi wilayah, umat Islam di Tolikara umumnya berasal dari Sulawesi Selatan, terutama dari Kabupaten Bone. Mereka berprofesi sebagai pedagang. Dari temuan penelitian, sebagian besar (sekitar 80%) pemilik kios adalah umat Islam seperti penjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan profesi tersebut, masyarakat pendatang mampu menguasai sumber-sumber ekonomi warga. Hal ini jika susupi motif-motif politik akan cepat berubah menjadi konflik. Menengok pada pengalaman di daerah lain, mestinya aparat pemerintah bersama dengan warga masyarakat bekerja sama membangun wilayah dan memberdayakan ekonomi warga agar tidak mudah tersulut masalah-masalah identitas. Sebab problem kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat menjadi pemicu berbagai konflik sosial dan ketidakharmonisan di masyarakat.

Dalam relasi dan perjumpaan sehari-hari, warga desa Wonorejo menemukan pola-pola sederhana dalam menyelesaikan persoalan yang mereka

hadapi dan mencari titik temu seluruh warga untuk mendiskusikan banyak hal. Seperti membentuk Balai Kampung yang berfungsi sebagai ruang dialog warga dan mempererat komunikasi antarwarga. Menurut pengalaman warga, cara ini berhasil mengurangi ketegangan yang belakangan diketahui dilatari oleh motif-motif politis. Dengan begitu, setiap warga dapat terlibat dan melihat langsung proses tersebut, sehingga menjadi pembelajaran bagi mereka. Mekanisme penyelesaian konflik lainnya misalnya, dengan membuat perjanjian dan penetapan sanksi terhadap mereka yang melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan konflik (Ahnaf dkk. 2016: 53).

Begitulah cara warga mengelola keragaman dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan sehingga harmoni dan kerukunan tetap berlangsung di wilayah mereka dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

### **Filsafat “Satu Tungku Tiga Batu”**

Peristiwa konflik dan kekerasan yang terjadi di Tanah Papua menjadi ironi tersendiri sebab masyarakat adat Papua memiliki mekanisme penyelesaian masalah, konflik, atau perang di antara mereka yang disebut dengan “Satu Tungku Tiga Batu”. Filsafat hidup ini bermula dari Fakfak, Papua Barat, lalu diadaptasi wilayah lain di Papua karena memiliki semangat sama. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup warga



Remaja Masjid Kampung Pasir Putih, mengiringi Pastor dalam prosesi Misa Pembukaan Temu OMK Se-TPW Fakfak 2015, di Gereja St. Yosep Brongkendik.

Sumber: Jeje Hindom.

Papua dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup, antara lain melalui penghormatan yang tinggi terhadap pentingnya kerukunan hidup antarumat beragama yang ada di daerah itu, yakni Islam, Kristen, dan Katolik.

Semboyan “Satu Tungku Tiga Batu” diambil dari kebiasaan memasak masyarakat setempat yang menggunakan tungku dengan batu sebagai penopangnya. ‘Tungku’ adalah kebersamaan hidup. ‘Tiga Batu’ adalah simbol dari tiga agama besar—Kristen, Katolik dan Islam—yang hidup di sana. Masyarakat meyakini, jika keseimbangan terjaga stabil, semua persoalan hidup dapat diatasi dengan baik. Semboyan “Satu Tungku Tiga Batu” juga berarti sinergi harmonis

antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu Adat, Agama, dan Pemerintah. Sinergi artinya mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Kecerdasan para pemuka adat dan agama di Fakfak sejak tiga abad lalu telah memungkinkan harmoni dan kerukunan agama dan adat berlangsung baik di Tanah Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan tenggang rasa dalam bangunan masjid yang didirikan persis di bibir pantai Kampung Patimburak (100 kilometer dari Kota Fakfak). Gagasan monumental dari bangunan ini adalah memadukan bentuk Masjid dan Gereja. Bangunan dan ornamen masjid menjadi simbol toleransi penuh makna sejak masjid berdiri pada 1700-an.

Dari semboyan sederhana itu, kita berharap kerukunan yang terjalin di Fakfak dapat menyebar ke seluruh wilayah lain di Papua dan mampu menginspirasi anak-anak bangsa untuk menjaga kerukunan umat beragama di Tanah Air. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu.

#### H. GUS DUR (ABDURRAHMAN WAHID)

Sebenarnya, dirasakan agak kurang pas jika karya ini hanya membahas 1 tokoh ini tanpa tokoh-tokoh yang lain. Secara umum, sudah dibahas beberapa tokoh dalam pembahasan di bab dan sub-bab yang sudah disajikan. Juga, karya *Mata Air Keteladanan* (Yudi Latif 2014) memberikan rincian dan lintasan

yang luas mengenai manusia-manusia Indonesia. Namun, agaknya, Gus Dur terlalu penting untuk tidak dibicarakan secara khusus. Ada alasan sederhana, Gus Dur adalah tokoh kebangsaan, disebut sebagai tokoh pejuang keragaman Indonesia (pluralis), tokoh perdamaian dunia, dan Presiden Republik Indonesia.

Gus Dur sudah memberikan wajah optimis Indonesia dengan kemampuan mengelola segala keragaman Indonesia, sekaligus memberikan penghargaan yang tinggi terhadap agama dan kepercayaan. Selain itu, Gus Dur juga turut hadir di beberapa simpangan penting sejarah Indonesia, yaitu awal '70-an, '80-an, dan transisi di masa reformasi.

Gus Dur, atau Abdurrahman Wahid, sudah menunjukkan tanda-tanda kuat ketokohnya dengan kemampuannya mengolah pengetahuan yang dalam mengenai ilmu dan dunia, juga kepekaannya atas peralihan sejarah. Gus Dur membawa nilai-nilai keindonesiaan sebagai penanda dari kemanusiaan yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Tulisan maupun tindakannya ketika memimpin Dewan Tanfidz Nahdlatul Ulama—menjadi Ketua PBNU, setelah Muktamar Situbondo 1984—membangun ruang Indonesia yang saat itu diwarnai tekanan kuat dari rezim Order Baru dan tumbuhnya aspirasi-aspirasi akar rumput (misalnya tercermin dalam Muktamar Cipasung 1994).



Abdurrahman Wahid (1940–2009) alias Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia ke-4, menjadi yang terdepan dalam membela kelompok-kelompok minoritas.

Sumber: [www.rmol.co](http://www.rmol.co).

Secara terus menerus Gus Dur memilih untuk menggaungkan keindonesiaan dengan risiko dianggap *plin-plan*. Sebagian karena kecerdasan, sebagian karena relasinya yang amat luas, pilihan-pilihan yang tidak populer namun menggaungkan keindonesiaan ini tetap mendapatkan dukungan yang cukup penting. Bahkan, ketika Gerakan Reformasi menuntut Suharto turun dari jabatan Presiden, Gus Dur bersama beberapa tokoh lain menyediakan diri untuk “pasang badan” dalam peralihan sejarah itu. Ada suatu pemahaman di kala itu bahwa peralihan sejarah ini tidak boleh menjadi peristiwa kekerasan.

Ketika Gus Dur menjadi presiden, langkah-langkahnya untuk “merangkul” pihak-pihak yang pernah direpresi di masa Orde Baru mendapatkan reaksi yang berbeda. Namun, karena Gus Dur sendiri mengalami situasi yang cukup sulit semasa menjadi Ketua PBNU, maka langkah ini dirasa masuk akal.

Lebih dari itu, kepeduliannya terhadap kelompok Tionghoa juga menjadi amat kuat dengan penegasannya mengenai kenyataan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari “Rumah Indonesia”. Konon, Gus Dur bahkan menerima penganut Parmalim (kepercayaan tradisional sebagian etnis Batak Toba). Peristiwa penerimaan Gus Dur sebagai Presiden RI pada kelompok kepercayaan ini menjadi penanda penting dalam sejarah kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Tindakan Gus Dur ini juga berdampak positif pada relasi inter-etnis Batak, baik yang beragama “resmi” maupun penganut aliran kepercayaan.

Persamaan hak, penghargaan terhadap kemajemukan, penegakkan hukum yang adil tanpa memandang posisi dan kedudukan seseorang, serta kebebasan, merupakan isu-isu utama yang selalu ia sampaikan di berbagai forum dan kesempatan berbeda. Juga tidak harus dalam situasi formal saja, terkadang ia menyampaikan gagasan-gagasannya itu dalam bentuk ilustrasi atau lewat guyon dan gaya jenaka sekaligus, tetapi sarat makna.

Gus Dur bukanlah sosok yang gemar menyampaikan pemikirannya agar diterapkan orang lain, tetapi berupaya mempraktikkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja jalan yang ia tempuh tidak selalu mulus. Kritik dan cemooh datang silih berganti, namun Gus Dur bergeming tetap menyosialisasikan pemikirannya ke berbagai forum seminar dan diskusi. Inilah bentuk konsistensi Gus Dur. Meskipun banyak yang mengecapnya sebagai orang yang abaik pada mayoritas, tetapi membela minoritas dengan gigih.

Belakangan, banyak kalangan baru mengerti bahwa tingkah putra K.H. Wahid Hasyim itu bertujuan mengajak kelompok mayoritas untuk menghargai hak-hak kelompok minoritas, sekaligus menghadirkan rasa aman bagi mereka. Sebab dalam demokrasi, setiap orang harus berdiri setara. Semua pihak juga memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman dan nyaman tanpa tekanan dan intimidasi kelompok lain. Jika semua itu berjalan, kerukunan dan harmoni yang menjadi cita-cita bersama bukanlah hal sulit untuk diraih. Itulah optimisme yang terus disuarakan anak bangsa yang mencintai negerinya dengan sepenuh hati seperti Gus Dur.





# CATATAN PENUTUP

**H**idup dengan keanekaragaman yang luar biasa berarti hidup dengan tarikan-tarikan yang juga luar biasa banyak dan kuat. Ada godaan popularitas, ada juga godaan untuk mengurung diri. Tingginya intensitas hubungan-hubungan sosial berskala global membuat bangsa multikultural bukan hanya menghadapi potensi ledakan pluralisme dari dalam semata, melainkan juga tekanan keragaman dari luar. Terjadi tarikan global ke arah perdamaian yang disertai oposisi dan antagonisme. Di seluruh dunia, "politik identitas" (*identity politics*) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif berbasis etnis, bahasa, dan agama mengalami gelombang pasang.

Tidak ada satu pun tokoh Indonesia yang tidak paham mengenai tantangan di atas. Sukarno, Sang Proklamator,

ketika membangun konsensus kebangsaan dalam sidang BPUPK Mei-Juni 1945, memahami bahwa kekayaan Indonesia itu harus sanggup hidup dan saling mengisi. Begitu juga dengan para penggiat perdamaian dalam konflik Aceh, Papua, Maluku, dan Poso. Mereka sadar bahwa setiap korban yang jatuh atau setiap orang yang disiksa adalah sebuah pertanyaan terhadap kemanusiaan. Setiap perbedaan yang dijadikan bahan konflik dan penundukan adalah sebuah gugatan terhadap sikap kebangsaan. Setiap kelemahan yang dieksploitasi menjadi bahan cemooh dan kampanye politik adalah perendahan pada kekuatan jiwa merdeka Indonesia.

Baiklah kita merujuk pada pesan moral risalah Nurcholish Madjid (Cak Nur), salah satu di antara sekian pejuang kemanusiaan Indonesia yang memandang perbedaan sebagai

rahmat, sejauh didasarkan pada komitmen etis kebangsaan dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dalam *Indonesia Kita*, Cak Nur mengungkapkan bahwa perbedaan yang tidak terolah, atau malah mewujud menjadi pertarungan *zero-sum-game* dapat dimengerti sebagai “kekerdilan” dari kepemimpinan di dalam masyarakat.

Para tokoh pendiri negara telah merintis usaha penggalian ide-ide terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia. Tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas, ide-ide itu belum semuanya terlaksana dengan baik. Bagian-bagian yang telah terlaksana, khususnya wujud negara Republik Indonesia itu sendiri, merupakan modal utama bagi kita, sebagai peninggalan baik para patriot nasionalis pendiri negara itu. Tetapi, bagian-bagian yang belum terlaksana, seperti pembangunan nasional demi maslahat umum dengan keadilan dan kejujuran, merupakan sumber berbagai krisis yang melanda kita sekarang ini. Disebabkan oleh faktor kemudaan yang juga berarti kekurangmatangan kita semua sebagai bangsa baru, ide-ide terbaik para pendiri negara itu, dalam pelaksanaannya sering

berhadapan dengan apa yang dikatakan Bung Hatta sebagai jiwa-jiwa kerdil sebagian pemimpin kita (Madjid 2004: 115-116).

Soal Indonesia adalah soal mencintai. Mencintai berarti berkembang bersama. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak tanpa alasan jika dalam alinea itu dinyatakan, “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Melindungi dapat diumpamakan seperti merawat dan mendidik anak. Sepanjang pertumbuhan anak tersebut, perlindungan mutlak diperlukan. Seturut pertumbuhan umur, cara melindunginya juga berkembang.

Dalam tahap berikutnya, kita mendapati “...memajukan kesejahteraan umum...” yang menjadi upaya luas untuk membangun kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera.

Berikutnya, “...mencerdaskan kehidupan bangsa...” menjadi upaya mencintai yang penting, karena kehidupan terus berkembang, dan generasi akan berganti. Amat menarik bahwa para pendiri bangsa tidak memilih “pintar”, “pandai”, “cerdik”, “cendekia”, tetapi memilih kata “cerdas”. Cerdas mengandaikan kemampuan kategoris manusia, yaitu menangkap pengetahuan dan mengolahnya, apa pun dan dari mana

pun asalnya. Cerdas juga mengandaikan interaksi timbal balik. Jika “pandai” amat bertumpu pada ukuran numerik, ada dalam kerangka pengajaran, dan bersifat individu, maka “cerdas” selalu bersifat kebersamaan. Anak yang “pandai” sudah jelas mempunyai keunggulan kognitif individual, tetapi secara kebersamaan atau sosial, ia dapat menjadi orang yang eksklusif atau tidak tahu banyak. Inilah yang menjadi dasar utama mengapa pendiri bangsa mendirikan pondasi “cerdas” dalam keindonesiaan.

Karena bangsa Indonesia hidup dengan bangsa lain, dan juga terikat kewajiban sebagai manusia untuk selalu memperhatikan situasi kemanusiaan, fondasi solidaritas dinyatakan dengan kalimat “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Hal ini mencerminkan pengalaman pendiri bangsa bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia juga disertai solidaritas bangsa lain. Bangsa-bangsa seperti India, Mesir, Australia, Syria, Ukraina, dan juga yang lain, mempunyai peran penting dalam mengangkat upaya kemerdekaan di tingkat internasional. Sebaliknya, Indonesia berperan penting berjuang untuk emansipasi bangsa-bangsa seperti Aljazair, Tunisia, Sri Lanka yang terjadi dan mengemuka ketika Konferensi Asia Afrika 1955.

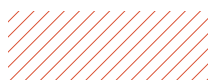
Karakter keindonesiaan (Nusantara) itu pertama-tama tercetak karena pengaruh ekosistemnya. Sesuai dengan

karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau, karakter keindonesiaan juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan; menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran.

Karakter keindonesiaan juga merefleksikan sifat tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, karakter keindonesiaan adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang.

Dengan karakter seperti ini, mencintai Indonesia adalah masalah yang amat besar, luas, dan bersifat antargenerasi. Tongkat estafet upaya mencintai ini dilakukan secara baik dari pendiri terus sampai generasi ratusan tahun ke depan. Mohammad Hatta, pendiri bangsa dan wakil presiden Indonesia pertama, terkenal dengan ujarannya bahwa mencintai Indonesia perlu cinta yang amat besar dan luas, karena Indonesia juga amat bhineka, besar, dan luas.

**Tradisi-tradisi** yang hingga kini masih berlangsung di tengah kehidupan berkomunitas merupakan cara **masyarakat Nusantara** untuk membangun **harmoni, persaudaraan, kerja sama,** dan **nilai positif** lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, M. Iqbal, dkk. ed. 2016. *Papua Mengelola Keragaman: Pengalaman Warga Kampung Wonorejo, Kabupaten Keerom, Papua*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural Studies.
- Ali Ahmad, Haidlor ed. 2013. *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bertrand, Jacques. 2012. *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Bräuchler, Birgit ed. 2009. *Reconciling Indonesia: Grassroots Agency for Peace*. London dan New York: Routledge.
- Bräuchler, Birgit. 2015. *The Cultural Dimension of Peace: Decentralization and Reconciliation in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Budiman, Hikmat ed. 2012. *Kotakota di Sumatra: Enam Kisah Kewarganegaraan dan Demokrasi*. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Chambert-Loir, Henri dan Hasan Muarif Ambary. 2011. *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Ecole française d'Extrême-Orient, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Davidson, Jamie S., David Henley, dan Sandra Moniaga. 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- E.S. Agustanty dkk. 2007. "Bersatu Kita Teguh di Tana Poso" dalam Alpha Amirrachman. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal*. Jakarta: International Center for Islam and Pluralism (ICIP).
- Fauzi, Arifatul Choiri. 2007. *Kabar-kabar Kekerasan dari Bali*, Yogyakarta: LKiS.
- Gilbert, Jeremy 2013. *Common Ground: Democracy and Collectivity in an Age of Individualism*. London: Pluto Press.
- Hefner, Robert W. 2001. *The Politics of Multiculturalism Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Hitchcock, Michael dan I Nyoman Darma Putra. 2007. *Tourism, Development and Terrorism in Bali*. Hampshire: Ashgate Publishing.
- Hornbacher, Annette. 2009. "Global conflict in cosmocentric perspective: A Balinese approach to reconciliation," dalam Birgit Bräuchler ed. 2009. *Reconciling*

- Indonesia: Grassroots Agency for Peace*, New York: Routledge.
- Howe, Leo. 2005. *The Changing World of Bali: Religion, Society and Tourism*. London dan New York: Routledge.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small town wars*. London dan New York: Routledge.
- Koentjaraningrat. 1964. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1987. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lombard, Denys. 1996a. *Nusa Jawa: Silang Budaya: 1. Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, Denys. 1996b. *Nusa Jawa: Silang Budaya: 2. Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, Denys. 1996c. *Nusa Jawa: Silang Budaya: 3. Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.
- Latif, Yudi. 2015. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Universitas Paramadina dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia.
- Nata, Abuddin dkk. 2016. *Pemata dari Surga: Potret Kehidupan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Robinson, Geoffrey. 2005. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, Yogyakarta: LKiS.
- Rosdiawan, Ridwan, dkk. 2007. "Merajut Perdamaian di Kalimantan Barat" dalam *Revitalisasi Kearifan Lokal*, Alpha Amirrachman, International Center for Islam and Pluralism (ICIP): Jakarta.
- Pendit, Nyoman S. 2001. *Nyepi: Kebangkitan, Toleransi dan Kerukunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pringle, Robert. 2004. *A Short History of Bali: Indonesia's Hindu Realm*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Ricklefs, M.C. 2001. *A History of Modern Indonesia since c.1200: Third Edition*. Hampshire: Palgrave.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Sen, Amartya. 2005. *The Argumentative Indian: Writings on Indian Culture, History, and Identity*. London: Penguin Books
- Setia, Putu. 2014. *Bali Menggugat*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Simbolon, Parakriti T. 1995. *Menjadi Indonesia: Buku I*. Jakarta: Kompas-Grasindo.
- Soedjatmoko. 1994. *Menjelejah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner*. Jakarta:

- Gramedia Pustaka Utama.
- Soethama, Gde Aryantha. 2011. *Jangan Mati di Bali: Tingkah Polah Negeri Turis*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suparlan, Parsudi. 2005. *Sukubangsa dan Hubungan antar-Sukubangsa*. Jakarta: Penerbit YPKIK Press (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kependidikan).
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toer, Pramodya Ananta. 1995. *Arus Balik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toisuta, Hasbollah, dkk. 2007. "Damai... Damai di Maluku!" dalam Alpha Amirrachman. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal*. Jakarta : International Center for Islam and Plularism (ICIP).
- Tomagola, Tamrin Amal. 2007. "Anatomi Konflik Komunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso dan Kalimantan 1998–2002," dalam Alpha Amirrachman. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal*. Jakarta : International Center for Islam and Plularism (ICIP).
- Vlekke, Bernard H.M. 2016. *Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Walzer, Michael 1997. *On Toleration*. London: Yale University Press
- Artikel online**
- "Analisis Faktor Integratif Nyama Bali-Nyama Selam, Untuk Menyusun Buku Panduan Kerukunan Masyarakat di Era Otonomi Daerah," oleh I Made Pagueh, Wayan Sugiarta, dan Ketut Sedana Artha, <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/2178/1894>
- "Apakah Agama Hindu Bali Modern Lahir dari Tantangan Pancasila dan Islam?" oleh Nyoman Wijaya, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=366850&val=5809&title=Apakah%20Agama%20Hindu%20Bali%20Modern%20Lahir%20dari%20Tantangan%20Pancasila%20dan%20Islam>
- "Bangsawan Pikiran," oleh Rosihan Anwar, <http://koloms.blogspot.co.id/2007/09/bangsawan-pikiran.html>
- "Begini Lian Gogali Meredam Konflik Agama di Poso," <https://m.tempo.co/read/news/2013/08/20/058505862/begini-lian-gogali-meredam-konflik-agama-di-poso>
- "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?" oleh Parsudi Suparlan dalam <https://etnobudaya.net/2014/09/11/bhinneka-tunggal-ika-keanekaragaman-sukubangsa-atau-kebudayaan/>
- "Dewi Dja, Duta Kebudayaan Indonesia," <http://1001indonesia.net/dewi-dja/>
- "Gedong Bagoes Oka, Tokoh Perdamaian dan Kerukunan Antaragama," <http://1001indonesia.net/ibu-gedong-bagoes-oka/>
- "Gus Dur: Pembela Kaum Minoritas dan Kelompok yang Terpinggirkan," <http://1001indonesia.net/gus-dur/>

- "Hubungan Pela & Gandong Antara TIHULALE – KAILOLO," <http://www.tihulale.com/2015/06/Hubungan-Pela-Gandong-Antara-TIHULALE-KAILOLO.html>
- "Interaksi Sosial Antarumat Beragama di Perumahan Bumi Dalung Permai Desa Dalung, Kuta Utara, Badung," oleh Aliffiati, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15715/10492>
- "Interaksi Sosial Masyarakat Etnik Cina dengan Pribumi di Kota Medan Sumatera Utara," oleh Erika Revida, [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15293/1/har-sep2006-%20\(4\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15293/1/har-sep2006-%20(4).pdf)
- "Intoleransi di kota Toleran Yogyakarta," <http://crcs.ugm.ac.id/id/berita/8264/intoleransi-di-kota-toleran-yogyakarta.html>
- "Keterangan Pers : Peristiwa Penyerangan dan Pembakaran Rumah Ibadah di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara," oleh Komnas HAM <https://www.komnasham.go.id/files/20160811-keterangan-pers-peristiwa-penyerangan-5N8M.pdf>
- "Kuli Cina di Perkebunan Tembakau Sumatera Timur Abad 18," oleh Guntur Arie Wibowo, <http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4786/2192>
- "Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Intoleransi 2014," oleh The Wahid Institute, <http://wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan%20kbb%202014%20-%20the%20wahid%20institute.pdf>
- "Lian Gogali, Perempuan Agen Perdamaian Poso," <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/615289-lian-gogali-perempuan-agen-perdamaian-poso>
- "Medan sebagai Kota Pembauran Sosio Kultur di Sumatera Utara pada Masa Kolonial Belanda," oleh Suprayitno, <http://repository.usu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/15303/his-agu2005-%20%281%29.pdf?sequence=1>
- "Social Entrepreneur Terbaik 2011 Sofyan Tan: Melawan Diskriminasi dengan Pembauran," <http://poty.sindonews.com/dokumen/poty-2011-Sofyan-Tan.pdf>
- "Soedjatmoko: Tokoh Intelektual Terkemuka yang Dimiliki Indonesia," <http://1001indonesia.net/soedjatmoko/>
- "Mendalami Filosofi 'Satu Tungku Tiga Batu' Sebagai Warisan Kearifan Lokal," <http://www.fak-fak.com/2014/11/mendalami-filosofi-satu-tungku-tiga.html>
- "Model Pendidikan Multikultural di 'Sekolah Pembauran' Medan," oleh Saliman, Taat Wulandari, dan Mukminan, <http://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/2383/pdf>
- "Pengertian Pela dan Gandong Sebagai Budaya Maluku," <http://pelagandong.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-pela-dan-gandong-sebagai.html>
- "Pesantren Desa Pegayaman, Meleburnya Jagat Bali dalam Kearifan Islam," oleh



- Moh. Mashur Abadi, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/59/57>
- "Prasangka terhadap Etnis Tionghoa di Kota Medan: Peran Identitas Nasional dan Persepsi Ancaman," oleh Omar Khalifa Burhan dan Jefri Sani, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=152464&val=4107&title=PRASANGKA%20TERHADAP%20ETNIS%20TIONGHOA%20DI%20KOTA%20MEDAN:%20PERAN%20IDENTITAS%20NASIONAL%20DAN%20PERSEPSI%20ANCAMAN>
- "Proses Interaksi Salam-Sarane Pascakonflik di Maluku," oleh Hadi Basalamah, dipublikasi pada 9 April 2014 oleh *Jurnal Tahkim* dalam <https://tahkimjurnalsyariah.wordpress.com/category/vol-iv-nomor-1/8-hadi-basalamah/>
- "Realitas Pembauran Etnis Cina Di Kota Medan," oleh Rina Manurung dan Lina Sudarwati, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15444/1/kph-jun2005-%20%284%29.pdf>
- "Relasi Dayak – Madura di Retok," <http://kristianusatok.blogspot.co.id/2008/05/relasi-dayak-madura-di-retok.html>
- "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal," <http://www.lontarmadura.com/resolusi-konflik-berbasis-kearifan-lokal/#ixzz4GGC2ujQ6>
- "Suster Brigitta: Perempuan adalah Pelopor Perdamaian," <http://www.jurnalperempuan.org/tokoh/suster-brigitta-perempuan-adalah-pelopor-perdamaian>
- "Suster Brigitta Renyaan, Berjuang untuk Kemanusiaan," <http://news.liputan6.com/read/114775/suster-brigitta-renyaan-berjuang-untuk-kemanusiaan>
- "Toleransi Beragama dalam Praktik : Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng," oleh Cahyo Pamungkas, [https://www.researchgate.net/publication/304213284\\_TOLERANSI\\_BERAGAMA\\_DALAM\\_PRAKTIK\\_SOSIAL\\_Studi\\_Kasus\\_Hubungan\\_Mayoritas\\_dan\\_Minoritas\\_Agama\\_di\\_Kabupaten\\_Buleleng](https://www.researchgate.net/publication/304213284_TOLERANSI_BERAGAMA_DALAM_PRAKTIK_SOSIAL_Studi_Kasus_Hubungan_Mayoritas_dan_Minoritas_Agama_di_Kabupaten_Buleleng)
- "Unsur Pembangunan Karakter Bangsa dalam Kearifan Lokal Bali," oleh Suci Budiwaty, [http://repository.gunadarma.ac.id/490/1/Unsur%20Pembangunan%20Karakter%20Bangsa%20Dalam%20Kearifan%20Lokal%20Bali\\_UG.pdf](http://repository.gunadarma.ac.id/490/1/Unsur%20Pembangunan%20Karakter%20Bangsa%20Dalam%20Kearifan%20Lokal%20Bali_UG.pdf)
- "Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Kiprah Sekolah Pembauran di Medan," <http://1001indonesia.net/yayasan-perguruan-sultan-iskandar-muda/>